

**DIVERSIFIKASI PILIHAN POLITIK KIAI DALAM PILKADA
LANGSUNG DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2006**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

Pujiyanto
NIM: 2101269

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs Abu Hapsin MA, Ph.D
Perum Depag IV/7 Tambak Aji - Ngaliyan
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp	: 4 (empat) Eksemplar	Kepada Yth
Hal	: Naskah Skripsi A. n. Sdr Pujiyanto	Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah melihat, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Pujiyanto
NIM : 2101269
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **DIVERSIFIKASI PILIHAN POLITIK KIAI DALAM
PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2006**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.

atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 15 Juli 2008
Pembimbing

Drs H Abu Hapsin MA, Ph.D
NIP 150 238 492

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2008

Deklarator

Pujiyanto
NIM. 2101269

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis haturkan ke Illahi Robbi, atas segala kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *Salam* tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, atas segala yang telah dilakukan Beliau Nabi untuk manusia dan alam semesta. Akhirnya, dalam kehidupan yang penuh misteri ini, dengan segala kekurangan, dengan “terima kasih” yang tak terucapkan, penulis persembahkan karya yang penuh dengan keterbatasan ini kepada:

1. Orang tua penulis; *Kagem Ma'e, Pa'e, matur nuwun* atas segala hal yang telah di berikan kepada putranda yang belum pernah membuat Panjenengan tersenyum bangga... Maafkanlah ananda yang belum bisa merealisasikan cita dan asa. Terimakasih atas segala kasih dan sayang yang tidak mungkin tergantikan, yang tidak akan pernah dapat ananda balas, yang tidak akan ananda lupakan sampai ruh ini terlepas dari wadak.
2. *Mbae-Kange* yang terus ngemong dan bisa menerima apa adanya adek yang manja dan *mbeling* ini; Mbak Thi yang baik dan tidak pernah marah, Mbak Is yang pengertian, selalu tersenyum, ikhlas dan tanpa pamrih menerima dan memahami kenakalan penulis, Kang Mhet yang selalu *ngalah* dan *nrimo*, Mbak Ning yang meski sedikit cerewet, tetapi sangat dan selalu sayang, yang selalu mengasihi penulis, takkan penulis lupakan semua yang telah *Njenengan* lakukan, tidak lupa buat Mas Dhi, Kang Jho, Bang Wawan dan Mbak Nayah

3. Keponakan penulis; Eko, Ira, Vio, Ina, Fery, Eksan, Nabila dan Arla yang selalu ada di hati penulis, yang menjadi sumber inspirasi...
4. *Lek Shu* dan *Mbokde Nie* yang telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran dan kasih sayangnya, yang dengan ikhlas *ngemong* penulis ketika rama-bunda di rantau... Bok Dhe, jasa *njenengan* terlalu besar dan sulit untuk dilukis dengan tinta..
5. Sahabat-sahabat seperjalanan di PMII IAIN maupun Justisia; Umam, si "hitam manis" yang kekanak-kanakan tapi baik hati dan sering prihatin, Tedy yang tak ingin mengganggu dan diganggu, yang meminjamkan begitu banyak buku dan meluangkan waktu untuk diskusi dan membantu penulis, Wiwied yang telah jadi politisi, Iman yang *leading* ke dosen, Zarqoni yang semakin berbobot, Irfan yang lembut, Duren yang pekerja keras dan *ngalahan*, Asfiah yang baik, Tri yang tetep kurus (udah makan belum?), Nunik, Muasy, Maghfur, Maskin, Masturi.. yang sering penulis tunjukkan sifat cengeng, egois, suka menang sendiri..., yang tetap mau saling mengerti dan berbagi, yang sering penulis sakiti, yang sering berkelahi, baik wacana maupun rasa, baik logika maupun mistik, terimakasih banyak
6. Politisi BEMI 2005; Tafid yang birokratis dan rapi, Rusmadi sang ambisius namun kurang beruntung, Fatah yang rajin dan sedikit keras kepala, Rahul putih yang selalu mujur dan penuh perhitungan, Bukhori yang slalu *ngalah*, Arofah yang santun...

7. Buat senior yang selalu membimbing; “Si Komodo” Adib Brendy yang toleran, yang mau mengerti, yang selalu menjadi teman diskusi yang baik dan tepat, yang tak pernah bosan mengarahkan... Kang Aziz Hakim yang dewasa dan obyektif, Mas Ali Maskur yang keras, Kang Richard yang lunak, Abang Yusro yang hitam, Kang Din, Kang Jamal, tak lupa Kang Ali Ansori yang telah memberi masukan yang tak ternilai bagi penulis. Kang Henry yang tegas..
8. “Adek-adekku” yang luar biasa dan pintar; Sotek, Guponk, Evie, Zaqqi, Arief, Najib, Sujik, Ikkak’, Diah, Nasruddin, Jojo’, Idin, Una, Ana, Ovie, Rofi’, Khamdany, Erna, Koplinc, Yony, Khozin, Rouf, Nikmah, Icha, Lina, Udin, Kambali, Ubaid, Ya2n, Alfian, Munif, Laila, Faizin, dan lainnya yang memang banyak banget
9. Senior Justisia; Kang Manto al-Qurtubi yang sering penulis buat jengkel, Kang Jukari, PU Umam, Mbak Umi, Mbakyu U’un, Supra, Syarunk,
10. PMII Purwodadi; Kang Fauzi, Fatah, Solikin, Menyun Rifa’i, Mbak Endah, Lely, Afif, Shanty, Juned, Kang Hisyam, Nenck Ema yang Culun, Purwadi, Rubadi, Mila, Asnawi, Joko, Luluk, Pontok, Yasar, Ulya, Anik yang.... dan yang lainnya yang baik hati, tidak sombong dan rajin belajar. Juga Arif Jombang yang sabar
11. Suheng dan Sedulur ASA; yang telah ikut serta dalam membuka tabir jalan takdir yang terjal dan samar, Kang Komplong, Bank Ndut, Mas Jacky, Hamam, Jenal.

12. *Sederek* sekampung di IMPG yang walo lintas ideology dan sarana yang memang sangat minim, namun tetap setia pada Purwodadi-Grobogan tercinta; Andik, Khamdi, Ceppin, Koko, Uciel, Kambali, Syafak Kasto, Noer, Diana, Muna, Iyus..
13. Kawan-kawan SIBESPERA; Henry-Anex (Bos UNTAG), Bom-bom (Penguasa UNIKA), Zuhri (Pemilik UWH), Utoyo-Sugenk (Diktator UNPAND), Muryanto-Muhammad (Preman IKIP PGRI), Musonep (Pengendali UMK), Taqqim (Pewaris STAIN Kudus)... banyak hal telah kita lakukan. Membuat perjuangan ini begitu cepat dan akan terus ada di dada-jiwa, Amiinn. Juga buat Kholis-Saeful (UNNES), Raja-Firdaus (Unisbank), Poppy (UDINUS), Jija (BPD Jateng), Marsity (UNIMUS), Aries (UNDIP), Salaf (IAIN Surabaya), Kaisar (UIN Jogja)... semoga proses bareng kita bermanfaat
14. Rekan-rekanita dari IPNU, baik di Ancab Penawangan, Grobogan maupun Wilayah, Kang Amin, Kang Thalkis, Agus Ndut, Kang Amin, Adhie rewo-rewo, Pak Lurah Masahudi'ien, Dewi, Umie..
15. Pembimbing dan Kawan Penulis di AMANAT; Mas Joko yang setia dan telaten, Kang Huda Gendut yang cerdas dan optimis, Mamhet yang bersahaja, Mbak Budi, Mbak Alfi yang tetep idealis, Kang Hakim, Mas Ink yang tetep *kemaki*, Kang Mafud, sang *Prospector* Eros yang memang tegar, Lek Sis yang khalem, Kang Ali yang manutan, Olis yang gak berubah, Edy Purno yang sedikit saru, Karmani, Doni.. AMANAT

bukanlah apa-apa, tapi segalanya bisa berawal dari AMANAT. Juga Kang Samsul

16. Adek-adek penulis di AMANAT yang pintar, jujur, dan sebagian penggemar 3GP... Any, Masorien, Sekon, Farikh lugu, Syafak aneh, Amin pintar, Arifah, Winarto, Naseh culun, Pienk, Jarno ganteng yang rajin menolong dan tidak sombong, Indah, Fany, Afidah gendut, Amri lucu, Catoer krus, Ikha, Risak, Fayik Mentel, Intak jujur, Lika caem, Diman jowo, Dhe Jho gedhe, Muslimah polos, 'Anif, Tari, Sulis sensi, Arif. Juga Rika yang... tidak ketinggalan; "Kantor" SKM AMANAT... terima kasih.
17. Konco Kumpulan *Njobo* yang selalu bersatu untuk berseteru dengan alam dan keadaan dengan disiplin masing-masing, Rere UNTAG yang tegar berproses, Mas Tunjank UNISSULA yang pendiam, Dek Nunk UNIMUS yang kini jadi dokter yang sering penulis ganggu dan hoby menolong teman, Topan UNDIP, Edi Gendut yang kemaki tapi baik hati, Jibril yang aneh, Wito si seniman kurang beruntung, Hadi yang keras kepala namun obyektif, Parjio yang tetep mbeling, Cak Hery yang pendiam yang punya banyak bakat, yang..., Cak Chink yang aneh
18. Romo Guru yang selalu membimbing penulis dengan ilmu dan kasih sayangnya; Kiai Abu Mansur yang tegas, Pak Dhe Dhi yang selalu menerima keluhan penulis 24 jam, tidak lupa "Pemejang" Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, Pak Harnoto yang tetap istiqomah, Pak Dhe Modin, *Mbah* Dalang Sutrisno Madiun.. terimakasih banyak.

19. “Mang” Abu Hapsin yang telah menjadi bapak sekaligus pembimbing penulis di IAIN, yang dengan sabar mengarahkan dan selalu penulis repotin...
20. Tsani’ yang selalu mau mengerti apa yang penulis lakukan, yang selalu mengalah dan *nrimo* ...thanks a lot..
21. Murni yang memberi kesempatan penulis untuk kuliah, Yanti yang sabar, Isti yang sedikit irrasional, Katrin yang labil, Aroh Yang Tegas... Yang telah menempa penulis, hingga penulis bisa seperti ini, semoga kenangan kita abadi; takkan tergores oleh berputarnya bumi...
22. PMII Semarang; Hernawan, Ella’, Ulin, Ardhie, Ryan...
23. Genk JS 01, Yesus Anas, Nichlah, O’o, Mbah Qin, Zaenur, Ulil, Dholi...
24. Tidak lupa kepada seluruh pihak yang membantu terciptanya skripsisi sederhana ini; eksekutif, legislatif dan yudikatif di Grobogan, para kiai, responden dan lain sebagainya. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Bismilahir Ramhmanir Rahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesabaran, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Diversifikasi Pilihan Politik Kiai Dalam Pilkada Langsung Di Kabupaten Grobogan Tahun 2006***" tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bpk. Prof. Dr H. Abdul Djamil M.A. Selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bpk. Drs, H. Muhyiddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs Abu Hapsin MA, Ph.D sebagai pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs, Ahmad Arif Junaidi MAg selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs Rupi'i MAg selaku Sekretaris Jurusan SJ

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah atas jasanya.
6. Segenap Staf karyawan Fakultas Syari'ah, atas kerja samanya selama ini.
7. Segenap jajaran di Pemda Kabupaten Grobogan (Bupati, Sekda, Kesbanglinmas, Bag Sos, Humas, dll), KPUD Grobogan, Sahabat-sahabat PMII Cabang Purwodadi, koresponden, para kiai dll.
8. Sahabat-sahabat PMII, baik di Rayon Syari'ah, Komisariat IAIN, Cabang Semarang.
9. Kang, Mbakyu, Teman dan Adek2 penulis di Justisia...*Matur Nuwun*
10. Mas, Mba', Konco dan adi2 ku di AMANAT, terima kasih banyak

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan khazanah perpolitikan di Indonesia yang semakin "islami". Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 14 Agustus 2008

Penulis

Pujiyanto

NIM. 2101269

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pujiyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 18 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Sedadi, Rt 01/III No 12 Kecamatan Penawangan,
Kabupaten Grobogan (58161)

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri II Sedadi, lulus Tahun 1993/1994
2. MTs ASIS Kluwan, 1993/1994 - 1994/1995
3. MTs Tawang Rejosari Semarang, lulus tahun 1995/1996
4. SMEA Sunan Kalijogo Semarang, 1996/1997
5. MAN Purwodadi, lulus tahun 1999/2000
6. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2001- 2008)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Agustus 2008

PUJIYANTO
NIM 2101269

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof Dr Hamka Km 02 Ngaliyan-Semarang Telp/Fax (024)601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Pujiyanto
Nomor Induk : 2101269
Fakultas/jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah
Judul : **DIVERSIFIKASI PILIHAN POLITIK KIAI DALAM
PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2006**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

28 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata satu (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang, Semarang, 28 Juli 2008
Sekretaris Sidang,

Drs. H. Johan Masruhan M.M.
NIP. 150 207 766

Penguji I

Drs Abu Hapsin MA, Ph.D
NIP. 150 238 492

Penguji II

Drs. Maksun M.Ag.
NIP. 150 263 040

H. khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 150 276 114

Pembimbing

Drs Abu Hapsin MA, Ph.D
NIP. 150 238 492

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan Skripsi	14
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penulisan skripsi	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II : KIAI DAN PILKADA DI GROBOGAN TAHUN 2006	

A. Signifikansi Kiai dalam Kehidupan Masyarakat	
di Grobogan	27
1. Pengertian Kiai	27
2. Kehidupan Sosial Keagamaan	32
3. Kehidupan Sosial Politik	35
4. Kehidupan Sosial Kebudayaan	38
B. Klasifikasi Kiai Berdasarkan Peran dan Lingkup yang	
Dimainkan dalam Pilkada 2006 di Grobogan	39
1. Kiai Pendukung	40
2. Kiai Simpatisan	45
3. Kiai Golput	47
C. Diversifikasi Kiai dalam Pilkada di Grobogan Tahun	
2006	50
1. Pendukung Pasangan Agsu-Bowo	51
2. Pembela Pasangan Bambang-Icek	53
3. Golput	54
D. Hukum Mencari/Menentukan Pemimpin Menurut Kiai di	
Grobogan.....	57

BAB III : PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN	
GROBOGAN TAHUN 2006	61

A. Profil Kabupaten Grobogan	61
1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Grobogan	61
2. Sejarah, Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya Dan Keagamaan Masyarakat Grobogan	66
B. Regulasi Pilkada Pasca Reformasi	81
C. Peta Pilkada di Grobogan Tahun 2006	86

BAB IV	: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DIVERSIFIKASI ILIHAN POLITIK KIAI DALAM PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2006	93
A. Latar Belakang dan Motivasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada 2006 di Grobogan... ..		93
1. Bergesernya Peta Politik		94
2. Stagnasi Peta Politik		99
3. Pilpres Memecah Partai Kiai		100
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Diversifikasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada di Grobogan Tahun 2006 ...		105
C. Kemenangan Bambang-Icek dan Peran Kiai Terhadapnya		110

BAB V	: PENUTUP	126
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran-Saran	128
	D. Penutup	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134

ABSTRAK

Secara mengejutkan, Pasangan Bambang-Icek, mengalahkan Pasangan Agus-Bowo dan Pasangan Budi-Moko dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Grobogan Tahun 2006.

Didukung 68,89 % kekuatan dewan (31 dari 45 anggota legislatif) dan 61,34 % pemilih legislatif pada Pemilu 2004, ditambah posisinya sebagai calon incumbent, Agus gagal merealisasikan ambisinya memimpin Grobogan kali kedua berturut-turut. Fasilitas melimpah, didukung dana, kesempatan lebih besar dan lingkaran kekuasaan hingga RT, hanya menarik simpati 261.544 pemilih dari total 664.599 suara masuk (39,35 %).

Pun pula Pasangan Budi-Moko yang mengusung issue perubahan dan reformasi disegala lini, gagal menjadi alternatif pilihan masyarakat. "Koalisi Grobogan" yang dibangun hanya diiyakan 105.278 rakyat (15,84%). Angin segar perubahan yang dibawa Budi dari Jakarta dan disokong (mantan) pejabat jujur dan keras hati Moko tidak mampu meyakinkan mayoritas masyarakat.

Tetapi Bambang, berdampingan dengan tokoh belum dikenal; Icek, plus kendaraan politik yang kurang disukai; Partai Golkar mampu memenangkan "Melodrama Rumah Kaca" Pilkada. Pasangan nomor urut 2 ini mendapat perhatian 297.777 (44,81%) rakyat. Kuncinya di perilaku calon dan kiai. Budi pekerti yang santun dan dukungan kuat mayoritas kiai, membuat Bambang-Icek (terutama Bambang) mampu menarik 44,81 % hati masyarakat yang mayoritas berideologi Abangan-Nasionalis ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Ir Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Hindia Belanda pada 17 Agustus 1945, setelah ada desakan dari kaum muda dengan peristiwa Rengasdengklok sebelumnya, sejak itulah, feodalisme yang mengakar dalam budaya masyarakat nusantara, terkikis secara pelan. Demokrasi menjadi pilihan dalam menjalankan roda pemerintahan selanjutnya.

Indonesia, nama ini dipilih menggantikan Hindia Belanda pasca kemerdekaan. Namun, permasalahan tidak selesai begitu saja. Sistem Demokrasi terlalu sulit untuk diterapkan di republik muda yang selama 350-tahun diperbudak dilecehkan dan diperas. Butuh waktu, pengorbanan dan proses yang cukup lama. Ini dibuktikan dengan berbagai sistem pemerintahan yang dijalankan Putra Sang Fajar, selalu berganti. Diantaranya adalah Sistem presidensial, Parlementer, Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Demokrasi Terpimpin.

Berbagai sistem pemerintahan yang dicoba, belum mampu mengatasi persoalan kebangsaan dan problem kerakyatan yang ada, karena tidak dibarengi Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemahaman rakyat tentang tren politik baru yang seimbang. Negara yang baru sejenak menikmati kemerdekaan inipun dilanda berbagai permasalahan. Hingga Soekarno "terpaksa" memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin. Ia pun dinobatkan sebagai presiden seumur hidup dan rakyat hanya menikmati "Pesta Demokrasi"¹ sekali, yakni pada 1955.

¹ Kalimat ini kali pertama dikemukakan Sabam Sirait; Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (saat itu) pada 29 April 1977 di Lapangan Parkir Timur, Senayan, Jakarta. Sabam mengatakan bahwa PEMILU hakikatnya merupakan "Pesta Demokrasi". Sehingga tidak perlu ada intimidasi dari pihak mana pun. Ucapannya "pesta demokrasi" itu kemudian menjadi "kosa kata" baru, serta lestari hingga kini. Pemilu 1977 adalah Pemilu

Pada giliran selanjutnya, pemerintahan Soekarno pun dianggap tidak lagi kondusif untuk memimpin Negara. Lahirlah Orde Baru, dengan Soeharto sebagai pemimpin. *The Smiling General* mampu membawa Indonesia ke masa keemasan. Konsep swasembada pangan dan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dibangunnya, mampu membawa negeri kepulauan ini sebagai salah satu kekuatan regional di Asia. Stabilitas terjaga dan pembangunan berjalan lancar. Era tinggal landas² pun dicapai "Jamrud Khatulistiwa" ini.

Tetapi lamanya kepemimpinan Rezim Orde Baru; 32 tahun, menjadi problem tersendiri. Status quo, bahkan kultus dari para bawahan terhadap pemimpinnya, terjadi. Selain itu, terjadi korupsi besar-besaran pada masa ini. Hingga akhirnya, rezim Orde Baru yang otoriter-diktator-militeristik pun di lengserkan oleh kekuatan mahasiswa-rakyat yang melahirkan Orde (era) Reformasi pada Mei 1998. Soeharto, 'pengagum' Machiavelli dan 'Penganut Jawa' yang taat inipun menyatakan mengundurkan diri, *lengser keprabon*.

Reformasi lahir, meski masih tanpa kendali dan arah yang jelas. Prof BJ. Habibie maju menggantikan "sang guru"; Soeharto. Aktivis "Intlektual" ini pun mendapatkan desakan dari berbagai pihak terutama mahasiswa, menjalankan agenda reformasi di segala lini. Salah satunya adalah reformasi birokrasi dan politik.

Reformasi, selain berdampak kepada kembalinya era keterbukaan yang lama direnggut Orde Baru, juga melahirkan euforia politik yang menggurita. Ratusan partai politik (Parpol) bermunculan bak cendawan di musim hujan. Hasilnya, setelah verifikasi, 48 parpol bersaing di Pemilu 1999. Golkar yang sejak 3 Juli 1971 menguasai parlemen,

ke-2 pada masa Orde Baru. Di sana, partai politik yang dikebiri pada Pemilu pertama (1971) semakin tidak mendapat tempat. Untuk menyindir pemerintah, muncul beberapa istilah keren dari aktivis pergerakan yang cukup terkenal dan menusuk; semisal "politik bulldoser", "wasit yang ikut menendang bola", "golput" dan sebagainya. Lebih jelas lihat; www.suaramerdeka.com/harian/0403/14/nas6.htm, diakses pada hari Rabu, 16 Januari 2007

² Sebutan untuk negara yang bergerak berubah dari negara berkembang menjadi negara maju.

untuk kali pertama harus mengakui keberhasilan PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.³ Pada Pemilu 1999 itu pula, untuk kali pertama, sejak 1955, anggota dewan dipilih secara demokratis, tak terkecuali Presiden dan Wakil Presiden.

Dewan yang pada masa Orde Baru bekerja sebatas “tukang stempel”, setelah reformasi, mengalami “kegilaan politik”! Secara *de facto*, Kekuasaannya melebihi eksekutif. Alasannya sederhana, karena merekalah yang memilih dan mengangkat eksekutif.

Terlepas dari itu semua, perjalanan demokrasi berjalan semakin baik. Bisa dilihat, pada 2004, rakyat sudah bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Rakyat tidak lagi sebagai penonton, tetapi ikut berperan dalam memilih pemimpin bangsa ini. Kurun waktu 1998-2004, adalah momentum historis yang sangat berharga bagi terselenggaranya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.⁴

Sejalan dengan perubahan di atas, UUD 1945 pun mengalami beberapa kali perubahan. Tidak kurang, empat kali UUD mengalami amandemen. UUD hasil amandemen, dengan berbagai hal yang melingkupinya, menegaskan kembali penggunaan sistem presidensial dan struktur pemerintahan nasional dan daerah. Sistem pemerintahan pun mengalami pergeseran bentuk, dari sentralistik menjadi desentralisasi yang berbasis otonomi daerah.⁵ Selain itu, sistem pemilihan Presiden dan Kepala Daerah pun mengalami perubahan. Jika masa Orde Baru Presiden dipilih oleh MPR, maka pada 2004, rakyat lah yang memilihnya. Pun, sejak disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

³ lebih jelas lihat; http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-Pemilu99/partai-peserta-Pemilu1999.htm, diakses pada Kamis, 4 Januari 2008

⁴ M KHolidul Adib, *Semangat Membangun Demokrasi*, Demak: Gelora, 2007, hlm. 2

⁵ KHairo Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 1

Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999,⁶ maka Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, kini dipilih langsung oleh rakyat.⁷

Perjalanan ini mampu menunjukkan dan meyakinkan kita bahwa di Indonesia tengah berlangsung proses penegakan demokrasi otentik. Setidaknya secara prosedural, yang selanjutnya secara substansial; yakni kedaulatan Negara di tangan rakyat, bisa dijalankan di negara plural ini dalam bentuk supremasi hukum. Karena tujuan dan inti demokrasi adalah ditaatinya hukum dan undang-undang.⁸ Agar demokrasi dapat dipahami dan dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, agar kita bisa hidup berbangsa dan bernegara lebih baik.

Sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Wilayah (provinsi) dan Daerah (kabupaten/kota) juga menggelar Pesta Demokrasi dengan rakyat sebagai hakim. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diselenggarakan secara langsung dan mempersilahkan rakyat⁹ untuk memilih dan menentukan pemimpinnya. Karena saat ini, Bangsa Indonesia benar-benar membutuhkan lahirnya para pemimpin yang jujur,¹⁰ sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebelum didengungkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang calon independen, syarat calon kepala daerah dan wakilnya, harus didukung atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan. Partai politik atau gabungan partai politik ini dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi syarat perolehan

⁶ Sentosa Sembiring (himp), *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Disertai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 11

⁷ M KHolidul Adib, *op.cit*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Rakyat yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI NO. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bab I, Pasal 1 Item 5; yakni penduduk yang mempunyai hak pilih adalah yang sehat jasmani dan berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah dan terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. Lebih jelas, lihat; *Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah RI NO. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 3

¹⁰ KH Hasyim Muzadi, *Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004, hlm. 29

suara di legislatif minimal 15% dari jumlah pemilih legislatif di daerah yang bersangkutan.¹¹ Alasan minimal 15% adalah agar calon dianggap legitimed, sekaligus sebagai wakil (jago) dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung atau mencalonkannya dalam arena perebutan pemimpin eksekutif suatu daerah administratif. Dan, pada 1 April 2005, untuk kali pertama, Pemilihan Kepala Daerah (Walikota) secara langsung oleh rakyat, terjadi di Indonesia, tepatnya di Kota Jayapura Provinsi Papua.¹² Namun, pada Agustus 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. dalam peraturan ini, Pilkada masuk dalam rezim Pemilu, sehingga Pilkada secara resmi berubah nama menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan, daerah yang kali pertama menyelenggarakan Pemilu Pilkada berdasarkan undang-undang baru ini adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tepatnya pada 8 Agustus 2007.¹³

Kembali ke teknis Pilkada. Dalam proses pemenangan calon kepala daerah, Tim Sukses¹⁴ kali sering salah perhitungan. Kadang, dan ini sering kali, para tim sukses mengandalkan data jumlah pemilihan legislatif untuk dijadikan sebagai pijakan dan acuan dalam menata dan melakukan kampanye perebutan massa mengambang.¹⁵ Meski data legislatif tidak bisa dijadikan patokan dalam memperoleh suara di eksekutif, tetapi mayoritas (untuk tidak mengatakan semua) Tim Sukses, masih dan terus selalu memakai suara legislatif sebagai modal utama suara yang pasti akan diperoleh oleh calon yang diusung partai atau gabungan partai bersangkutan.

¹¹ Peraturan perundang-undangan.. *op.cit*, hlm. 18

¹² Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada_2005, diakses pada hari Kamis, 3 Januari 2008

¹³ Lebih jelas, lihat;

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Kepala_Daerah_dan_Wakil_Kepala_Daerah, diakses pada hari Kamis, 3 Januari 2008

¹⁴ Adalah sebutan sebutan secara umum bagi orang atau organisasi yang secara sah mendukung salah satu calon yang tujuan utamanya adalah menjadi garda depan dalam pemenangan calon yang diusung atau dibelanya.

¹⁵ Sebutan untuk pemilih yang belum mempunyai pilihan jelas

Di Kabupaten Grobogan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung diselenggarakan pada 29 Januari 2006. Dalam Pilkada langsung kali pertama di daerah terluas kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap ini, calon memperebutkan 980.262 pemilih.¹⁶ Dan, tercatat ada tiga calon yang meramaikan Pesta Demokrasi ini. Tiga Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah Pasangan H Agus Supriyanto SE - Ir H Muhammad Nurwibowo (Agus-Bowo), Pasangan H Bambang Pudjiono SH - H Icek Baskoro SH (Bambang-Icek) dan terakhir Pasangan Bambang Budisatyo SH MM - H Mokhammad Suratmoko (Budi-Moko). Pasangan Agus-Bowo diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN)¹⁷ dan Partai Kebangkitan Bangsa "(PKB)".¹⁸ Agus sendiri adalah cabub incumbent.

Sedang Pasangan Bambang - Icek dicalonkan Partai Golongan Karya. Bambang adalah Wakil Bupati periode 2001-2006 (wakil Agus Supriyanto). Untuk Pasangan Budi-Moko, mereka didukung oleh tujuh partai, yakni Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bulan Bintang

¹⁶ Data dari KPUD Grobogan pada 27 Desember 2005. Angka 980.262 adalah suara rakyat yang berhak memilih, tapi pada kenyataannya, hanya 686.451 (70,03 %) pemilih saja yang menggunakan hak pilihnya. Sedang yang 293.811 (29,97 %) suara tidak memilih. Data ini juga dari KPUD Grobogan pasca Pilkada, tepatnya pada 24 Februari 2006.

¹⁷ PAN, ditengah perjalanan, karena ada konflik internal, secara institusi, ketua DPC PAN Udin Sugito menyatakan bahwa PAN urung mendukung Pasangan Agus-Bowo, namun oleh KPUD Grobogan, tetap dimasukkan sebagai partai yang mendukung Pasangan nomor satu ini. Ini juga dibuktikan dengan hadirnya Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir sebagai pembicara dalam kampanye terbuka Pasangan Agus-Bowo. Lebih jelas lihat, Afrosin Arif dan Respati, "*Mengawal Demokrasi, Dinamika Pilkada Grobogan*", Solo: ISKRA Publisher, 2006, hlm. 90

¹⁸ PKB saat itu dibekukan karena konflik internal (imbis dari konflik Gus Dur-Muhaimin VS ALwi Sihab-Syaifullaf Yusuf). Namun secara *de facto*, hampir seluruh pengurus dan komponen PKB mendukung Ir H Muhammad Nurwibowo, karena politisi jebolan UII Yogyakarta ini secara *de facto* pula yang menguasai PKB. Ini bisa dibuktikan dengan hadirnya Yenny Wahid dalam kampanye kemenangan Pasangan Agus-Bowo di Desa Depok Kecamatan Toroh. Selain itu, pada Konfercablub DPC PKB, pria asli Sugihmanik, Tanggung Harjo ini terpilih menjadi Ketua Tanfid PKB Grobogan Periode 2006-2011.

(PBB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI M).¹⁹ Ketujuh partai ini membentuk ”*Koalisi Pembaharuan Grobogan*”.²⁰

Dalam hitung-hitungan politis, suara, ekonomi, pengaruh, wilayah gerak dan lain sebagainya, Pasangan Agus-Bowo melebihi dua calon yang lain. Di wilayah legislatif, dari jumlah keseluruhan Anggota Dewan di Kabupaten Grobogan yakni 45 kursi, partai yang mengusung Agus-Bowo mempunyai 31 kursi (68,89% dari kursi) atau sekitar 61,34 % pemilih legislatif,²¹ masing-masing PDI-P 17 kursi (37,78 % dari kursi atau 250.639 pendukung; 36,42 % dari suara pemilih), PPP 5 kursi (5,82 % / 40.065 suara pemilih legislatif), PAN 2 kursi (21.431 suara) dan PKB 7 kursi (103.710 atau 15,52 %).²²

Partai Golongan Karya yang mencalonkan Pasangan Bambang-Icek ”hanya” mempunyai 8 kursi dengan suara sebanyak 108.986 pemilih (15,84 %). Dalam perjalanannya, Pasangan Bambang-Icek mendapatkan dukungan dari 11 partai yang tidak masuk dalam ”*Koalisi Pembaharuan Grobogan*”. Partai-partai tersebut adalah Partai Merdeka, Partai Pelopor, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PNU), Partai Patriot Pancasila, Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI). Namun, 11 partai ini adalah partai kecil dan tidak mempunyai kursi di dewan. 11 partai ini hanya mempunyai 53.387 suara legislatif. Jadi, Pasangan Bambang-Icek didukung oleh 162.373 pemilih legislatif

Pasangan Budi-Moko dengan *Koalisi Pembaharuan Grobogan*-nya, mendapat dukungan awal yang juga minim, tepatnya 109.960 pemilih (19,41 %). Suara itu masing-

¹⁹ Disarikan dari “*Data dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2006*”, Purwodadi: KPU Kabupaten Grobogan, hlm. 12-13

²⁰ Afrosin Arif dan Respati, *loc.cit*, hlm. 74

²¹ Menurut data dari KPUD Grobogan, jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Grobogan adalah 912.213 suara/pemilih. Lebih jelas, lihat *Data dan Hasil...*, *op.cit*, hlm. 25

²² Afrosin Arif dan Respati, *op.cit*, hlm. 76

masing dari Partai Demokrat 4 kursi (45.060 pemilih atau setara dengan 6,55 %), PNBK 2 kursi (32.185 suara atau 4,68 %), PBB (8.272 suara atau 1,20 %), PPDI (5.981 suara atau 0,87%), PKPB (6.876 suara atau 0,99 %), PDS (1.464 suara atau 0,21 %), PNI Marhaenisme (4.166 suara atau 0,61 %). Dalam perjalanannya, *Koalisi Pembaharuan Grobogan* mendapat dukungan dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Tetapi, PBSD hanya partai dengan pendukung sedikit (5.956 suara) dan tidak mempunyai kursi. Dihari kemudian pun, ditengah jalan, partai ini dieliminasi KPUD karena tidak memenuhi syarat, karena kepengurusannya tidak diakui oleh DPD PBSD Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, para personil PBSD tetap menggabungkan diri dalam koalisi ini.

Yang menarik, dengan limpahan sarana, kekuatan, kesempatan dan hampir menang disegala bidang dibanding ke-2 calon lain, Pasangan Agus-Bowo kalah! Kurang apa pasangan ini? Tidak tanggung-tanggung, Agus adalah representasi dari kekuatan "Kaum Abangan" di Grobogan yang mayoritas.²³ Ia juga masih menjabat sebagai Bupati Grobogan. Sedangkan pasangannya; Bowo bisa dikata adalah Putra Mahkota dari "Kaum Sarungan". Jebolan UII Yogyakarta ini adalah santri kesayangan *Mbah Baidhowi Samsyuri LC*; Pengasuh Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Brabo Tanggunharjo yang kharismatik. Dana pun tidak menjadi masalah, pasangan ini dipercaya mempunyai jaringan kuat dan termasuk pengusaha sukses.²⁴

Dalam menyukseskan pasangan Agus-Bowo, tim sukses pasangan ini menghadirkan banyak tokoh nasional untuk mengambil simpati rakyat. Ada Cahyo

²³ Sejarah membuktikan, Kabupaten Grobogan, sejak dahulu dikenal sebagai daerah kantung komunis dan nasionalis. Hal ini bisa dilihat pada Pemilu 1955, dimana Partai Komunis Indonesia (PKI) memenangi Pemilu dengan jumlah pemilih sebanyak 43,6 %, diikuti PNI yang meraih 21,5 % suara. Ketika Pemilu demokratis kembali digelar pasca reformasi, tepatnya pada tahun 1999, dimana kaum komunis-sosialis tidak mampu meraih 46,7 %, disusul PKB diurutan kedua dengan 19,2 % suara. Lebih jelas lihat; <http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/20/pem5.htm>. diakses pada hari Jum'at, 19 oktober 2007.

²⁴ Hal ini diungkapkan oleh Ibu Retno WA; anggota DPRD Grobogan dari PDI-P sekaligus istri Agus di sela-sela Ta'aruf dan pengantian Presiden Ikatan Mahasiswa Purwodadi-Grobogan IMPG yang dilaksanakan di Desa Ngroto Kecamatan Gubug pada 21 Oktober 2005. Dimana dalam acara tahunan IMPG tersebut, penulis dipercaya secara aklamasi untuk menggawangi IMPG (menjadi presiden kembali) untuk kali kedua.

Kumolo (Ketua Fraksi PDI-P DPR RI), Soetrisno Bachir (Ketua Umum DPP PAN), Yenni Wahid (Putri Gus Dur –Sekjend DPP PKB versi Gus Dur-Ali Maskur Musa), Dede Yusuf (Bintang film, anggota DPR RI dari PAN dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2008-2013), Marrisa Haque, Silvana Herman dan lain sebagainya. Selain itu, setiap pagi, saat musim kampanye, mereka adalah satu-satunya calon yang memakai jasa televisi nasional SCTV untuk kampanye. Tapi ternyata politik bukanlah hitungan matematika yang pasti. Data survei dari PDI-P pra Pilkada, menyatakan bahwa pasangan Agus-Bowo (minimal) telah mempunyai suara 31 % suara,²⁵ Bambang-Icek mendapat 23 %, sedang Budi-Moko kebagian 12 % suara. Jadi ada 34 % massa mengambang yang bisa diperebutkan ketiga pasangan di atas.

Banyak hal ternyata, yang mempengaruhi hasil Pilkada Grobogan yang tidak sesuai dengan prediksi banyak orang. Salah satu hal tersebut adalah peran tokoh masyarakat/agama (untuk tokoh negara/PNS netral). Para tokoh ini, kali sering dijadikan rujukan masyarakat atau komunitas sekitarnya untuk (seakan) mewakili pilihan masyarakat. Salah satu tokoh yang paling berperan dalam ”pemanasan global” di arena pemilihan kepala daerah ini adalah tokoh agama yang sering kita sebut Kiai. Yang lebih menggelitik, karena kiai dipercaya (dan memang terbukti) mempunyai magnet yang besar dalam menaklukkan rakyat, para calon maupun tim sukses berbondong-bondong melakukan *sowan* berjama’ah ke rumah para cerdik pandai dibidang agama (Islam) ini.

Berbagai masalah baru kemudian timbul. Pada umumnya para kiai tidak begitu paham politik, karenanya mengalami kebingungan sesaat. Disamping itu, para kiai adalah masyarakat yang *wellcome* terhadap siapapun yang datang. Juga, tidak bisa dipungkiri bahwa kiai mempunyai rasa tidak enak (*ewoh*) ketika dimintai restu dan dukungan. Dampaknya, kiai yang memang tidak terorganisir ini mengalami perbedaan pilihan calon.

²⁵ Hal ini dinyatakan oleh Tjahlo Kumolo; Ketua Fraksi PDI-P DPR RI, lebih jelas *ibid*, hlm. 137.

Tentunya ini menarik untuk ditelisik lebih dalam. Apalagi jika kiai tersebut sudah dianggap raja oleh santri atau jama'ahnya. Maka konsekuensi logisnya, pilihan sang kiai akan mempengaruhi kehidupan sosial di sekitar daerah pengaruhnya. Baik segi positif, maupun sisi negatif. Maka kerusuhan di Jepara antara massa PPP dan PKB beberapa waktu yang lalu, jika tidak disikapi secara arif, rawan terulang di daerah lain.

Seberapa besar peran "fatwa" kiai dalam mempengaruhi rakyat untuk memilih? Seberapa parah gesekan Antarkiai yang beda pilihan, bagaimana hubungan masyarakat sekitar yang imam atau kiainya beda pilihan? Pertanyaan inilah yang menggelitik penulis untuk melakukan penelitian di tempat yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Untuk menspesifikasikan daerah, dengan berbagai pertimbangan, maka penulis memilih Kabupaten Grobogan yang pada 29 Januari 2006 lalu melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, sebagai tempat penelitian. Di sini, penulis menyebar angket dengan menggunakan teknik *Multy Sgate Sampling*.²⁶ Penulis juga mendatangi beberapa *ndalem* (rumah) kiai, baik yang mempunyai tempat pendidikan (sekolah dan atau pondok pesantren), maupun tidak. Kemudian melakukan investigasi lebih dalam kepada santri maupun masyarakat sekitar.

Sebelum ke arah sana, dalam bidang politik, penulis mengklasifikasikan kiai kedalam tiga model.²⁷ *Pertama*, adalah kiai yang terjun secara langsung dengan menjadi pengurus partai. *Kedua*, kiai yang tidak menjadi pengurus partai, tetapi diketahui oleh khalayak telah mendukung atau menjatuhkan pilihan politiknya ke partai tertentu. Sedang model *Ketiga*, adalah kiai yang tidak terjebak dalam politik praktis. Penulis menyebutnya "Kiai Netral". Kiai Netral inilah yang dijadikan sebagai kajian utama penelitian.

²⁶ Adalah suatu teknik pengambilan sample secara sembarangan, bisa dilakukan secara random, non-random maupun kombinasi keduanya. Lebih jelas, lihat Eman Sulaeman, dalam makalah "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Metode Penelitian Sosial Yang Diterapkan Terhadap Hukum (Metode Penelitian Hukum Empiris)*", dalam *Workshop Metodologi Penelitian Hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Syariaah IAIN Walisongo Semarang* Tanggal 3-5 Agustus 2007 di Ponpes Nurul Islam Wonolopo Mijen Semarang.

²⁷ Hal ini penulis lakukan karena penulis tidak menemukan klasifikasi kiai dalam teori politik.

Alasannya, kiai ini masih bebas nilai. Masih menggunakan nurani dan dipercaya oleh masyarakat awam untuk dijadikan pertimbangan dalam berbagai hal, khususnya dalam dunia yang akan dibahas, yakni politik, terkait dengan proses memilih pemimpin yang sesuai dengan mereka yang tidak bertentangan dengan Ajaran Islam yang mereka anut.²⁸

Karenanya, untuk membahas permasalahan di atas yang penulis kira cukup pelik dan menarik untuk dikaji lebih dalam, dengan berbagai pertimbangan, penulis tertarik dan bermaksud untuk membahasnya dalam sebuah kajian skripsi yang berjudul "Diversifikasi Pilihan Politik Kiai Dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan Tahun 2006"

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka perlu ada rumusan masalah untuk menjadikan kajian ini lebih fokus. Adapun masalah yang akan dipecahkan dalam karya ini adalah:

1. Bagaimana signifikansi, posisi dan diversifikasi pilihan politik kiai dalam Pilkada Kabupaten Grobogan terjadi?
2. Bagaimana gambaran Pilkada di Kabupaten Grobogan pada tahun 2006
3. Apa faktor penyebab munculnya Diversifikasi pilihan politik Kiai di Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk menggambarkan signifikansi, posisi dan diversifikasi pilihan politik Kiai dalam Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2006
2. Untuk melihat secara jelas gambaran Pilkada di Grobogan tahun 2006

²⁸ Meski tidak menutup kemungkinan, karena kebutuhan, penulis juga harus "meneliti" semua model kiai guna mendapatkan data yang valid dan mendapatkan kebenaran dari hipotesa tentang peran kiai yang besar di Pilkada di Grobogan ini kali.

3. Untuk menggambarkan faktor penyebab munculnya diversifikasi pilihan politik Kiai di Kabupaten Grobogan

D. Telaah Pustaka

Format otonomi daerah memberikan peluang bagi munculnya pemerintahan di daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Atas peristiwa ini, maka kajian terhadap perilaku politik dan dinamikanya di aras lokal, menjadi diskursus baru yang mewarnai kajian-kajian politik.

Karya-karya yang berusaha membahas fenomena ini, sekaligus penulis jadikan "rujukan" antara lain "*Semangat Membangun Demokrasi*" karya M. Kholidul Adib. Buku ini membahas tentang Jejak Politik Kiai Dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Demak Tahun 2006. Di dalamnya, Adib membahas tentang pilihan Kiai dalam Pilkada sebagai sebuah ijtihad politik.

Adib juga memaparkan tentang pilihan Kiai dalam Pilkada. Hanya saja dalam buku tersebut, tidak ada pembicaraan tentang analisis terhadap pilihan kiai tersebut. Dalam buku tersebut juga tidak ada bahasan tentang motivasi dibalik beragamnya alasan Kiai berafiliasi kepada salah satu Pasangan calon.

Karya lain yang mencoba mengkaji dan menyuguhkan proses pergantian elit politik di daerah secara runtut, apik dan obyektif adalah "*Mengawal Demokrasi*" karya Afrosin Arif dan Respati. Buku bersampul Kantor (Pendopo) Kabupaten Grobogan ini memaparkan mengenai Dinamika Pilkada di Kabupaten Grobogan. Di dalamnya, Afrosin dan Respati mencoba memaparkan sedetail mungkin data dan fakta hasil dari Pilkada Langsung Grobogan 2006.

Karena bersifat sebatas kumpulan data, maka buku itu tidak dibarengi dengan sebuah analisis yang memadai terhadap suatu fenomena politik. Karenanya, penulis

melihat bahwa kontribusi dari buku ini hanyalah sebatas pemberi informasi serta data tentang perjalanan dan dinamika politik Kabupaten Grobogan pada saat Pilkada langsung tahun 2006.

Selanjutnya, "*Pilkada Langsung, Tradisi Baru Demokrasi Lokal*", karya Ari Pradhanawati dkk yang merupakan kumpulan artikel dari 21 penulis (20 penulis adalah anggota KPU, baik pusat, KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah). Tulisan berisi kumpulan 30 artikel ini, layak penulis jadikan sebagai telaah pustaka karena penulis anggap mempunyai kekuatan dari segi kompetensi, walau hal itu juga menjadi kelemahan.

Dalam karyanya, Ari dkk mencoba memaparkan secara langsung maupun tidak, dua pendapat yang berbeda secara prinsip. Yakni pendapat bahwa Pilkada adalah sebagai rezim Pemilu, sehingga Pilkada menjadi bagian dari Pemilu. Karena itulah keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi mutlak sebagai penyelenggara yang independen. Namun dari segi formal, Pilkada menjadi bagian dari rezim pemerintah daerah seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan, karena semua penulisnya buku di atas adalah anggota KPU, maka buku ini condong pada rezim pertama.

Meski demikian, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini cocok dan sangat dibutuhkan oleh kita yang hendak intens dengan pelaksanaan Pilkada atau sekedar memperhatikan Pilkada, namun ingin mengerti secara mendetail. Buku ini juga penulis nilai tepat waktu. Selain itu, buku bertebal 287 halaman ini memberikan catatan menyangkut berbagai persoalan teknis dalam berbagai Pilkada yang telah terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Meski, di sana sini masih terlihat ada masalah seperti sistematika penulisan, materi bahasan per bab yang kurang tepat dalam membentuk bangunan wacana tentang Pilkada dengan segudang permasalahannya, dan

lain sebagainya, termasuk tidak adanya masukan dari petugas Pemilu tingkat bawah yang melihat Pilkada secara langsung dan sangat dekat.

Buku lainnya yang penulis gunakan sebagai telaah pustaka adalah “*Menuju Puncak Kekuasaan (Catatan Ringan dari Pilkada Kalsel 2005)*” karya Mukhtar Sarman. Dalam buku setebal 111 Halaman ini, Mukhtar mencoba menerangkan jalan Pilkada di Kalimantan Selatan pada 30 Juni 2005, baik pra, proses maupun pasca Pilkada. Dari berbagai sisi, baik dinamika di masyarakat, seperti sosial politik yang bisa dibilang unik dengan fenomenanya yang kali sering mengharukan (karena sejumlah putera terbaik Kalsel seakan bertarung habis-habisan menuju puncak kekuasaan yang membawa mereka menjadi orang nomor satu di Kalsel), maupun bagaimana harusnya calon pemimpin yang jadi nanti bisa seideal mungkin dengan mengedepankan kepentingan publik, dari pada kepentingan pribadi.

Karena Pilkada adalah barang baru, Mukhtar memaparkan bagaimana model ini, membuat banyak pihak kagok dan tidak sedikit yang salah kaprah. Selain itu, dalam ajang perebutan kekuasaan pemimpin eksekutif ini, pamor maupun popularitas calon untuk menarik simpatik masyarakatnya menjadi sangat menentukan. Selain itu, terjadi pula benturan-benturan baik yang mengarah ekonomi, sosial, politik hingga ke fisik. Namun penulis menilai, buku ini hanya memaparkan proses Pilkada di Kalimantan Selatan yang disertai dengan kritik tajam yang membuat opini penulis mampu diminimalisir. Terlebih disajikan dalam bahasa gado-gado. Jadi, di buku ini, hanya ada rentetan sejarah Pilkada Kalimantan Selatan perspektif Mukhtar, namun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Yang terakhir adalah buku “*Konflik Antarelit Politik Lokal, Dalam Pemilihan Kepala Daerah*” karya Moch Nurhasim dkk. yang merupakan hasil penelitian lapangan di Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah pada 2003. Dalam buku ini, Hasim dkk mencoba memaparkan dan menganalisis praktek sistem pemilihan kepala daerah

secara tidak langsung melalui DPRD di tiga wilayah tersebut di atas. Buku ini penulis jadikan rujukan semata-mata untuk mengetahui dengan jelas bagaimana jika Pilkada hanya dijadikan sebagai “pesta demokrasi” para wakil rakyat. Apakah mereka benar-benar mewakili rakyat, partai atautkah diri sendiri?

Dan benar, di buku ini dengan detail menjelaskan bahwa ternyata pemilihan kepala daerah oleh wakil rakyat cenderung kolusif, manipulatif dan malah mengesampingkan aspirasi arus bawah. Karenanya, penulis dapat mengambil sedikit kesimpulan, bahwa untuk saat ini, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, Pilkada langsung dengan rakyat sebagai juri masih yang terbaik di republik yang masih mencari jati diri ini.

Kembali ke masalah. Dari apa yang telah dibahas dalam beberapa karya di atas, penulis belum melihat ada satu buku pun yang secara gamblang memaparkan tentang pluralitas pilihan politik kiai. Termasuk di dalamnya motivasi yang melatarbelakangi perilaku politik kiai yang beragam tersebut. Karenanya penulis merasa perlu untuk mengkaji tema ini dengan mengambil *sample* dinamika politik di Kabupaten Grobogan pada tahun 2006 saat proses pemilihan Bupati dan wakilnya.

Hal ini diperkuat dengan belum ditemukannya skripsi yang mencoba membahas permasalahan di atas. Di tingkatan Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Siyasah Jinayah, selain penulis, baru dua mahasiswa yang menyinggung permasalahan Pilkada. Mereka adalah; *Pertama*, Saudara Zainal Abidin (Mahasiswa Angkatan 1999 dengan NIM 2199021) dengan judul "*Analisis Relasi Politik Kiai NU Terhadap Pilihan Politik Santri Dalam Pilkada Kabupaten Demak 2006*". Mahasiswa asal Demak ini mencoba menganalisa hubungan politik Kiai Tradisonal (NU) dengan pilihan politik santrinya pada Pilkada di Demak Tahun 2006. Dalam skripsinya, Zainal

membandingkan dan memaparkan (dengan *sample*) antara pilihan Kiai suatu pondok pesantren dengan santri di pondok yang diasuhnya.

Sedang yang *kedua*, adalah "Skripsi" milik saudari Ulya Qonita yang berjudul "*Sikap Politik Kiai Dan Implikasinya Terhadap Pilihan Politik Santri Kaliwungu Dalam Pilkada Kendal Tahun 2005*".²⁹ Namun, skripsi yang ditulis mahasiswi angkatan 2002 dengan NIM 2102085 ini diajukan pada Januari 2008, sedangkan judul skripsi penulis, diajukan pada Nopember 2007. Jadi, judul penulis "*Diversifikasi Pilihan Politik Kiai Dalam Pilkada Langsung Di Kabupaten Grobogan Tahun 2006*" lebih dahulu diajukan di Biro Skripsi Jurusan Siyasa Jinayah ketimbang judul milik Ulya. Dan, jika dirunut, maka baru satu judul skripsi (sebelum penulis) yang mencoba membahas permasalahan Pilkada yakni "*Analisis Relasi Politik Kiai NU Terhadap Pilihan Politik Santri Dalam Pilkada Kabupaten Demak 2006*" yang ditulis oleh saudara Zainal Abidin.

E. Metode Penulisan Skripsi

Agar skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, sekaligus mengarah pada tujuan yang dimaksud di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*), dengan Kabupaten Grobogan sebagai daerah yang akan diteliti. Sedang metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Paradigma yang *digunakan* dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif.³⁰

Untuk itu, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan:

²⁹ Penulis mendapatkan informasi tersebut dari Biro Skripsi Jurusan Siyasa Jinayah pada hari Selasa, 22 April 2008

³⁰ Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174. Meski demikian, karena kebutuhan, paradigma kuantitatif juga penulis gunakan dalam makna esensi.

- a. Interview. Adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.³¹ Alat pengumpul data ini penulis gunakan untuk memperoleh keterangan atau penjelasan langsung dari masyarakat³², baik yang menggunakan hak pilih atau tidak dalam “Pesta Demokrasi” 2006 di Kabupaten Grobogan; tentang sejauh mana diversifikasi dan peran kiai dalam Pilkada tahun 2006 di Kabupaten Grobogan. Juga, untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai dampak jangka pendek maupun panjang berbagai macam hal teknis pra dan pasca Pilkada, kaitannya dengan para tokoh agama yang proaktif dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan baru kali pertama dilaksanakan di Kabupaten kaya bahan makanan pokok ini.
- b. Angket. Di sini penulis menyebarkan 300 angket untuk mengetahui dengan jelas penilaian masyarakat tentang peran kiai dalam Pilkada tahun 2006 di Kabupaten Grobogan. Dalam menyebarkan angket, penulis menggunakan teknik *Multy Stage Sampling*.³³
- c. Observasi. Bisa dimaknai sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.³⁴ Penulis melakukan pengamatan dengan seksama, bagaimana diversifikasi pilihan politik kiai dalam Pilkada di Kabupaten Grobogan terjadi, sekaligus melihat faktor penyebabnya selama lebih dari 6 bulan.
- d. Dokumentasi. Bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut dokumen. Di sini penulis berusaha mengumpulkan data-data tulisan dan gambar dari berbagai

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 1000.

³² Masyarakat yang penulis maksud adalah Masyarakat Grobogan secara umum. Bisa kiai, pegawai, kuli, petani, mahasiswa dan lain sebagainya yang memenuhi syarat secara positif untuk memberikan suara dalam pilkada ini kali.

³³ Adalah suatu teknik pengambilan sample secara sembarangan, bisa dilakukan secara random, non-random maupun kombinasi keduanya. Lebih jelas, lihat Eman Sulaeman, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Metode Penelitian Sosial Yang Diterapkan Terhadap Hukum (Metode Penelitian Hukum Empiris)*", makalah tidak diterbitkan.

³⁴ Hadari, *op.cit*, hlm. 111

sumber, baik dari media massa maupun instansi terkait yang tujuan utamanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana diversifikasi dan peran kiai dalam Pilkada 2006 di Kabupaten Grobogan.

- e. Selain itu, penulis juga menggunakan metode pengumpulan data (*library research*)³⁵ yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis lakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian di atas ini

2. Sumber Data

Sebagaimana disebutkan di atas, Karena penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data investigasi yang berbentuk wawancara atau interview. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer. Yakni data yang langsung diperoleh/berasal dari sumber asli/pertama (*primary resources*).³⁶ terkait dengan tema penelitian ini. Data yang dimaksud adalah fakta tentang perolehan suara dan dukungan kiai kepada para calon.
2. Data Sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung dari tangan pertama. Data sekunder di gunakan penulis sebagai sarana pendukung untuk memahami lebih jelas masalah yang diteliti agar masalah lebih bisa operasional. Data ini biasanya berupa kabar dari seorang kiai tentang kiai lain yang karena jarak dan kesibukannya, sulit penulis temui.

3. Metode Analisis Data

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997. hlm. 9.

³⁶ Maksun, dalam makalah "*Teknik Pengumpulan Data*", hlm. 4, (*Workshop Metodologi Penelitian Hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Syariaiah IAIN Walisongo Semarang Tanggal 3-5 Agustus 2007 di Ponpes Nurul Islam Wonolopo Mijen Semarang*). Makalah tidak diterbitkan.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja.³⁷ Jadi yang kali pertama dilakukan dalam analisa data ini adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data tersebut adalah untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori.³⁸

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, penulis memakai Metode Deskriptif Interpretatif. Meski demikian, Metode deskriptif-analitik juga penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap data yang terkait dengan fakta hasil Pilkada Langsung 2006 di Kabupaten Grobogan.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan Pendekatan Fenomenologi, yakni sebuah model pendekatan yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Metode ini menegaskan bahwa manusia hanya mengenal penampakan realitas kepada kesadaran (*fenomenon*) dan bukan wujud dari realitas itu sendiri (*nomenon*), tetapi lebih dimaksudkan kepada sesuatu pengertian yang sama sekali baru.³⁹ Fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan manusia dengan realitas. Realitas itu sendiri tampak bagi manusia. Selain fenomenologi, juga akan dikembangkan Metode Eksplanatoris, yakni sebuah metode yang berusaha untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan, tentang hal-hal menarik yang ada dalam penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

³⁷ Anas Saidi, *Makalah-Makalah Metodologi Penelitian*, (makalah tidak diterbitkan), hlm 43.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah*, Yogyakarta: Qirtas, 2004, hlm. 63.

Skripsi ini disusun dan terbagi dalam lima bab. Tujuannya agar skripsi ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Diversifikasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan tahun 2006 sekaligus pengaruhnya dan dampak negatif serta efek positif dari keterlibatan kiai dipolitik praktis tersebut. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri atas; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penulisan Skripsi dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : KIAI DAN PILKADA DI GROBOGAN

Di bab ini, penulis mencoba memaparkan Signifikansi Kiai dalam Kehidupan Masyarakat di Grobogan di item pertama. Sub ini terbagi atas Kehidupan Sosial Keagamaan, Kehidupan Sosial Politik dan Kehidupan Sosial Kebudayaan. Item selanjutnya adalah mencoba Mengklasifikasikan Kiai Berdasarkan Peran dan Lingkup yang Dimainkan dalam Pilkada 2006 Di Grobogan. Kemudian setelah itu melihat Diversifikasi Kiai dalam Pilkada di Grobogan Tahun 2006. Dan yang terakhir mencoba menapaki Hukum Mencari/Menetukan Pemimpin Menurut Kiai Grobogan.

Bab III : PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2006

Bab ini, terbagi atas tiga sub judul. Sub pertama mencoba membahas Profil Kabupaten Grobogan yang terdiri dari Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan dan Sejarah, Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan Masyarakat Grobogan. Item selanjutnya adalah Regulasi Pilkada Pasca Reformasi di Grobogan yang ikut aturan dari pusat. Lalu yang terakhir memboba membedah Peta Pilkada di Grobogan Tahun 2006

Bab IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DIVERSIFIKASI
PILIHAN POLITIK KIAI DALAM PILKADA LANGSUNG DI
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2006

Di bab "analisis" ini, penulis meletakkan Latar Belakang dan Motivasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada 2006 di Grobogan di bagian sub pertama, disusul kemudian Faktor-Faktor yang Menyebabkan Diversifikasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan Tahun 2006. Kemudian diakhiri dengan Kemenangan Bambang – Icek dan Peran Kiai Terhadapnya

Bab V : PENTUP

Seperti biasa, bab terakhir ini di isi oleh Kesimpulan, Saran dan terakhir Penutup itu sendiri.

BAB II

KIAI DAN PILKADA DI GROBOGAN TAHUN 2006

A. Signifikansi Kiai Dalam Kehidupan Masyarakat Di Grobogan

1. Pengertian Kiai

Kiai adalah gelar atau sebutan bagi alim ulama.¹ Gelar ini tercipta melalui proses teologis yang diberikan oleh masyarakat, baik individu maupun kolektif kepada seseorang berdasarkan keistimewaan pribadinya yang dalam perspektif agama ia telah memiliki sifat kenabian (*waratsatul anbiya'*) seperti kedalaman ilmu agama, *amanah, wira'i, zuhud, thawadhu* dan lain sebagainya.²

Istilah kiai bila dilacak dalam perspektif sejarah, bermula dari kemampuan benda-benda kuno yang dimiliki para penguasa di Tanah Jawa (raja, senopati atau para punggawa kerajaan). Benda yang berupa pusaka tersebut mengandung kekuatan gaib yang dipercaya masyarakat dapat menentramkan dan memulihkan kekuasaan di suatu daerah atau negara. Penggunaan benda itu dapat menambah kekuatan dan kesaktian pemakainya.³

Hal yang wajar jika sebutan kiai tidak hanya untuk sebutan manusia yang pandai agama, tetapi juga pada benda atau hewan yang dianggap mempunyai kelebihan (bertuah, keramat dan lain sebagainya).⁴ Kata kiai diyakini berasal dari Bahasa Jawa yang kemudian dinasionalkan pada masa Orde Baru. Di Jawa sendiri, istilah kiai sering dipakai dalam banyak hal. Semua hal ini digunakan untuk

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Hlm. 565. Kiai juga digunakan untuk sebutan bagi Guru Ilmu Gaib, Kepala Distrik, sebutan untuk mengawali nama sebuah benda yang dianggap bertuah, Sebutan Samaran untuk Harimau (jika orang melewati hutan) dan lain sebagainya.

² Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 20

³ Syamsul Ma'arif, *Pesantren VS Kapitalisme Sekolah*, Semarang: NEED'S Press, 2008, hlm.77

⁴ Seorang dukun yang dipercaya sakti sering disebut Kiai. Kerbau Bule Keraton Solo di beri gelar Kiai (Kiai Slamet) karena dianggap keramat, begitu juga benda atau pusaka semisal Tombak "Kiai Plered", Keris "Kiai Sangkelad", Bendera "Kiai Tunggul Wulung" dll

menunjukkan sesuatu atau seseorang yang memiliki kualitas di atas rata-rata.⁵ Secara etimologis kiai berasal dari kata "iki wae" yang bisa diartikan 'orang atau benda lain yang dipilih'; menunjukkan bahwa kiai adalah spesial karena pilihan Allah.⁶

Di ranah nasional, banyak dijumpai gelar sebutan yang diperuntukkan bagi ulama yang mempunyai arti mirip (kalau tidak bisa dikatakan sama) dengan kiai. Misalnya, Ajengan (Sunda), Buya (Sumatera Barat), Teungku (Aceh), Tofanrita (Sulawesi Selatan), Nun atau Bendera yang disingkat Ra (Madura), Tuan Guru (di Lombok dan sekitar Nusa Tenggara) dan lain sebagainya.⁷

Di Grobogan, selain kiai ada pula gelar wali atau sunan (susuhunan) yang biasanya diberikan kepada ulama yang sudah mencapai tingkat kesalehan tinggi dan memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa.⁸ Gelar lainnya ialah Panembahan yang diberikan kepada ulama yang selain menekankan aspek spiritual, juga menyangkut segi ketinggian, baik usia maupun *nasab* (keturunan). Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang ulama tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi.⁹ Ada pula kiai disebut juga Ki Ageng atau Ki Gede.¹⁰

Kiai sendiri selain bermakna Guru Agama Islam yang luas keilmuannya, juga mempunyai banyak arti. Semisal kiai berarti Pendidik, (misalnya Ki Hajar Dewantara. Kata Ki bisa diartikan Kiai, sebagaimana sebutan ki untuk dalang yang dalam Jawa sama dengan Kiai Dalang). Kiai juga bisa berarti Pak Dukun. Di Kalimantan, pada masa prakemerdekaan, Kiai berarti *District-Hoofd* (Wedana). Di Padang, pada masa prakemerdekaan, Kiai berarti "cino tuo" (Orang Tionghoa yang telah berumur).

⁵ *Op.cit.*, hlm. 76

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://abusalma.wordpress.com> Diakses pada hari Rabu, 30 Januari 2008.

⁸ Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa, Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1977, hlm 62.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

Gamelan Sekaten di Yogyakarta bernama Kiai Sekati dan Nyi Sekati, dalang yang ahli disebut Ki Dalang, atau Kiai dalang.

Menurut Zamakhsyari Dhofier,¹¹ kata kiai menurut asal usulnya dalam Bahasa Jawa, dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda. *Pertama*, Kiai dipakai sebagai gelar kehormatan bagi barang yang dianggap keramat.¹² *Kedua*, Kiai adalah gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. *Ketiga*, Kiai merupakan gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang Ahli Agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar Kiai, ia juga sering mendapat gelar Alim (orang yang cukup mendalam pengetahuan agamanya).¹³ Namun, kini banyak kiai (ulama') yang tidak mempunyai pondok pesantren. Meski begitu, mereka tetap mendapat gelar kiai. Gelar kiai biasanya dipakai untuk para ulama dari golongan muslim tradisional.¹⁴

Dari uraian di atas, definisi kiai yang dimaksud penulis adalah arti kiai dalam kategori nomor tiga. Yakni, baik kiai yang mempunyai pondok pesantren atau tidak. Gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berdasarkan keistimewaan individunya, tanpa ada paksaan atau intervensi dari manapun. Masyarakat secara "reflektif-evolutif" menetapkan gelar tersebut kepada seseorang yang berhak dan pantas menyandang gelar sosial keagamaan yang terhormat ini.¹⁵

Masyarakat Grobogan yang mayoritas tinggal di pedesaan, mempercayai peran kiai sangat besar dalam kehidupan mereka. Tidak sebatas tempat menumpahkan masalah atau pemberi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi, tetapi juga

¹¹ Mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang. Sekarang Rektor UNSIQ Wonosobo Jawa Tengah

¹² Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang mististik. Selain itu, mereka juga sangat menghormati benda-benda yang dipercaya bertuah, dianggap keramat dan warisan leluhur. Wawancara dengan Pak Harnoto; Guru Aliran Kejawen Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu; Desa Karang Geneng, Kecamatan Godong pada hari Kamis, 10 Januari 2008

¹³ ZamaKhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-4, 1985, hlm 3.

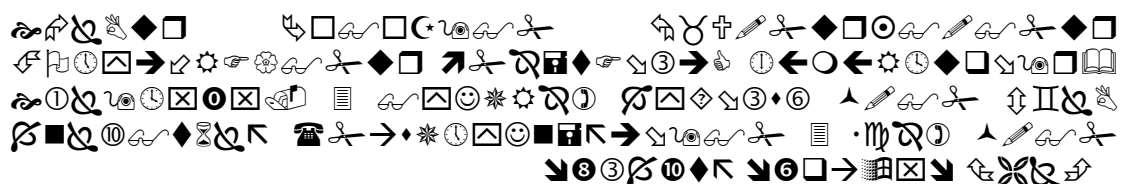
¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Disarikan dari wawancara dengan Pak Dhe Dhi; sesepuh Tarekat Shattariyah dari Desa Lajer, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada Kamis Malam, 3 Januari 2008.

sebagai landasan bekal dalam mengarungi hidup. Kiai sangat dihormati, diikuti, dan dibela.¹⁶ *Tausiah*-nya dilaksanakan, perilakunya ditiru, kata-katanya didengar. Di mata masyarakat, kiai (ulama) mempunyai keistimewaan yang jarang dimiliki masyarakat awam pada umumnya. Para kiai dianggap lebih dekat kepada Allah SWT, dikabulkan do'anya, sebagai sumber hukum tidak tetap, dan lain sebagainya. Intinya, kiai adalah panutan karena statusnya sebagai pewaris sah para nabi (ulama').

Kebanyakan masyarakat mengetahui banyak hal tentang kiai, selain keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat yang bisa *momong*, juga dari kiai-kiai lain yang sering melakukan dakwah saat ada pesta atau hajatan. Baik hajatan pribadi (pernikahan, sunatan dan syukuran yang lain), lembaga nonformal (Pondok Pesantren, Jama'ah *Tarekat*; *Akhirrussanah*, *Haul*, *Mujahadahan* dll) maupun lembaga formal (pemerintah desa -pengajian *selapanan*, syukuran panen dan lain sebagainya).

Wejangan atau *tausiah* para kiai mengenai penegasan penting dan mulianya kiai, (ulama') baik dimata makhluk maupun di sisi Allah SWT ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Faathir ayat 28;



Artinya: "Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-

¹⁶ Meski tidak jarang Kiai menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan diri sendiri. Seperti yang diutarakan KH Musyafak Zain, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Ngambak Rejo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan dengan penulis pada 27 Mei dan 2 Juni 2008.

Nya, hanyalah ulama.¹⁷ Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun"

Di satu sisi, kiai yang dihormati dan dijadikan panutan *de facto* masyarakat sangat hati-hati jika dimintai nasihat. Terutama masalah hukum, apalagi untuk kemaslahatan umat secara luas. Kiai memikul tanggungjawab besar sebagai *warasathul anbiya'* (pewaris para nabi). Yang ada dalam diri kiai bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan sebuah amanah ("tugas") yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karenanya, ketakutan sekaligus kecintaan kiai kepada Allah SWT sangat besar.¹⁸

2. Kehidupan Sosial Keagamaan.

Penduduk Kabupaten Grobogan berjumlah 1.360.908 (tahun 2004). Sebanyak 1.343.489 jiwa, atau 98,72 % dari jumlah tersebut beragama Islam.¹⁹ Sebelumnya (tahun 2001), Grobogan mempunyai penduduk sebanyak 1.337.130 jiwa. Dari jumlah ini, penduduk yang beragama Islam sebanyak 1.320.017 (98,72 %).²⁰ Kemudian Tahun 2002, 1.328.449 (98,71 %) dari 1.345.675 penduduk beragama Islam.²¹ Tahun 2003, jumlah penduduknya sebanyak 1.353.688 jiwa, 1.336.365 (98,72 %) darinya adalah muslim.²²

Dengan mayoritas penduduk muslim tersebut, pada tahun 2005 di Kabupaten Grobogan tercatat ada 201 pondok pesantren, baik *salafiyah* (tradisional) maupun modern, dengan 1.213 ustadz/pengajar²³ dan 15.255 santri.²⁴ Pada tahun berikutnya

¹⁷ Ulama yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang dalam Jawa disebut Kiai.

¹⁸ Disarikan dari *tausiah* dan wawancara dengan KH Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya Pekalongan tentang Musik, ulama' dan lain sebagainya (untuk Desantara Institute) pada hari Rabu, 18 Juni 2008.

¹⁹ Diolah dari Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2004*, Purwodadi: Bappeda Kabupaten Grobogan dan BPS Kabupaten Grobogan, 2005, hlm. 7-14.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Ustadz/pengajar yang dimaksud adalah pengasuh dan pengurus pondok yang mengajarkan atau menjadi guru di lingkungan pondok pesantren.

(2006), kuantitas pondok pesantren menurun menjadi 161. Namun ustadz/pengajar dan santri bertambah; menjadi 1.548 ustadz/pengajar dan 18.356 santri.²⁵ Pada tahun 2007, jumlahnya meningkat menjadi 225 pondok pesantren, dengan 3.226 ustadz/pengajar dan 24.701 santri.²⁶ Jika diambil rata-rata, maka pada tahun 2007 ada 8 pondok pesantren di setiap 10 desa di Grobogan.²⁷

Di Grobogan, kiai sangat dihormati, terlebih jika ia belum pernah melakukan suatu tindakan disengaja yang dianggap jelek atau kurang pantas dengan norma dan adat masyarakat secara umum. Mungkin seorang kiai tidak akan melakukan suatu perbuatan nyata yang berdosa seperti mencuri, mabuk, berzina, menipu dan lain sebagainya. Namun perbuatan yang tidak dilarang agama seperti beristri dua, terlalu keras melarang orang lain ketika berbuat salah, tindakan dan perkataan tidak sesuai dan lain sebagainya, bisa membuat kiai tidak dihormati.

Pendek kata, ada dua kategori masyarakat dalam melihat kiai. *Pertama*, masyarakat yang pernah menjadi santri atau jama'ah yang telah merasa cocok dengan seorang kiai. Apapun yang dilakukan kiai, baik perkataan maupun perbuatan, maka besar kemungkinannya akan diikuti. *Kedua*, masyarakat yang tidak (belum) mempunyai hubungan emosional dengan kiai. Masyarakat kategori ini biasanya mempunyai cara pandang sendiri dalam melihat kiai. Bila apa yang dilakukan kiai sesuai dengan keinginan, maka masyarakat akan mendukung. Sebaliknya, bisa jadi

²⁴ Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan, *Grobogan Dalam Angka*, Purwodadi: Depag Press, hlm. 110 (buku ini hanya dimiliki oleh Departemen Agama Kabupaten Grobogan, Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, Departemen Agama Pusat dan beberapa instansi terkait di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat -dicetak terbatas dan tidak diedarkan-). Menurut Humas Depag Grobogan (yang namanya tidak mau disebutkan), Kiai dan santri, terutama *tarekat* dan santri yang tidak mondok –santri kalong-, tidak tercatat dan jumlahnya lebih banyak dari santri pondokan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Penulis belum menemukan alasan jelas kenapa di Grobogan jumlah pesantren, kiai dan santri berubah begitu cepat. Mungkin memerlukan penelitian yang lebih lanjut.

kiai akan menjadi bahan gunjingan dan celaan apabila yang dilakukannya tidak sesuai keinginan mereka.²⁸

Meski dalam situasi sedang "tidak suka" terhadap seorang kiai, jika masyarakat butuh, tidak jarang akan datang minta pertolongan kiai yang digunjing tersebut.²⁹ Mayoritas "Masyarakat Muslim" di Grobogan memadukan "Ajaran Islam" dengan adat dan kepercayaan lokal (Islam Abangan)³⁰. Mereka menjalankan Syari'at Islam, tetapi juga melakukan ritual kepercayaan seperti memberi sesaji, seperti sedekah bumi dan lain sebagainya. Muslim Abangan ini meyakini Islam sebagai agama yang benar dan diridhoi Tuhan (Allah SWT), tetapi juga mempercayai kebenaran aliran kejawen sebagai bagian dari hidup mereka.

Di kurun waktu 2005–2008 (mungkin masih berlangsung hingga sekarang), di sebagian masyarakat Grobogan terutama yang terbiasa dengan "dunia hitam",³¹ muncul sindrom agak aneh. Banyak dari mereka ramai–ramai belajar sholat, berpuasa dan menyumbang pembangunan beberapa tempat ibadah. Anak–anak mereka pun disuruh belajar mengaji di mushola/masjid. Motivasi mereka ternyata ingin bertobat dan butuh perlindungan Tuhan (Allah SWT) kelak di hari akhir. Bahkan di antara mereka bernadzar, jika dikasih rejeki banyak (cukup) dari Tuhan, akan menunaikan ibadah Haji. Mungkin peran kiai besar di sini, tetapi yang pasti hal ini cukup membuat beberapa kiai dan warga/tetangga sekitar lega.³²

3. Kehidupan Sosial Politik.

²⁸ Penghormatan dan atau celaan terhadap Kiai ini terjadi mengalir sejalan dengan situasi, kondisi dan suatu kejadian, dimana langkah setiap tindakan yang diambil Kiai atas suatu masalah, akan dinilai oleh masyarakat sekitar.

²⁹ Seperti diminta untuk mengirim do'a kepada sanak saudara yang telah meninggal; tahlil, mengobati anak yang sakit panas, menangis terus karena sawanan dll.

³⁰ Beragama Islam dan menjalankan Ritual Islam seperti Shalat, Puasa dll, tetapi masih percaya dengan agama lokal yang merupakan asimilasi dari kepercayaan Animisme-Dinamisme dan Agama Budha-Hindu

³¹ Preman, pencuri, gali dan lain sebagainya.

³² Penulis mendapat data ini ketika mencoba menginvestigasi fenomena ini di tiga desa; Desa Sedadi Kecamatan Penawangan, Desa Dimoro Kecamatan Toroh dan Desa Candisari Kecamatan Purwodadi pada Oktober 2005 – Februari 2008 saat penulis secara tidak sengaja main ke beberapa teman.

Keberadaan kiai turut mempengaruhi kehidupan sosial politik masyarakat di daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia ini. Hal ini dapat dilihat pada Pemilu 1999; "Partai Kiai" yakni PKB menjadi *runner up* di bawah PDI-P dengan 19,2 % suara.³³ Partai kiai lain seperti PPP dan PAN juga mendapat perhatian masyarakat. Sehingga bersama PDI-P, PKB dan Golkar, PPP dan PAN menjadi *The Big Five* dalam kancah perpolitikan lokal di Grobogan.³⁴ Pada Pemilu 2004, partai kiai terbesar; PKB digeser Partai Golkar ke posisi ke tiga dengan perolehan suara 15,07 %.³⁵ Hal ini imbas dari konflik internal partai di pusat. Pada Pemilu kali ini, meski PAN bertambah suara dan kursi, tetapi partai "milik" komunitas Muhammadiyah ini terlempar dari *The Big Five*. Sedangkan PPP berada di posisi kelima setelah PDI-P, Golkar, PKB dan pendatang baru yang fenomenal; Partai Demokrat.³⁶

Partai "pilihan kiai" tidak mayoritas karena Pemilu legislatif tidak bicara tentang perpolitikan kiai, tetapi lebih pada potret pertarungan elit politik di Jakarta. Megawati yang pada masa Orde Baru disakiti, dihabisi dan *disio-sio* (diperlakukan semena-mena), pada tahun 1999 mendapat simpati dari masyarakat. Tidak hanya di Grobogan, tetapi juga di seluruh Indonesia, hingga PDI-P menjadi partai pemenang Pemilu.³⁷ Alasan lain, kiai, menurut sebagian besar masyarakat Grobogan lebih baik mengurus masyarakat, santri, dakwah, pendidikan agama dan segala hal yang berhubungan dengan sosial keagamaan. Juga, di alam pemikiran sebagian Masyarakat Grobogan, kiai tidak *maqom*-nya jika harus proaktif dalam politik praktis. Apalagi

³³ Diolah secara manual dari data KPUD Grobogan tahun 1999. Data berbentuk file

³⁴ PKB bersama PPP dan PAN penulis masukkan dalam kategori "partai Kiai" karena ketiga partai ini menjadi pilihan mayoritas Kiai di Grobogan.

³⁵ Diolah dari KPU, *Data dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2006*, Purwodadi: KPU Grobogan, 2006.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-Pemilu99/partai-peserta-Pemilu1999.htm. Diakses pada hari Senin, 14 Januari 2008.

stigma masyarakat terhadap anggota Dewan secara keseluruhan pasca reformasi adalah kotor dan tidak pantas untuk kiai.

Megawati dengan PDI-P sebagai kendaraan politik, dipercaya sebagai representasi dan pemimpin kaum Abangan-Nasionalis di Indonesia. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang masyarakat Grobogan menjatuhkan pilihan politiknya untuk mendukung putri "Putra Sang Fajar"³⁸ ini. Mereka mencoblos PDI-P bukan karena PDI-P atau orang-orang yang akan menjadi wakil mereka di Dewan, melainkan lebih pada membela dan *nyengkuyung* Megawati. Sejarah politik masyarakat Grobogan (pada Pemilu 1955) menunjukkan bahwa selain menjadi pendukung PNI, Masyarakat Grobogan adalah pendukung fanatik PKI, bahkan PKI lebih banyak dari pada PNI atau partai-partai lain.³⁹

Keberadaan kiai yang diakui masyarakat bisa dilihat saat Pilkada pada 29 Januari 2006 berlangsung. Dimana, salah satu (dari dua) calon yang didukung kiai menang. Hal ini diperjelas dengan fakta bahwa di desa tempat kiai tinggal, calon yang didukungnya kebanyakan menang.

4. **Kehidupan Sosial Kebudayaan**

Dalam kehidupan sosial-budaya, satu sisi kiai dihormati, namun tidak jarang masyarakat –terutama yang selama ini jauh dari kehidupan agama dalam makna yang sesungguhnya- mengabaikan perkataan kiai. Masyarakat masih melakukan perbuatan yang sering kali dilarang agama, seperti minum minuman keras, berjudi, menyabung ayam dan lain sebagainya. Namun mereka tetap menghormati kiai dengan tidak mengganggu kegiatan keagamaan, tidak mengotori mushola atau masjid, bahkan tidak

³⁸ Salah satu julukan bagi Presiden pertama Indonesia Soekarno.

³⁹ Kala itu PKI Grobogan, memenangi Pemilu dengan perolehan 43,60 %, diikuti PNI 21,50 % suara. Lebih jelas lihat; <http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/20/pem5.htm> di akses pada hari Senin, 14 Januari 2008. Namun pada tahun 1960-an, anggota PKI meningkat pesat. diperkirakan, 700-800 dari 1000 Masyarakat Grobogan menjadi simpatisan PKI. Data hasil dari diskusi beberapa kali dengan *Mbah* Sunadi; tokoh PKI dari Desa Sedadi Kecamatan Penawangan yang selamat dari pembantaian.

berani mengambil barang atau benda milik para kiai. "Takut *kualat* dan malu" adalah kata yang sering diucapkan masyarakat.⁴⁰

Dilihat dari kacamata sosial keagamaannya, Kabupaten Grobogan bisa dibidang sebagai salah satu tempat bertemunya dua Kebudayaan Jawa. *Pertama*, Kebudayaan Pesisir yang kental nuansa Islamnya dengan Demak sebagai pusat. Kedua, Kebudayaan Pedalaman yang agraris dan selalu bersinggungan dengan unsur mistis dan kejawen yang berpusat di Surakarta. Letak geografis Grobogan yang berada di antara dua kutub kebudayaan berbeda ini menjadikan masyarakatnya di satu sisi beragama Islam, tetapi di sisi lain masih menjalankan aliran kejawen sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Simplikasinya, masyarakat Grobogan bisa dibedakan menjadi dua bagian dengan Sungai Serang⁴¹ sebagai pembatasnya. Di bagian barat sungai cenderung mengikuti kebudayaan pesisir dan Islam (Demak), sedang sedangkan bagian timur sungai lebih menyukai kebudayaan kejawen dengan mengindik Surakarta.

Penghormatan masyarakat yang tinggi terhadap kiai menunjukkan bahwa peran kiai di dalam penyatuan dua kebudayaan beda jalur ini bisa dibidang berhasil. Kiai di Grobogan dinilai mampu memosisikan diri sebagai *cultural broker* di tengah masyarakat. Sampai detik ini, tidak (belum) ada benturan atau percekocokan antara "umat Islam" dan "kaum kejawen" di Grobogan. Kebudayaan-kebudayaan lokal Grobogan mampu dimasuki nilai-nilai Islam. Hal ini bisa dilihat dari Grebeg Mulud Ki Ageng Selo yang sarat mistik dan *njawani*, tetapi Islami. Berkembangnya *Sedekah*

⁴⁰ Wawancara dengan Nur KHamid; warga Desa Leyangan Kecamatan Penawangan yang sering minum, berkelahi dll. Pada hari Ahad, 28 Oktober 2007. Seakan mengiyakan pernyataan KHamid, Purwadi Warga Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon juga tidak berani melakukan sesuatu yang merugikan Kiai, bukan karena takut, tetapi merasa malu. Ngobrol pada hari Sabtu, 28 April 2007.

⁴¹ Sungai sarat legenda dan mitos yang mengalir dari selatan ke utara; membelah Kabupaten Grobogan menjadi; barat dan timur. Terletak di sebelah barat Kota Purwodadi sekaligus menjadi tapal batas alam Kecamatan Purwodadi dengan Kecamatan Penawangan dan kecamatan Toroh – Geyer dengan Kecamatan Karangrayung.

Bumi, Slametan, Tahlilan, Mitoni, Matangpuluh, Nyatus, Nyewu, Mendak dan lain sebagainya saat pra Islam telah mengakar kuat di mayoritas masyarakat Grobogan, kini bisa dimasuki nilai-nilai Islam, diyakini sebagai kesuksesan kiai memadukan dua kebudayaan di atas.

Ada juga pemberian sesaji di kuburan, tempat wingit, saat tanam dan panen padi, kini telah menggunakan doa-doa yang bercorak Islam. Bila rejeki sedang melimpah, tidak jarang "golongan kejawen" mengundang kiai untuk *Manaqiban* dan *Khataman Qur'an* untuk memperoleh keselamatan, kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan dari *Gusti Kang Akaryo Jagad* (Allah SWT).

B. Klasifikasi Kiai Berdasarkan Peran dan Lingkup Yang Dimainkannya Dalam Pilkada 2006 di Grobogan.

Berdasarkan peran yang dimainkannya dalam Pilkada Grobogan 2006, secara garis besar kiai dibedakan menjadi tiga macam. Yaitu "Kiai Pendukung", "Kiai Simpatisan", dan "Kiai Golput".

1. Kiai Pendukung⁴²

Kiai Pendukung. Adalah kiai yang ditengarai menjadi pendukung salah satu calon bupati atau wakilnya. Dalam kategori ini, kiai pendukung dibedakan menjadi dua bagian;

Pertama, "Kiai Partai". Yaitu kiai yang dengan terang-terangan menjadi fungsionaris salah satu partai politik. Biasanya jika tidak PKB, maka PPP atau PAN. Kebetulan, bersama PDI-P, PKB-PPP dan PAN mempunyai calon yang sama yakni Pasangan Agus-Bowo. Kiai ini telah menyatakan dukungan ke salah satu calon

⁴² "Kiai Pendukung" yang penulis maksud bermakna ganda; (1) bisa dalam arti mendukung Pilkada secara keseluruhan, (2) bisa juga dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon. Pengertian ini mungkin kurang bisa dipahami, tetapi kenyataan di Grobogan memang sesuai dengan pengertian di atas.

kepada masyarakat luas. Hal ini sebagai konsekuensi logis keikutsertaannya terjun secara aktif di partai politik.⁴³

Jika dibandingkan dengan "jumlah" kiai di Grobogan yang berkisar antara 1.213 hingga 3.226 kiai,⁴⁴ jumlah kiai partai sangatlah sedikit. Meski demikian, mereka biasanya mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam masyarakat. Direkrutnya mereka dalam partai politik adalah bukti bahwa mereka mempunyai massa banyak dan kharisma yang bisa diandalkan. Dari pengamatan dan silaturahmi penulis ke beberapa kiai partai, hampir semua desa dimana kiai partai tinggal, dimenangkan oleh calon yang mereka dukung. Selain mendukung Pasangan Agus – Bowo, sebagian kecil kiai partai mendukung pasangan Bambang – Icek.⁴⁵

Menurut kinerja dalam mendukung calon, kiai partai dapat dibedakan menjadi "Kiai Aktif" dan "Kiai Pasif".

(1) Kiai aktif adalah kiai yang aktif dan bersemangat dalam memenangkan pasangan yang didukung partainya (Pasangan Agus - Bowo). Segala daya dan upaya dikeluarkan untuk "mempengaruhi" masyarakat agar menyalurkan aspirasi politiknya ke pasangan pilihannya. Kiai aktif biasanya melakukan hal ini karena beberapa alasan, yakni telah menjadi kewajibannya untuk memenangkan calon yang telah direstui partai sebagai konsekuensi logis atas kesetiaannya terhadap partai. Selain itu, pendekatan personal calon yang intensif dengan berbagai "buah tangan" dan janji, membuat kiai aktif merasa berdosa jika calon yang "baik hati"

⁴³ "Pernyataan" di atas didukung oleh K Niam Syukri; Pengasuh Lembaga Pendidikan Alternatif – Pondok Baca Masyarakat ASSHOEFFAH, Desa Peting, Kecamatan Kradenan. Wawancara pada hari Sabtu, 31 Mei 2008.

⁴⁴ Data dari Departemen Agama Kabupaten Grobogan. Lebih jelas lihat Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan, *Grobogan Dalam Angka*, Purwodadi: Depag Press, hlm. 110

⁴⁵ Idealnya semua "Kiai Partai" mendukung Pasangan Agus – Bowo; karena partai mereka mengusung pasangan ini. Namun ternyata dalam perjalanannya, dengan berbagai pembenar, banyak "Kiai Partai" yang mendukung Pasangan Bambang – Icek.

tersebut kalah. Karenanya agar menang, maka harus didukung sekuat tenaga. Ada juga alasan terselubung; persaingan, baik antarkiai, atau dengan komponen lain.

Persaingan ini terjadi dengan berbagai sebab dan alasan. *Pertama*, perebutan dana dan akses/jaringan. Keterbatasan mayoritas SDM Kiai dalam melihat peluang politik, menjadikan mereka hanya tergantung kepada calon sebagai sumber dana dan akses, sekaligus sebagai ajang rebutan pengaruh dengan kiai lain. *Kedua*, sebagai tempat untuk menunjukkan sekaligus mengukur eksistensi ke-kiaian-nya. Hal ini sangat penting untuk melihat perjalanan kiai tersebut di ranah perpolitikan selanjutnya.

Persaingan Kiai, baik dengan sesama kiai maupun sesama tim sukses bisa dipilah menjadi tiga; *Pertama*, kubu antarkiai satu partai. Di sini, sesama kiai dalam satu partai terjadi persaingan tidak sehat, baik dalam mendapatkan akses dan jaringan, maupun dalam unjuk gigi dihadapan calon. Persaingan ini dalam jangka panjang bisa membuat kondisi internal partai rapuh. Jika tidak kuat menahan rasa, kiai yang merasa terpojok dan kalah bersaing akan keluar dari partai. Bisa jadi, di kemudian hari tidak aktif lagi dalam dunia politik atau pindah ke partai lain yang seideologi.⁴⁶

Kedua, persaingan sesama kiai beda partai. Pilkada memang menyatukan mereka dalam satu meja dan satu tujuan. Namun masalah tidak begitu saja selesai. Fanatisme mereka kepada partai masing-masing sering dibawa kepermukaan dan menimbulkan masalah baru. Diantara mereka biasanya saling menjaga jarak dan sangat susah untuk dipertemukan. *Ketiga*, persaingan kiai dengan tim sukses lain non kiai. Perbedaan partai, ideologi dan cara pandang dalam melihat sesuatu, kadang kala menjadi bumerang tersendiri. Kiai yang mayoritas fanatik dan

⁴⁶ Hal ini terjadi di beberapa "Kiai Partai" di daerah yang nuansa islaminya kental seperti Kecamatan Gubug dan Tanggunharjo. Ada beberapa Kiai PKB pindah PPP pasca Pilkada, sebagai konsekuensi dari persaingan di internal PKB. Penulis tidak menyebut nama-nama Kiai, karena diminta oleh yang bersangkutan.

terbiasa otoriter (menang sendiri) menimbulkan masalah baru di tim. Persaingan ini akan semakin membuat suasana tim tambah kalut. Apalagi jika hal ini menyangkut masalah pembagian kerja dan materi.

Di sini, penulis melihat banyak kiai yang hampir kehilangan nalar ke-kiaian-nya. Penulis tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya negara atau daerah jika kiai politik yang kolot, *semau gue*, tidak paham politik tetapi memaksakan diri terjun, mempunyai pengaruh dan pengikut banyak, sekaligus mempunyai kesempatan berkuasa. Pastilah akan membuat suasana semakin kacau.⁴⁷

- (2) Kiai Pasif. Golongan ini dibedakan menjadi dua, yakni "Kiai Partai" dan "Kiai Non Partai". *Pertama*, Kiai partai. adalah sekelompok kiai yang tidak keberatan namanya "dicatut" dalam daftar tim sukses atau disebut tim sukses sebagai pendukung calon, tetapi kinerjanya perlu dipertanyakan. Di sanubari kiai golongan ini terdapat gejala yang cukup rumit dijelaskan. Adanya perbedaan antara hati dan pikiran terus mengganggu konsentrasi dan keyakinannya dalam menentukan sikap dan pilihan. Mayoritas kiai pasif mempunyai hubungan yang sangat baik dengan calon lain (Pasangan Bambang - Icek). Namun posisinya sebagai kiai partai yang ikut harus bertanggungjawab atas kemenangan calon yang diusung partainya. Kiai seperti ini biasanya kiai yang suka politik, tetapi tidak siap sepenuhnya untuk beradaptasi dengan dunia politik yang miskin perasaan. Oleh karena itu, agar tidak merasa bersalah kepada calon dari partai (Agus - Bowo) maupun sahabat (Bambang - Icek), mereka lebih banyak diam dan

⁴⁷ Penulis pernah diskusi tentang masalah "Kiai Politik" yang harusnya menjadi pengawas dan pengatur politisi, bukannya malah dijadikan alat oleh politisi untuk meraih kekuasaan dengan Habib Umar Mutohar Semarang pada pertengahan Februari 2008. Diakhir diskusi, mantan aktivis IPNU Jateng ini berharap Kiai berjuang sesuai dengan *maqom* dan kemampuan intelektualnya.

cenderung hanya "setor nama", ketimbang bekerja untuk memenangkan salah satu calon.⁴⁸

Kedua, "Kiai Non Partai". Adalah kiai yang tidak masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik, namun karena suatu alasan, menyatakan diri secara terang-terang menjadi pendukung salah satu calon. Dalam Pilkada di Grobogan tahun 2006, kiai non partai "pecah" menjadi dua; satu golongan mendukung Pasangan Agus-Bowo, sedang golongan yang lain memilih Pasangan Bambang - Icek. Penelusuran penulis di lapangan tidak menemukan satu pun kiai yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya ke Pasangan Bambang Budi - Moko.⁴⁹

Dalam menyatakan dukungan, para kiai pendukung ini ada yang diketahui calon, bahkan jadi tim sukses resmi,⁵⁰ tetapi banyak yang tidak terakomodasi secara *de jure*. Yang tidak terakomodasi biasanya berasumsi dan yakin bahwa sosok calon yang mereka bela, akan mampu membuat Grobogan lebih baik.⁵¹

⁴⁸ Sebenarnya ada masih ada kategori yang ke-3 yakni "Kiai Pembelot" yaitu Kiai Partai yang dengan terus terang menyatakan ketidaksukaannya kepada calon yang diusung partai; (terutama Agus) yang selama menjabat bupati, kinerjanya ditengarai buruk. Karena kiai pembelot mempunyai arti yang bertolak belakang dengan Kiai Pendukung maka kategori "ke-3" ini urung masuk klasifikasi. Kiai Partai yang pembelot mempunyai dua alasan; (1) partai mereka, terutama PKB dan PAN tidak seia sekata. PKB dibekukan pusat, sedang PAN walau dimasukkan KPUD sebagai partai yang mendukung Pasangan Agus – Bowo, namun banyak anggota partai ini menolak keputusan ini. (2) secara emosional, mereka lebih dekat dengan Bambang ketimbang Agus. Agus yang semasa menjabat bupati sangat arogan juga menjadi pertimbangan lain kenapa lebih memilih Bambang. Para Kiai Partai tidak memihak Pasangan Budi – Moko karena pasangan ini tidak begitu mereka kenal, tidak pernah mencoba "mendekat" dan pertarungan Agus VS Bambang lebih menarik diikuti, karena mempunyai akar sejarah yang cukup rumit dan lama. Di sini, terjadi perang batin antara memilih karena "teman" (Bambang) atau uang (Agus); Wawancara dengan (1) KH Munir Abdillah, pengasuh Pondok Pesantren Usmaniyah Desa Ngroto Kecamatan Gubug (Ahad, 1 Juni 2008), (2) K Rohib Soemowijoyo al-*Hafidz*, Pengasuh Pondok Baca dan Pesantren ASSHOEFFAH Desa Kredenan Kecamatan Kradenan. (Sabtu, 31 Mei 2008), (3) Kiai Amin Fauzi Dusun Pilang Kidul Kecamatan Gubug (27 Desember 2007), (4) KH Sya'roni; mantan Ketua Umum PPP Cabang Grobogan, 1999 – 2004 (rumah; Desa Gubug Kecamatan Gubug pada Selasa, 3 Juni 2008), (5) KH Musyafak Zein, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Ngambak Rijo Kecamatan Tanggunharjo (Senin, 2 Juni 2008).

⁴⁹ Para Kiai tidak mendukung Pasangan Budi – Moko karena menganggap pasangan ini tidak jelas jenis kelamin keagamaannya dan seakan menjaga jarak dengan golongan Kiai.

⁵⁰ Terjadi, biasanya ada deal antara calon/tim sukses dengan para Kiai

⁵¹ Salah satu Kiai itu adalah Kiai Abu Mansyur; Mursyid *Tarekat Shattariyah* dari Desa Nampu Kecamatan Karangrayung. Bahkan tanpa sepengetahuan tim sukses calon yang ia dukung, ketika Tim lain membagi 'angpau' ke Masyarakat Nampu, Kiai Abu Mansyur mengeluarkan uang pribadi untuk menandingi dan mengarahkan masyarakat untuk mencoblos calon yang ia dukung. Ada pula Kiai yang sampai menjual motor untuk membantu calon yang ia dukung. Sedang calon tidak mengetahui/mengakui keberadaan mereka. Kiai ini

2. **Kiai Simpatisan**

Jika kiai pendukung secara terang-terangan (aktif maupun pasif), menyatakan dukungannya ke salah satu calon. Baik kepada para sesama pendukung maupun tidak, kiai simpatisan menyatakan dukungan secara diam-diam. Mereka tidak akan menunjukkan calon yang akan dipilih jika tidak ditanya. Para kiai simpatisan ini hanya berani menyatakan dukungan ke salah satu calon kepada santri atau masyarakat yang dipercaya. Itupun dengan penuh hati-hati dan jalan yang cukup rumit. Kiai ini "takut" keterusterangannya kepada menimbulkan masalah baru di masyarakat. Oleh karenanya, untuk meminimalisasikan *mahdharat*, mereka memilih siapa santri atau masyarakat yang boleh tau atau tidak tentang calon yang hendak didukung.

Biasanya, jika santri atau masyarakat datang silaturahmi, kiai seperti ini hanya menyarankan kepada mereka untuk proaktif dalam pencoblosan. Baru kemudian jika sang kiai didesak atau ditanya tentang calon yang hendak dipilih, ia mau mengatakan calon pilihannya dengan berbagai pembenaran yang masuk akal, dan pastinya dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Kiai-kiai yang masuk dalam struktur teras organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah biasanya memosisikan diri sebagai Kiai simpatisan.⁵²

3. **Kiai Golput**

Kiai Golput ini digunakan untuk menyebut kiai yang secara terang-terangan *abstain* dalam Pilkada. Dalam menyatakan kegolputannya, kiai golongan ini ada yang secara terang-terangan, namun ada juga yang tidak. Meski golput, tetapi tetap menyeru kepada santri, jama'ah dan masyarakat baik secara kelompok maupun

tidak mau disebut namanya. Ia berasal dari Desa Gadoh Kecamatan Karangrayung. Wawancara pada hari Senin, 2 Juni 2008.

⁵² Wawancara dengan KH Drs Hambali Mahfud; Ketua Tanfid NU Cabang Grobogan, sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Buq'ah Mubarakah, Desa Pahesan Kecamatan Godong pada hari Selasa, 20 Mei 2008.

individu untuk berpartisipasi memilih calon yang selama ini mempunyai hubungan baik, memperhatikan dan diyakini terbaik dan siap membangun Grobogan di antara calon yang ada.

Alasan yang sering diutarakan adalah tidak ingin membuat santri atau masyarakat bingung apalagi pecah. Para kiai golput meyakini bahwa pada dasarnya santri dan masyarakat sudah mempunyai pilihan masing-masing. Ketika mereka silaturahmi ke kiai, sebenarnya sebatas mencocokkan pilihan mereka dengan sang kiai. Dan agar santri atau masyarakat tetap pada ketetapan hati mereka, maka sang kiai tidak hendak masuk dan mempengaruhi alur dan pikiran mereka dalam menentukan pilihan.

Alasan lain mengapa para kiai merasa tidak enak (enggan) dengan calon (Pasangan Agus – Bowo maupun Bambang – Icek, terutama Bowo dan Bambang), karena kenal mereka dengan baik.⁵³

Berdasarkan ruang lingkup peran yang dimainkan kiai dalam Pilkada di Grobogan Tahun 2006,⁵⁴ baik kapasitasnya sebagai Kiai Pendukung, Kiai Simpatisan maupun Kiai Golput⁵⁵, Kiai bisa dikategorikan menjadi tiga, yakni:

1. "Kiai Besar", yaitu kiai yang diakui secara umum mempunyai pengaruh dan pengikut besar dan disegani masyarakat. Ketokohnya tidak sebatas di dusun, desa atau

⁵³ Salah satu kiai yang menyatakan diri Golput (dengan alasan demi kemaslahatan) namun sangat menekankan masyarakat untuk mencoblos adalah KH Munir Abdillah; Pengasuh Pondok Pesantren Usmaniyah Desa Ngroto Kecamatan Gubug sekaligus Ketua Jama'ah al-Hikmah Jawa Tengah. Wawancara pada hari Ahad, 1 Juni 2008. *Lek* Sumiyatun, salah seorang warga Desa Ngroto Kecamatan Gubug juga mengiyakan tentang kegolputan *Mbah* Munir, yang ia yakini menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat; agar masyarakat tidak *ewoh* kepada *Mbah Yai*, andai mempunyai pilihan beda. Wawancara pada hari Ahad, 1 Juni 2008.

⁵⁴ Sebenarnya sangat sulit (untuk tidak mengatakan tidak bisa) mengklasifikasikan lingkup dan peran kiai. Seperti hasil diskusi penulis dengan Gus Mad (Ahmad Fathur Rosyad) Ngroto Kecamatan Gubug. Karena menyangkut banyak hal dalam kehidupan kiai itu sendiri dan masyarakat. Tetapi penulis (terpaksa) harus melakukannya agar permasalahan ini mudah dipahami dan dimengerti oleh KHalayak sebagai referensi dan catatan. Diskusi pada hari Kamis, 29 Mei 2008.

⁵⁵ "Kiai Golput sebenarnya tidak ikut klasifikasi, tetapi kegolputan Kiai yang dinilai lebih besar gen "ke-Kiaian-nya" kali sering dijadikan rujukan oleh Kiai lain.

kecamatan, tetapi minimal di tingkat kabupaten bahkan provinsi atau nasional. Dilihat dari asal atau tempat tinggalnya, kiai besar dibedakan menjadi dua, yaitu;

Pertama, "Kiai Lokal". Yaitu Kiai yang bermukim di Kabupaten Grobogan. *Mbah Baidhowi Brabo-Tanggunharjo*, *Mbah Wahid Zuhdi Bandungsari-Ngaringan* (alm), *Mbah M Zuhri Kuwaron-Gubug* (alm)⁵⁶, *Mbah Munir Ngroto-Gubug* dan Gus Wahid Karim Bandungsari-Ngaringan masuk dalam kategori ini.⁵⁷ *Mbah Baidhowi*, *Mbah Zuhdi* dan Gus Wahid Karim masuk dalam klasifikasi Kiai Pendukung,⁵⁸ *Mbah Zuhri* memastikan diri sebagai Kiai Simpatisan,⁵⁹ sedang *Mbah Munir* memilih sebagai Kiai Golput.

Kedua, "Kiai Luar", yakni sejumlah kiai kharismatik dari luar Kabupaten Grobogan yang ikut proaktif (Kiai Pendukung) dalam Pilkada. Kiai luar disinyalir mempunyai ikatan emosional dengan Kabupaten Grobogan. Pengaruhnya cukup besar dan mempunyai banyak santri di daerah kaya beras ini. *Mbah Salman Popongan-Klaten*, *Mbah Shabib Bugel-Jepara* dan *Mbah Sahid Kemadu-Rembang* penulis masukkan dalam kategori kiai luar.⁶⁰

⁵⁶ Saat Pilkada, *Mbah Wahid Zuhdi* dan *Mbah Zuhri* belum meninggal dunia.

⁵⁷ Penulis memposisikan Kiai-Kiai di atas ke dalam ruang "Kiai Besar" berdasarkan pengamatan, wawancara dengan sesama Kiai maupun bertanya kepada masyarakat diberbagai daerah di Grobogan.

⁵⁸ *Mbah Baidhowi* adalah Kiai yang men-*dawuhi* Bowo untuk mendampingi Agus, *Mbah Wahid* (alm) Mendukung Pasangan Agus – Bowo karena mempunyai "masalah" dengan Gus Wahid Karim yang tak lain iparnya sendiri, di mana Gus Wahid Karim sangat "berambisi" memenangkan Pasangan Bambang – Icek. Bisa dikata, dukungan *Mbah Wahid* (alm) kepada Pasagan Agus – Bowo karena bersumber dari adanya "masalah keluarga" dengan Gus Wahid Karim.

⁵⁹ *Mbah Zuhri* merestui Pasangan Agus – Bowo dan Bambang – Icek. Jika ditanya, hanya menganjurkan kepada masyarakat untuk memilih diantara dua calon ini. Putra Sulung *Mbah Zuhri*; Gus Munif mendukung Agus – Bowo karena kapasitasnya sebagai Dewan Syuro PKB Cabang Grobogan saat itu. Sedangkan salah satu Putra *Mbah Zurdi* yang kuliah di IAIN Walisongo (Angkatan 2003); Gus Maisur lebih memilih Pasangan Bambang – Icek karena Gus Maisur adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Purwodadi-Grobogan (IMPG) yang menyatakan diri mendukung pasangan ini.

⁶⁰ Ketiga Kiai ini mendukung Pasangan Bambang – Icek. Sebagai bentuk dukungannya, *Mbah Salman* foto bersama dengan Bambang – Icek. Foto tersebut kemudian dicetak dalam bentuk kalender dan disebarakan ke Masyarakat Grobogan oleh Tim Sukses B-I. Sebelumnya, *Mbah Salman*lah yang men-*dawuhi* Bambang untuk maju menjadi calon bupati, setelah sebelumnya Bambang minta restu sebagai wakil bupati; mendampingi Agus untuk kali kedua, namun tidak diijinkan. *Mbah Salman* adalah guru spiritual Bambang. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddadiyah KHolidayah ini menerima Bambang sebagai salah satu santri tarekatnya pada pertengahan 1996. Dengan jumlah santri tarekat tidak kurang dari 73.000 orang (di Grobogan), peran *Mbah Salman* bisa dibilang tidak sedikit. *Mbah Shabib Bugel-Jepara* dan *Mbah Sahid Kemadu-Rembang* ditengarai sebagai sahabat dekat *Mbah Salman*. Selain menganjurkan santrinya (asal Grobogan) untuk mendukung

2. "Kiai Biasa". Yang dimaksud dengan kiai biasa adalah kiai yang ketokohan dan pengaruhnya mulai dari dusun, desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Minimal, kiai yang masuk dalam kategori ini mempunyai pengaruh tingkat kecamatan. Jumlah kiai biasa lebih banyak dari pada kiai besar yang minoritas di Grobogan. Kiai Khozin (alm) Bologarang-Penawangan, Kiai Hambali Mahfud Pahesan-Godong, Kiai Masduki Gubug, Kiai Muslimin Wirosari, Kiai Mashudi Kluwan-Penawangan dan Kiai Hamzah Madni Purwodadi adalah contoh dari kiai biasa.⁶¹ Contoh kiai biasa di atas, kebetulan proaktif dalam Pilkada 2006 di Grobogan.⁶²

Kiai Khozin dan Kiai Hambali penulis masukkan dalam kategori "Kiai Simpatisan"⁶³, sedang Kiai Masduki, Kiai Muslimin, Kiai Mashudi dan Kiai Hamzah lebih cocok jika masuk dalam ruang "Kiai Pendukung"⁶⁴

3. "Kiai Kampung". Yang masuk kriteria "Kiai kampung" adalah kiai yang ketokohan dan pengaruhnya bisa hanya sebatas RT, RW, dusun, desa atau sampai kecamatan. Penulis memasukkan seluruh kiai non-"besar" dan "sedang" ke dalam kategori kiai kampung. Jumlahnya sangat banyak dan bervariasi. Biasanya kiai kampung dipercaya oleh masyarakat; mulai mengelola mushola, masjid hingga mendirikan pondok pesantren dan atau Sekolah Islam (madrasah). Baik dari biaya sendiri maupun bantuan dari masyarakat.

Penulis melihat, meski lingkup pengaruh kiai kampung lebih kecil dibanding kiai besar ataupun kiai sedang, namun efektivitas kiai kampung melebihi dua kiai di

Bambang – Icek, doa dan ridha keduanya diberikan "hanya" kepada Bambang – Icek. Data berasal dari wawancara dengan *Mbah Nur Sahid Purwodadi* (Kabagsos Kaupaten Grobogan; Rabu, 28 Mei 2008), *Mbah Muslimin Wirosari* (*Badal Mbah Salman* Wilayah Wirosari; Jum'at, 30 Mei 2008) dan Gus Ansori Ngaringan (Pengasuh Pondok Pesantren Annironiyatul Qur'aniyah Trowolu-Ngaringan; Sabtu, 31 Mei 2008).

⁶¹ Dikarenakan jumlahnya yang banyak, penulis hanya bisa mengambil beberapa contoh saja.

⁶² Baik kapasitasnya sebagai "Kiai Pendukung" maupun "Kiai Simpatisan"

⁶³ Keduanya memilih Pasangan Agus - Bowo

⁶⁴ Kiai Masduki dan Kiai Hamzah lebih suka Pasangan Agus – Bowo. Sedang Kiai Muslimin dan Kiai Mashudi menginginkan Pasangan Bambang – Icek memimpin Grobogan 5 tahun kedepan. Data berasal dari wawancara dengan Kiai KHoziin (Kamis, 19 Oktober 2006), Kiai Muzamil (Selasa, 8 Juli 2008), Kiai Mashudi (Jum'at, 25 Mei 2007), Kiai Hambali (Selasa, 20 Mei 2008) Dan Kiai Muslimin (Jum'at, 30 Mei 2008).

atasnya. Hal ini bisa terjadi karena para kiai kampung gampang ditemui, enak diajak ngobrol dan tidak terlalu membahas masalah-masalah yang rumit. "Kepolosan" kiai kampung dalam mengungkap Pilkada membuat mereka lebih bisa menjadi teman diskusi yang baik. Mayoritas kiai kampung jauh dari dunia politik dalam makna yang negatif. Mereka tidak *neko-neko* dan cenderung apa adanya.

C. Diversifikasi Kiai dalam Pilkada di Grobogan Tahun 2006.

Kata diversifikasi bisa diartikan sebagai penganekaragaman, penggolongan atau pembedaan.⁶⁵ Kata ini biasa dipakai dalam disiplin ilmu pertanian dan ekonomi. Penelusuran penulis belum menemukan kata ini digunakan dalam ilmu dan teori politik. Perbedaan dukungan kiai yang jelas dan pemetaan pilihan politik kiai oleh tim sukses calon saat Pilkada tahun 2006 di Grobogan lah yang membuat penulis tertarik memakai kata ini untuk membedakan dan menggolongkan kiai, baik karena pro aktifnya mendukung salah satu calon, kepasifan kiai atau ketetapan kiai yang memilih golput.

Mayoritas kiai yang awam politik seakan menjelaskan pilihan mereka cenderung apa adanya tanpa ditutup-tutupi, semakin menguatkan penulis untuk menggunakan kata diversifikasi dalam skripsi ini kali. Dan, secara garis besar, dalam Pilkada di Grobogan Tahun 2006 lalu, pilihan politik kiai dapat bedakan menjadi tiga golongan;

1. Pendukung Pasangan Agus – Bowo.

Sebagaimana diterangkan di atas, pasangan ini diusung oleh partai-partai besar di Grobogan yaitu (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mempunyai 17 dari jumlah 45 dewan di Grobogan). (2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); partai kaum sarungan tempo dulu yang mempunyai massa fanatik. Partai ini mempunyai 5 anggota Dewan di DPR. (3) Partai Kebangkitan

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 271

Bangsa (PKB); partai yang mengklaim diri sebagai partainya *wong* NU ini mempunyai 7 kursi.⁶⁶ (4) Partai Amanat Nasional (PAN); partai yang didirikan tokoh Muhammadiyah sekaligus tokoh Reformasi Amin Rais ini bisa dikata sebagai reinterpretasi dari kaum Muhammadiyah ini mempunyai 2 Dewan.⁶⁷

Dengan adanya partai berbasis Islam⁶⁸ yang mendukung pasangan ini, secara "otomatis", sejumlah kiai terutama yang masuk jajaran partai ini ikut mendukung calon yang diusung. Bahkan, walaupun samar, ada organisasi sosial keagamaan diikutsertakan dalam mendukung pasangan *Abang-Ijo*⁶⁹ ini. Juga dekatnya kurun waktu antara Pilkada 2006 dengan Pilpres 2004 yang mana Megawati (ketua umum PDI-P pusat) berpasangan dengan Hasim Muzadi (Ketua Umum Tanfidyah NU), menambah hubungan "Abangan-Santri" terjalin dengan baik karena mempunyai kepentingan sama seperti pada 2004.

Hubungan baik ini hendak direkatkan kembali dengan menggandengnya Agus dengan Bowo. Sebagian besar pengurus teras NU, MUI, Muhammadiyah mendukung pasangan ini.⁷⁰ Tim Sukses Mega – Hasyim saat Pilpres mencoba dihidupkan kembali untuk mengegolkan Pasangan Agus – Bowo.

⁶⁶ PKB saat itu dibekukan karena konflik internal (imbas dari konflik Gus Dur-Muhaimin VS ALwi Sihab-Syaifullaf Yusuf). Namun secara *de facto*, hampir seluruh pengurus dan komponen PKB mendukung Ir H Muhammad Nurwibowo, karena politisi jebolan UII Yogyakarta ini secara *de facto* pula yang menguasai PKB. Ini bisa dibuktikan dengan hadirnya Yenny Wahid dalam kampanye kemenangan Pasangan Agus-Bowo di Desa Depok Kecamatan Toroh. Selain itu, pada Konfercablub DPC PKB, pria asli Sugihmanik, Tanggung Harjo ini terpilih menjadi Ketua Tanfid PKB Grobogan Periode 2006-2011

⁶⁷ PAN, ditengah perjalanan, karena ada konflik internal, secara institusi, ketua DPC PAN Udin Sugito menyatakan bahwa PAN urung mendukung Pasangan Agus-Bowo, namun oleh KPUD Grobogan, tetap dimasukkan sebagai partai yang mendukung Pasangan nomor satu ini. Ini juga dibuktikan dengan hadirnya Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir sebagai pembicara dalam kampanye terbuka Pasangan Agus-Bowo. Lebih jelas lihat, Afrosin Arif dan Respati, *Mengawal Demokrasi, Dinamika Pilkada Grobogan*, Solo: ISKRA Publisher, 2006, hlm. 90

⁶⁸ Keluar dari kontek partai tersebut berazazkan islam atau tidak, penulis lebih melihat pada pendukung partai.

⁶⁹ Abang-ijo: merah-hijau. Merah untuk menggambarkan Agus yang berasal dari "Kelompok Abangan" dan PDI-P, dan hijau untuk mendefinisikan Bowo yang didukung oleh PKB "milik Kaum Sarungan".

⁷⁰ Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tanfidz NU Cabang Grobogan KH Drs Hambali Mahfud pada penulis pada Selasa, 20 Mei 2008 dikediaman beliau di Desa Peheasan Kecamatan Godong.

2. Pembela Pasangan Bambang – Icek.

Pasangan ini awalnya hanya didukung Partai Golkar.⁷¹ Namun kedekatan pasangan ini terutama Bambang dengan kiai, baik dari Golongan Muhammadiyah maupun NU yang terjalin lama, membuat pasangan ini menjadi alternatif untuk membawa Grobogan ke depan agar lebih baik. Lama sebelum Pilkada berlangsung, oleh para "Kiai Tarekat", Bambang dipercaya menjadi bendahara *Tarekat Su'biyah al-Nahdliyah* Cabang Grobogan.⁷² Mengingat sejak pertengahan tahun 1990-an, Bambang menjadi santri *Mbah* Salman Popongan (KH Salman Dalawi al-Fafidz; Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Kholidiyah sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren al-Manshur Popongan-Tegalondo, Delanggu-Klaten) yang mempunyai sekitar 73.000 santri *tarekat* dengan 43 Badal (asisten/guru pengganti) di Kabupaten Grobogan.⁷³ Hampir bisa dipastikan bahwa seluruh santri *Mbah* Salman mendukung pasangan ini.

Kiai-kiai kampung yang tidak "diperhatikan" Pasangan Agus – Bowo cenderung menyalurkan aspirasi politiknya ke pasangan ini. Saat menjadi Wakil Bupati, Bambang sering memperhatikan dan membantu pelbagai kegiatan keagamaan. Di antara ketiga calon Bupati, Bambang dinilai paling agamis. Selain itu posisi Bambang (santri) yang sering didzolimi Agus (abangan) menambah semangat para kiai kampung untuk membelanya.

Selama ini Bambang juga dikenal sebagai sosok pejabat yang ramah dan bersih. Mantan Camat Karangrayung ini sering diberitakan sebagai satu-satunya

⁷¹ Dalam perjalanannya, Pasangan Bambang-Icek didukung oleh beberapa partai kecil yang tidak masuk kedalam koalisi grobogan. Partai-partai tersebut adalah Partai Merdeka, Partai Pelopor, PBR, PKS dan lain sebagainya yang berjumlah hingga 11 partai, namun 11 partai tersebut pada Pemilu 2004 total hanya mempunyai 53.387 suara.

⁷² Kumpulan *tarekat* yang berada dalam naungan organisasi sosial keagamaan NU

⁷³ Data ini penulis dapat ketika silaturahmi dan wawancara dengan oleh *Mbah* Muslimin (salah seorang badal di wilayah Wirosari) di kediaman beliau pada hari Jum'at 30 Mei 2008

Calon Bupati yang Asli Grobogan.⁷⁴ Isu putra daerah pada kenyataannya mampu membuat sebagian besar masyarakat yang kurang berkepentingan terhadap Pilkada memihak Bambang. Bahkan mahasiswa asal Grobogan yang menuntut ilmu di berbagai kota seperti Semarang, Kudus, Solo dan Yogyakarta, setelah melakukan pembacaan dan diskusi tentang para calon, mayoritas bersikap membela Bambang.⁷⁵

3. Golput

Sebutan ini ditujukan kepada para kiai yang tidak mendukung salah satu calon (dengan berbagai alasan). Biasanya kiai yang tidak mendukung salah satu calon mengaku tidak paham politik dan tidak mau terjebak dalam kepentingan sesaat.⁷⁶ Kekurangpercayaan terhadap calon yang ada juga menjadi alasan mengapa banyak kiai bersikap golput. Bagi mereka, Pilkada tak ubahnya Pemilu legislatif yang hanya mengumbar janji dan jarang memberi solusi nyata kepada masyarakat. Keterkenalan mereka dengan beberapa calon juga disinyalir membuat para kiai golput. Penelusuran penulis menunjukkan bahwa Kiai yang golput jumlahnya relatif sedikit.

Sementara untuk Pasangan Budi - Moko, Penulis tidak (belum) menemukan satu kiai pun yang mendukung pasangan yang diusung oleh tujuh partai ini. Ketujuh partai itu adalah Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

⁷⁴ Agus berasal dari Sukoharjo sedang Budisatyo lebih dikenal sebagai orang Jakarta dari pada Putra Grobogan.

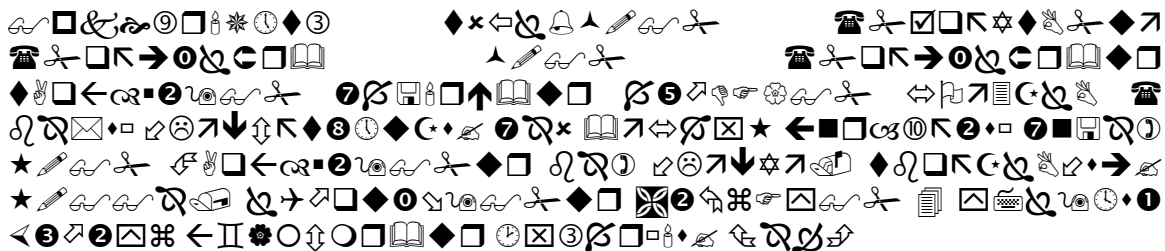
⁷⁵ Pada 7 Juli 2005, ada pertemuan sekitar 52 mahasiswa perwakilan dari beberapa kota di Masjid Jabal KHoir Simpang Lima Purwodadi. Terdiri dari 31 Mahasiswa kuliah di Semarang (IMPG), empat (4) di Kudus (Permadi –Persatuan Mahasiswa Purwodadi-), tujuh (7) Mahasiswa Yogyakarta (Himadika –Himpunan Mahasiswa Purwodadi di Jogjakarta) dan 10 mahasiswa yang kuliah di Kota Solo (Formaps –Forum Mahasiswa Purwodadi di Solo). Di pertemuan tersebut mahasiswa diskusi serius tentang Pilkada. Di situ disepakati bahwa masing-masing *locus* kota, diberi kebebasan untuk menentukan sikapnya di Pilkada, memilih siapapun calon yang ada. Permadi dan Formaps memilih netral (Permadi lebih ke Pasangan Bambang-Icek, sedang formaps ke Pasangan Budi - Moko), Himadika mendukung secara individu dan IMPG menyatakan dukungan ke Bambang-Icek.

⁷⁶ Seperti yang diungkapkan Mbah Munir Ngroto (KH Munir Abdillah; pengasuh Pondok Pesantren Usmaniyah Desa Jeketro Kecamatan Gubug. Wawancara pada hari Ahad, 1 Juni 2008)

(PNI M).⁷⁷ Dimana untuk mengambil simpati rakyat, ketujuh partai ini sepakat membentuk ”Koalisi Pembaharuan Grobogan”.⁷⁸ Alasan yang sering diutaraka para kiai adalah selama ini, pasangan nomor urut tiga ini kurang dikenal kiprahnya.

D. Hukum Mencari/Menentukan Pemimpin menurut Kiai di Grobogan

Dalam Islam, hukum mencari dan menentukan pemimpin adalah wajib.⁷⁹ Hal ini dilakukan untuk memelihara agama dan kepentingan duniawi umat Islam.⁸⁰ Allah SWT memerintahkan umat Islam agar taat kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada pemimpin. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi;



Artinya; Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas, terutama tentang taat kepada pemimpin, seakan Allah SWT secara tidak langsung memerintahkan Umat Islam agar memiliki pemimpin. Dengan demikian,

⁷⁷ Data disarikan dari “Data dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2006”, KPU Kabupaten Grobogan, hlm. 12-13

⁷⁸ Afrosin Arif dan Respati, *Mengawal Demokrasi, Dinamika Pilkada Grobogan*, hlm. 74

⁷⁹ Di sini para ulama berbeda pendapat. ada yang mewajibkan dengan dasar ijma', wajib karena aqli atau syar'i juga menjadi perdebatan yang cukup panjang. Ada pula yang menyatakan *fardhu kifayah*. Lebih jelas lihat; Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Putaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 64 – 65. Hal ini juga diungkap Gus Mahmud kandangrejo Kecamatan Klambu. Wawancara pada hari Sabtu, 3 Mei 2008

⁸⁰ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia, Ibid.*

mencari, memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban. Para ulama seperti al-Mawardi (w 450 H), Abi Ya'la (w 458), Ibnu Taimiah (661-728 H), Muhammad al-Mubarak, Mahmud Hilmi dan lain sebagainya, dengan berbagai dasar dan alasan menyatakan bahwa mencari/menentukan pemimpin adalah suatu kewajiban.⁸¹

Namun masalah menjadi menarik jika ada pertanyaan siapakah pemimpin (*ulul amri*) yang dimaksud dalam ayat di atas? Abu Hurairah RA mengatakan bahwa *ulul amri* yang dimaksud adalah para pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas.⁸² Sedang Ibnu Zaid mengartikan *ulul amri* dalam ayat di atas adalah sultan. Hal ini berbeda dengan penafsiran Maimun ibn Mahra yang mengartikan kata *ulul amri* dalam ayat di atas adalah pemimpin pasukan perang, tepatnya detasemen *al-sariyah*. Atha ibn as-Saib malah mengartikan *ulul amri* adalah ahli fiqih dan agama. Hampir sama dengan as-Saib, Ibn Abi Najih memaknai *ulul amri* sebagai ahli fiqih, agama dan akal. Al-Hasan juga memaknai *ulul amri* sebagai ulama'. Mujahid memaknai *ulul amri* sebagai ahli fiqih dan atau sahabat nabi. Sedang Thabari mengartikan *ulul amri* adalah para pejabat dan penguasa.⁸³ Dengan berbagai dalil pembenar yang ada, *ulul amri* yang dimaksud penulis adalah calon bupati dan wakilnya.

Begitu pentingnya memilih pemimpin (dalam hal ini adalah Pemilu Legislatif), hingga pada Kongres Umat Islam tahun 1953, para ulama sepakat bahwa memilih (Pemilu 1955), hukumnya wajib. Meski saat itu yang diwajibkan adalah untuk mencoblos partai yang berideologi islam.⁸⁴ Dewan Masjid Indonesia pun mewajibkan mencoblos. Hal serupa juga dinyatakan oleh Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar yang mengharamkan

⁸¹ Disarikan dari Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasaah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia; Ibid.*, hlm. 65-73

⁸² Syibah Asa, *Dalam Cahaya al-Qur'an, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2000, hlm. 87

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Jaih Mubarak, *Op.cit.*, hlm. 75

golput. Alasan mereka adalah golput berarti meninggalkan kewajiban mendirikan *imamah*.⁸⁵

Oleh negara, golput tidak disebutkan secara eksplisit, dan cenderung diperbolehkan. Namun dalam UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu legislatif dan DPD pasal 139 ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan, atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau paling banyak 10 juta rupiah.

Ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau paling banyak 10 juta rupiah. Di sini seolah-olah pemerintah memperbolehkan seseorang golput, tetapi melarang seseorang mengajak orang lain golput dengan alasan apapun.

Dalam kasus Pilkada Grobogan, dimana para calon yang ada, ditentukan oleh partai politik (kurang sesuai dengan tradisi Islam; musyawarah), membuat para kiai hanya menyampaikan ke masyarakat untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan "nurani" masing-masing, tanpa menyinggung tentang politik (pemilihan pemimpin) "perspektif" Islam. Kiai sebatas menganjurkan kepada masyarakat untuk proaktif dan tidak berbicara wajib atau tidak. Karena Pilkada adalah acara resmi negara, maka dalam pandangan kiai, sebagai warga negara yang baik, harusnya masyarakat Grobogan proaktif. Hal ini dikuatkan alasan; jika dalam sholat sangat dianjurkan untuk berjama'ah (ada

⁸⁵ *Ibid.*

pemimpinnya), apalagi untuk mencari pemimpin yang akan bekerja dalam waktu yang relatif lama, dengan berbagai persoalan hidup, baik sebagai hamba Allah, sesama manusia maupun dengan makhluk lain.

Sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis yang masih memegang peran signifikan di tengah masyarakat, kiai mempunyai posisi penting dan strategis, baik sebagai penuntun masyarakat atau sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling dominan dalam ”menentukan arah” Pilkada. Termasuk meminimalisir gejolak di masyarakat. Untuk itu, kiai sangat hati-hati ketika berbicara tentang pilihan pribadi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada mereka, hilang atau menyusut karena politik praktis, yang kemudian berdampak pada kebingungan dan perpecahan di masyarakat.

Mencari pemimpin tidaklah mudah. Seorang pemimpin juga harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diamanahkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW berikut ini;

ان رسول الله صلعم قال: كلکم راع فمسؤل عن رعيته, فالامير الذي على
الناس راع وهو مسؤل عنهم, والرجل راع على اهل
بيته وهو مسؤل عنهم, والمرأة رعيته على بيت
بعليها وولده وهي مسؤلة عنهم, والعبد راع على مال
سيده وهو مسؤل عنه, الا, فكلکم راع وكلکم مسؤل
عن رعيته

Artinya: Rasulullah bersabda: kamu semua adalah pengurus yang dipercaya, kelak kamu akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Maka penguasa yang mengurus keadaan rakyat adalah pemelihara dan dia akan ditanyakan tentang rakyatnya. Seorang laki-laki

adalah pengurus terhadap isi rumahnya dan dia akan ditanya tentang keadaan mereka. Seorang perempuan adalah pengurus rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia akan ditanya tentang hal mereka. Seorang budak adalah pengurus harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang hal harta tuannya itu. Ketahuilah, kamu semua adalah pengurus, semua kamu akan ditanya tentang pengurusannya. (al-Bukhari 49:17; Muslim 33; 5, al-Lu'lu-u wal Marjan 2284).⁸⁶

⁸⁶ Teungku Muhammad Habi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 6*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 15

BAB III
PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2006

A. Profil Kabupaten Grobogan

1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan mempunyai Ibu Kota Purwodadi, terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur. Secara geologis, Kabupaten Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di sebelah selatan dan Pegunungan Kapur Utara di sebelah utara. Dua pegunungan itu merupakan pegunungan lipatan yang disebut Antiklinarium Rembang. Batuan pembentuknya terdiri atas batu pasir, batu kapur dan napal.

Dulu, dua pegunungan tersebut merupakan hutan jati, mahoni dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan, disamping juga sebagai lahan pertanian, meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah. Beberapa areal dipergunakan untuk perkebunan minyak kayu putih. Lembah yang membujur dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk juga aliran banyak sungai, jalan raya dan jalan kereta api.¹

Kabupaten Grobogan mempunyai wilayah terluas ke dua di Jawa Tengah setelah Cilacap, yakni 1.975,86 Km², Jarak bentang dari Utara ke Selatan ± 37 km dan dari Barat ke Timur ± 83 km, dengan penduduk sebanyak 1.377.715 jiwa

¹ http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29 diakses pada hari Jum'at, 23 Maret 2007

(Desember 2006).² Secara administratif, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan yang terbagi menjadi 273 Desa dan 7 Kelurahan,³ yaitu;

- a. Kecamatan Purwodadi; merupakan daerah ibu kota kabupaten. Terdiri atas 4 kelurahan dan 13 desa, dengan luas 77,65 km².
- b. Kecamatan Toroh. Di kecamatan sebelah selatan Purwodadi ini terdapat 16 desa dengan luas wilayah 199,31 km².
- c. Kecamatan Geyer. Dibagi atas 13 desa dengan luas wilayah 196,19km².
- d. Kecamatan Grobogan yang merupakan ibu kota pertama Kabupaten Grobogan sebelum dipindah ke Purwodadi pada tahun 1816 M. Di sini terdapat 11 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah 104,56km².
- e. Kecamatan Brati, ada 9 desa dan luas wilayah 54,90 km².
- f. Kecamatan Klambu, memiliki 9 desa dengan luas wilayahnya 46,56 km².
- g. Kecamatan Wirosari mempunyai 12 desa dan 2 kelurahan, dengan luas wilayahnya mencapai 154,30 km².
- h. Kecamatan Tawangharjo, dibagi menjadi 10 desa, dengan luas wilayahnya 83,60 km².
- i. Kecamatan Ngaringan 12 desa dengan luas wilayahnya 116,72 km².
- j. Kecamatan Kradenan ada 14 desa dengan luas wilayah 107,74 km².
- k. Kecamatan Pulokulon terdapat 13 desa dengan luas wilayah 133,65 km².
- l. Kecamatan Gabus, tercatat 14 desa dengan luas wilayahnya 165,37 km².
- m. Kecamatan Godong, mempunyai desa paling banyak, yakni 28 desa dengan luas wilayahnya 86,79 km².
- n. Kecamatan Penawangan, 20 desa dengan luas wilayahnya 74,18 km².
- o. Kecamatan Karangrayung, 19 desa dengan luas wilayahnya 140,59 km².

² *Ibid.*

³ KPUD Grobogan, *Data dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2006*, Purwodadi: KPUD Grobogan, 2006, hlm. vii.

- p. Kecamatan Gubug, 21 desa dengan luas wilayahnya 71,11 km².
- q. Kecamatan Kedungjati, 12 desa dengan luas wilayahnya 130,34 km².
- r. Kecamatan Tegowanu, 18 desa dengan luas wilayahnya 51,67 km².
- s. Kecamatan Tanggunharjo 9 desa dengan luas wilayahnya 60,62 km².⁴

Sedangkan secara geografis, kabupaten ini terletak diantara 110⁰ 15'BT – 111⁰ 25'BT dan 7⁰ LS - 7⁰ 30' LS.⁵ Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kudus dan Pati. Kabupaten Blora berada di sebelah timur “penghasil swike” ini. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Sragen, dan Boyolali. Sedang Kabupaten Semarang dan Demak berada di sebelah baratnya.⁶

Kondisi alam Kabupaten Grobogan merupakan perpaduan antara dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Dataran rendah dengan ketinggian sampai 50 M di atas permukaan air laut (DPL) dan kelerengan antara 0-8 % meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan Wirosari bagian selatan. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 M DPL dengan kelerengan 15 % meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan. Sedang daerah perbukitan dengan kelerengan 8-15 % berada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari bagian utara.⁷

Dengan struktur yang demikian, Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian. Namun cenderung sulit untuk mendapatkan air bersih. Dengan areal seluas 197.586.420 ha, terdapat

⁴ Afrosin Arif dan Respati, *Mengawal Demokrasi: Dinamika Pilkada Kabupaten Grobogan*, Solo: ISKRA Publisher, 2006, hlm. 9-10

⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9

⁶ http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29 Diakses pada hari Jum'at, 23 Maret 2007

⁷ Diolah dari Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2004*, Purwodadi: Bappeda Kabupaten Groboan dengan BPS Kabupaten Grobogan, 2005. hlm 7-14

63.281.408 ha (32,03 %) lahan pertanian. Sedang tanah bukan sawah mencapai 134305012 ha (67,97 %). Areal pertanian dari sisi pembagian air, dibagi atas empat bagian, yaitu irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan. Untuk tanah bukan sawah, terdiri atas pekarangan, rumah/bangunan, tegal/kebun, rawa, hutan dan lain sebagainya. Hutan Negara menempati areal seluas 68.633.030 ha. Sedang hutan rakyat hanya 2.007.000 ha.⁸ Irigasi yang didukung oleh tiga sungai besar yakni Sungai Serang, Sungai Lusi dan Sungai Tuntang berjalan dengan baik ditambah dengan beberapa bendungan dan waduk seperti Kedung Ombo, Waduk Dumpil, Bendungan Klambu, Bendungan Sedadi dan lain-lain, menjadikan Kabupaten Grobogan termasuk salah satu penyangga beras nasional.

Disamping pertanian, Grobogan yang terletak diantara dua pegunungan kapur, memiliki sumber daya tambang dan galian yang bisa diandalkan seperti kapur, tanah liat, garam, gips, batu dan lain sebagainya. Untuk industri, Kabupaten Grobogan adalah tempat yang cukup strategis. Ini bisa dilihat dari letak geografis dan akses yang cepat dengan daerah sekitarnya seperti Semarang, Boyolali, Solo, Sragen, Blora, Pati, Kudus dan Demak. Hal ini diperlengkap dengan tenaga kerja yang melimpah, berdedikasi serta loyalitas tinggi. Potensi kepariwisataan juga dimiliki daerah ini, baik wisata alam maupun seni budaya dan religi. Sayangnya perhatian dari otoritas dan rusaknya kondisi jalan, seakan menghambat dan menutupi segala potensi yang ada.

⁸ Diolah dari Humas, *Potensi Daerah Kabupaten Grobogan*, Purwodadi: Humas Setda Grobogan, 2005.

2. Sejarah, Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan Masyarakat Grobogan

Sejarah Grobogan

Akar sejarah keberadaan Kabupaten Grobogan sebagai daerah yang telah menunjukkan adanya kegiatan dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri, tanpa adanya paksaan dari daerah lain, dapat dilacak dari mulai zaman kerajaan Mataram Islam Kartasura.⁹

Sejarah Kabupaten Grobogan dimulai pada 21 Jumadil Akhir 1650 Saka atau 4 Maret 1726 M. Tepatnya ketika Raja Mataram kala itu; Susuhunan Amangkurat IV yang sebelumnya memasukkan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu daerah jajahannya. Sang raja kemudian mengangkat seorang abdi bernama Ng. Wongsodipo menjadi Bupati Monconagari (taklukan raja) Grobogan dengan nama RT Martopuro yang meliputi wilayah Sela (sekarang Tawangharjo; daerah dimana leluhur Kerajaan Mataram; Ki Ageng Selo dimakamkan), Teras Karas, Wirosari, Santenan, Grobogan, dan beberapa daerah di Sukowati bagian utara Bengawan Sala.¹⁰

Karena saat itu Kartasura (pecahan Mataram, tetapi yang induk) dalam keadaan kacau, sebab adanya “Perang Trunojoyo”, maka pengawasan terhadap daerah Grobogan diserahkan kepada kemenakan sekaligus menantu Amangkurat IV yang bernama RT Suryonagoro (Suwandi), sedang RT Martopuro pulang ke Kartasura. Di Grobogan, RT Suryonagoro membuat struktur pemerintahan

⁹. Humas Setda Grobogan, *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan*, Purwodadi: Humas Setda Kabupaten Grobogan, 2006, Hlm. 5.

¹⁰. Penulis mendapatkan data ini dari; (1) Dari cerita lisan Kepala Bagian Sosial Bapak Drs H Nur Said yang merupakan salah satu keturunan Ki Ageng Selo, yang telah diangkat menjadi Tumenggung (darah biru) di Kerajaan Surakarta. Beliau adalah Sejarahwan Grobogan yang meneliti Grobogan dengan segala seluk beluk sejarah dan mitosnya melalui buku dan lakon mistik ala Jawa; lewat *laku* dan *lakon*. (2) Serat Babad Kartasura/Babad Pacina, hlm. 172 – 174 yang penulis lihat sudah hampir rusak dan tidak ada tanggal pembuatannya.

kabupaten pangreh praja. mulai bupati, patih, kaliwon, pamewu, mantri, dan seterusnya sampai jabatan bekel di desa-desa.¹¹ Pada tahun 1864 M, ibu kota kabupaten dipindah dari Grobogan ke Purwodadi.

Pada tahun 1903, oleh Belanda, Grobogan dimasukkan dalam wilayah Semarang Gewest. Kemudian, setelah diberlakukannya Desentralisasi pada tahun 1905 M, Grobogan memperoleh otonomi penuh pada 1908 M. Kemudian pada tahun 1928, berdasarkan Staatbad 1928 No. 117, Kabupaten Grobogan mendapat tambahan dua distrik dari Kabupaten Demak yaitu Distrik Manggar dengan ibukota di Godong dan Distrik Singenkidul dengan ibukota di Gubug. Lalu pada tahun 1933, Kabupaten Grobogan memperoleh tambahan Asistenan Klambu dari Distrik Undaan Kudus.¹²

Pada masa Jepang hingga merdeka, Grobogan mengalami beberapa perubahan. Tahun 1948, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1. UU ini menyatakan bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu: Provinsi, Kabupaten dan Desa (Kota Kecil). Selanjutnya berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950 dibentuklah Daerah-daerah Tingkat II di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian UU inilah yang mendasari pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan. Dengan Perda Kabupaten Dati II Grobogan No. 11 Tahun 1991 ditetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Grobogan adalah Hari Senin Kliwon, 21 Jumadil Akhir 1650 atau 4 Maret 1726 atau 1 Rajab 1138 H. Bertepatan dengan diangkatnya RT. Martopuro sebagai Bupati Monconagari di Grobogan. Sehingga RT. Martopuro inilah yang sampai sekarang dianggap sebagai Bupati Grobogan yang pertama dengan motto yang terkenal yakni

¹¹ http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26, diakses pada hari Senin, 26 Maret 2007

¹² *Ibid.*

*Chandra Sangkala: Kombuling Cipto Hangroso Jati, Surya Sangkala Kridhaning
Hangga Hambangun Praja ini.*

Pemerintahan

Dalam sejarah Pemerintahan di Grobogan, hingga kini, tercatat 31 orang telah memimpin daerah yang sebagian besar tanahnya labil ini. Sepuluh bupati pertama ketika ibu kota masih di Grobogan (daerah Kecamatan Grobogan – sebelah timur laut Purwodadi), dan 21 bupati ketika pindah ke Purwodadi. Uniknya, baru H Bambang Pudjiono SH (Bupati 2006 s.d sekarang) yang asli putra daerah. Sebelumnya adalah bupati dari daerah lain.¹³

Berikut ini adalah Nama-nama Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Grobogan;

- a. Pada saat Ibukota Kabupaten di Kota Grobogan
 1. Adipati Martopuro atau Adipati Puger (1726 M)
 2. RT. Suryonagoro Suwandi atau RT. Yudonagoro.
 3. RT. Kartodirjo (1761 - 1768 M).
 4. RT. Yudonagoro (1768 - 1775 M).
 5. R. Ng. Sorokarti atau RT. Abinaro (1775 - 1787 M).
 6. RT. Yudokerti atau Abinarong II (1787 - 1795 M).
 7. RM. T. Sutoyuda (1795 - 1801 M).
 8. Kartoyuda (1801 - 1815 M).
 9. RT. Sosronagoro I (1815 - 1840 M).
 10. Sosronagoro II (1840 - 1864 M).

¹³ http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=28. Diakses pada hari Rabu, 28 Maret 2007

b. Setelah Ibukota Kabupaten di Kota Purwodadi

11. RT. Adipati Martonagoro (1864 - 1875 M).
12. RM. Adipati Ario Yudonagoro (1875 - 1902 M).
13. RM. Adipati Ario Haryokusumo (1902 - 1908 M).
14. Pangeran Ario Sunarto (1908 – 1933); Pencipta Trilogi Pedesaan, yaitu; di desa-desa harus ada sekolah dasar, balai desa, dan lumbung desa.
15. R. Adipati Ario Sukarman Martohadinegoro (1933-1944M)
16. R. Sugeng (1944 - 1946 M).
17. R. Kaseno (1946 - 1948 M). Bupati merangkap Ketua KNI
18. M. Prawoto Sudiby (1948 - 1949 M).
19. R. Subroto (1949 - 1950 M).
20. R. Sadono (1950 - 1954 M).
21. Haji Andi Patopoi (1954 - 1957 M). Bupati Kepala Daerah
22. H. Abdul Hamid sebagai Pejabat Bupati dan Ruslan sebagai Kepala Daerah yang memerintah sama-sama (1957-1958).
23. R. Upoyo Prawirodilogo: Bupati Kepala Daerah merangkap Ketua DPRD (1958 – 1964 M).
24. Supangat: Bupati Kepala Daerah merangkap Ketua DPRD (1964 - 1967 M).
25. R. Marjaban Pejabat Bupati Kepala Daerah (1967-1970 M).
26. R. Umar Khasan, Pejabat Bupati Kepala Daerah (1970 - 1977 M).
27. Kolonel Inf. H. Soegiri, Bupati Kepala Daerah (11 Juli 1974 - 11 Maret 1986 M).

28. Kolonel H. Mulyono US: Bupati Kepala Daerah (11 Maret 1986 - 11 Maret 1996 M).
29. Kolonel Inf. Toermudi Soewito, Bupati Kepala Daerah (11 Maret 1996 - 11 Maret 2001 M).
30. Agus Supriyanto SE, Bupati Grobogan (11 Maret 2001 - 2006 M).
31. H Bambang Pudjiono SH, Bupati Grobogan (2006 - sekarang)¹⁴

Politik

Dalam dunia perpolitikan, Kabupaten Grobogan, sejak dahulu dikenal sebagai daerah kantung komunis dan nasionalis. Hal ini bisa dilihat pada Pemilu 1955, dimana Partai Komunis Indonesia (PKI) memenangi Pemilu di daerah ini dengan jumlah pemilih sebanyak 43,6 %, diikuti PNI yang meraih 21,5 % suara.¹⁵ Ketika Pemilu demokratis kembali digelar pasca reformasi, tepatnya pada tahun 1999, dimana kaum komunis-sosialis tidak (belum) aktif diperpolitikan karena banyaknya kendala, PDI-P (yang bisa dikata sebagai pewaris sah PNI dan dekat dengan PKI) mampu meraih 46,7 %, disusul PKB diurutan kedua dengan 19,2 %suara.¹⁶

Hingga awal kemerdekaan, Masyarakat Grobogan dikenal kritis, cerdas, punya etos tinggi dan berani mengeluarkan pendapat, terutama para aktivis PKI. Sayang, setelah "ditetapkan" sebagai salah satu basis PKI yang terlarang oleh Orde Baru, Penduduk Grobogan banyak yang dibunuh dan diintimidasi dalam

¹⁴ http://grobogan.go.id/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Diakses pada hari Rabu, 28 Maret 2007

¹⁵ <http://www.suamerdeka.com/harian/0402/20/pem5.htm>. diakses pada hari Jum'at, 19 Oktober 2007. Pada tahun 1960-an, anggota PKI meningkat pesat. Jika dihitung *ngawur*, 700-800 dari 1000 Masyarakat Grobogan menjadi simpatisan PKI. Data hasil dari diskusi beberapa kali dengan *Mbah* Sunadi; tokoh PKI dari Desa Sedadi Kecamatan Penawangan yang selamat dari pembantaian.

¹⁶ *Ibid.*

segala lini kehidupan, hingga gen trauma itu masih menghinggapi sebagian besar masyarakatnya.¹⁷

Sosial, Kebudayaan dan Keagamaan.

Secara kultur dan sejarah, Kabupaten Grobogan terbelah menjadi dua bagian; wilayah barat dan timur dengan Sungai Serang ditengarai sebagai pembatas. Dua wilayah ini, secara implisit selalu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Peta Kabupaten Grobogan menunjukkan; Kecamatan Godong, Gubug, Karangrayung, Kedungjati, Penawangan, Tanggunharjo dan Tegowanu, berada di sebelah barat Sungai Serang. Sementara sebelah timur sungai ada Kecamatan Brati, Gabus, Geyer, Grobogan, Klambu, Kradenan, Pulokulon, Purwodadi, Ngaringan, Tawangharjo, Toroh dan Wirosari. Sedang Kecamatan Klambu berada di dua bagian sungai.

Dua bagian wilayah ini mempunyai sejarah panjang. Tepatnya; sejak berdirinya Kerajaan Islam Demak Bintoro. Daerah barat Sungai Serang dahulu menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Demak, sedang timur Sungai Serang berada dalam pengawasan Ki Ageng Getas Pendowo (Ki Abdullah).¹⁹ Kerajaan Demak Bintoro menghormati Ki Ageng Getas Pendowo, karenanya tidak berani mengusik Grobogan.²⁰ Sebutan Ki Ageng Getas Pendowo sendiri konon diberikan oleh

¹⁷ Seperti yang diceritakan oleh (1) *Mbah* Sunadi mantan simpatisan PKI asal Desa Sedadi Kecamatan Penawangan yang selamat dari pembantaian massal. (2) kakek penulis *Mbah* Sudarno (almarhum) ketika penulis masih kecil (tahun 1990-an)

¹⁸ Hal ini diungkap (lebih tepatnya diiyakan) oleh semua kiai yang penulis temui di berbagai kecamatan di Grobogan.

¹⁹ Ki Ageng Getas Pendowo dipercaya sebagai salah satu cucu Pangeran Kertabumi yang ketika menjadi raja bergelar Brawijaya V; Raja ke-11 Majapahit. Sedang Raden Patah adalah salah satu putra Brawijaya V. Jadi, Ki Ageng Getas Pendowo masih kemenakan Raden Patah; pendiri Kerajaan Islam Demak.

²⁰ Dahulu, suatu hari ada rombongan Pasukan Kerajaan Demak pulang dari Majapahit. Mereka membawa satu peti besar (grobog) berisi benda pusaka peninggalan Kerajaan Majapahit yang sedianya hendak dipindah ke Demak. Ketika rombongan tersebut melewati Sungai Serang, secara gaib seluruh benda pusaka lenyap. Untuk mengenangnya, daerah tersebut dinamakan Grobogan. Dan misteri hilangnya benda pusaka dari majapahit itu menjadi legenda hingga kini.

Sunan Kalijogo kepadanya lantaran menolak menjadi raja Kerajaan Islam Demak setelah Raden Patah dan Pati Unus mangkat.²¹

Sungai Serang yang menjadi pembatas dua daerah tersebut juga sarat legenda dan mitos. Ada kepercayaan di masyarakat sekitar sungai (dan Grobogan pada umumnya); jika ada tokoh nasional masih aktif menjabat (presiden, menteri dll), namun dalam mengemban amanah rakyat tidak jujur (KKN), maka jika ia melewati sungai ini, ia akan mati, bisa fisik ataupun jabatannya.²² Selain itu, hampir tiap tahun sungai ini meminta korban.²³

Karenanya, sejak dahulu, dua daerah berseberangan yang sebenarnya sangat dekat ini menjadi “jauh”. Masyarakat masing-masing daerah enggan melewati sungai ini. Penduduk bagian timur Sungai Serang, dahulu ketika mencari nafkah atau pekerjaan selalu ke timur, selatan atau utara. Sedangkan yang berada di sisi barat sungai, lebih nyaman jika ke barat atau selatan. Dalam hal belajar pun, pemuda timur sungai jarang yang ke barat. Begitu pula sebaliknya. Para santri dari barat sungai lebih suka *nyantri* di Demak, sedangkan yang berasal dari timur sungai sebagian besar *mengaji* ke Rembang, Kudus, Jepara dan Jawa Timur.

²¹ Utusan Kerajaan Demak yang dipimpin Sunan Kalijogo menemui, merayu dan meyakinkan Ki Getas Pendowo sampai lima kali agar bersedia menjadi Raja Demak; sebagai solusi dari polemik dan perebutan kekuasaan di Demak. Tetapi selalu ditolak. Getas (jawa) berarti *poklek* atau mudah patah. Yang dimaksud adalah kegagalan Sunan Kalijogo merayu. Sedang Pendowo berarti lima untuk mengenang lima kali perjalanan yang selalu gagal membawa hasil. Ki Ageng Getas Pendowo mempunyai putra bernama Ki Ageng Kenis yang kelak berputra Ki Ageng Selo yang terkenal kesaktiannya menangkap *bledeg* (petir). Ki Ageng Selo berputra Ki Pemanahan yang kelak menurunkan Sutowijaya; pendiri Mataram Islam yang keturunannya masih menjadi raja di Yogyakarta dan Solo hingga kini.

²² Biasanya jabatannya yang hilang. Sungai Serang, selain menjadi tempat *moksa* (hilang mendadak tak berbekas)nya benda pusaka Majapahit yang hendak di pindah ke Demak, juga dikenal menjadi saksi bisu *ajang* sumpah Nyi Ageng Serang yang merasa dihianati oleh Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono Pertama; pendiri Ngayogyakarta Hadiningrat; Yogyakarta) dan Raden Mas Sahid ketika melakukan perlawanan terhadap pendudukan Kongsi Dagang Belanda (VOC) di Bumi Mataram. Karena sakit hati, Nyai Ageng Serang mencabut keris pusakanya dan menggarisi Sungai Serang dari selatan ke utara. Ia bersumpah bahwa siapapun anak cucu yang menjadi pejabat namun korup, maka jika ia melintasi Sungai Serang, si pejabat akan kehilangan jabatan atau nyawanya. Legenda/mitos ini penulis dapat dari cerita turun temurun dari masyarakat penulis. Penulis sendiri lahir di kawasan Sungai Serang; yakni Desa Sedadi Kecamatan Penawangan. Karenanya, legenda ini merasuk hingga kedalam sanubari penulis. Hal yang wajar jika penulis sangat mempercayai legenda /mitos ini.

²³ Anehnya, yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berasal dari desa/daerah sekitar Sungai Serang

Begitu juga pelajar dan mahasiswa. Ntah ini terpikirkan atau tidak, banyak pelajar/mahasiswa dari timur sungai yang suka belajar di Jogja (Yogyakarta), Solo dan Kudus. Sedang pelajar/mahasiswa barat sungai "lebih tenang" jika menuntut ilmu ke Semarang. Prosentase pelajar/mahasiswa dari timur yang belajar di barat sangat sedikit, begitu pula sebaliknya.²⁴

Dalam dunia politik, juga kebetulan atau tidak, dua daerah ini selalu terjadi pembagian kekuasaan. Jika ketuanya dari daerah barat, maka sekretarisnya hampir bisa dipastikan dari timur, begitu pula sebaliknya. Partai-partai macam PDI-P, Golkar, PPP dan PKB yang merupakan partai besar di Grobogan, secara "alamiah" berbagi kekuasaan. Ketua Partai Golkar Icek Baskoro berasal dari Purwodadi (timur sungai), sedang sekretarisnya lahir, besar dan menetap di Penawangan (barat sungai). Begitu pula M Yaeni; ketua PDI-P adalah warga Purwodadi, disekretarisi oleh Agus Siswanto; orang Gubug (barat sungai). PKB dipimpin oleh Nurwibowo yang ber-KTP Tanggungharjo (barat sungai), Edi Maryono yang menjadi sekretarisnya berasal dari Purwodadi. Begitu pula PPP dipimpin M Misbah yang tinggal di Klambu (sebelah timur sungai), mempunyai sekretaris orang Gubug; Ali Farkan.

Yang unik, pada Pilkada tahun 2006, calon yang berasal dari satu wilayah (timur sungai) menang. Pasangan Agus – Bowo berasal dari timur dan barat. Agus dari timur sungai (Purwodadi), sedang Bowo di barat subgai (Tanggungharjo), Pasangan Bambang-Icek berasal dari satu wilayah. Bambang dari Tawangharjo (timur sungai), sedang Icek dari Purwodadi (juga timur sungai). Untuk Pasangan

²⁴ Hal ini penulis rasakan dan temui secara tidak sengaja ketika penulis harus ke Jogja dan Solo untuk konsolidasi organisasi Kemahasiswaan Daerah (Orda) se Jateng-DIY. Penulis pernah menjadi Presiden Ikatan Mahasiswa Purwodadi-Grobogan (IMPG) Cabang Semarang selama dua periode (2004-2006). Sisi lain, Penulis merasa kesulitan mencari mahasiswa dari daerah barat sungai ketika penulis harus sering ke Kudus dalam kapasitas penulis sebagai Koordinator BEM Jateng pada 2005 lalu.

Budi-Moko, Budi adalah orang Jakarta (barat sungai)²⁵ sedang Moko adalah Putra Toroh (timur sungai).

Daerah Grobogan memang masih kental nuansa mistisnya. Dipercaya banyak tempat ada karena perkara gaib. Kisah Ki Ageng Tarub yang menikah dengan Bidadari²⁶ misalnya, sampai kini masih dipercaya oleh Masyarakat Grobogan sebagai suatu kenyataan dan kebesaran Allah SWT. Begitu pula keengganan Ki Ageng Getas Pendowo (Ki Abdullah)²⁷ menjadi raja di Demak juga menjadi tanda tanya sendiri. Hal ini ditambah dengan kelegendaan Ki Ageng Selo yang mampu menangkap "petir" dan menjadi nenek moyang raja-raja di Yogyakarta dan Surakarta.²⁸ Selain tokoh, Grobogan juga meninggalkan legenda tempat. Ada Sendang Coyo yang dipercaya sebagai tempat mandinya para bidadari yang hingga kini dipercaya bisa membuat awet muda bagi yang mandi di sana. Pun pula Bledug Kuwu; suatu fenomena alam aneh. Adanya letupan-letupan lumpur yang airnya mengandung garam. Di situ dipercaya ada lubang yang menghubungkan daerah tersebut dengan Laut Selatan akibat perjalanan bawah tanah Joko Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamolan untuk bertemu dengan ayahnya Aji Saka.²⁹

Kisah Api Abadi di Mrapen Kecamatan Godong juga mempunyai legenda tersendiri, dimana dari tanah keluar api yang tidak padam hingga kini walau hujan

²⁵ Budi lahir dan besar di daerah Wirosari (sebelah timur sungai), tetapi sejak muda, "Ketua Paguyuban Masyarakat Purwodadi di Jakarta" ini meninggalkan daerah dan melanglang buana di Jakarta. Belum ada suatu kegiatan atau hal yang dilakukan Budi dalam rangka "menyatukan" dirinya dengan Grobogan. Ia secara hati dan jiwa lebih berjenis kelamin Jakarta dari pada Grobogan. Karenanya, penulis kategorikannya sebagai orang Jakarta (barat sungai).

²⁶ http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Ki_Ageng_Tarub. Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

²⁷ Menurut kisah, ibu Ki Getas Pendowo bernama Nawang Sih; putri Ki Ageng Tarub dengan istri Bidadari yang bernama Nawang Wulan yang dikemudian hari menjadi Nyai Ratu Kidul (penguasa Pantai Selatan). Sedang ayahnya bernama Bondan Kejawan; Putra Brawijaya V. lebih jelas lihat http://www.grobogan.com/?Wisata:Makam_K.A_Tarub dan http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Ki_Ageng_Tarub. Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

²⁸ http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Ki_Ageng_Sela Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

²⁹ http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Bledug_Kuwu. Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

menerpa. Api di sini sering diambil untuk menyalakan obor dalam kegiatan pesta olahraga (GANEFO maupun PON) dan untuk upacara Hari Waisak. Di sebelah Api Abadi, ada kolam yang selalu kelihatan mendidih namun tidak panas dan selalu berwarna kuning kecoklat-coklatan hingga sekarang. Di mana Sunan Kalijogo menunjukkan sebagian "keramat"-nya di sini. Selanjutnya pembuatan Keris Kiai Sangkelat yang legendaris juga dilakukan di sini.³⁰

Selain itu, Waduk Kedung Ombo yang sarat masalah juga ada di kabupaten ini selain sebagian daerah waduk masuk wilayah Kabupaten Boyolali dan Sragen.³¹ Ada juga sungai bawah tanah di Gua Urang di Tawangharjo yang sarat mistik.³² Juga daerah-daerah lain yang masih banyak. Grobogan bagai tempat bertemunya dua Kebudayaan Jawa (Pesisir-Islam dan Pedalaman-Abangan) yang sesungguhnya. Mungkin sedikit orang yang tau bahwa Ayah Mbah Hasyim Asy'ari (salah satu Pendiri NU) yakni Kiai Asy'ari berasal dari Grobogan, tepatnya Desa Ngroto Kecamatan Gubug.

Masyarakat Grobogan 98 % lebih Beragama Islam.³³ Namun Islam yang dianut adalah Islam yang berpadu dengan kepercayaan lokal Jawa (Islam Abangan/Kejawen). Ajaran agama seperti sholat, puasa dll mereka laksanakan, tetapi minum minuman keras juga menjadi kebiasaan. Dan ini menyebar ke hampir seluruh tempat di Grobogan. Meski demikian, penghargaan dan penghormatan terhadap tokoh agama (khususnya kiai) sangat besar.

Perekonomian

³⁰ http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Mrapen_Abadi. Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

³¹ http://www.grobogan.com/?Wisata:Kedung_Ombo Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

³² HTTP://WWW.GROBOGAN.COM/?WISATA:STALAKTIT_DAN_STALAKMIT Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

³³ Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2004*, Purwodadi: Bappeda Kabupaten Grobogan dan BPS Kabupaten Grobogan, 2005. hlm 24

Di Grobogan, Lapangan pekerjaan sangat sedikit, tidak menentu dan tidak (belum) bisa menampung jumlah tenaga kerja aktif. Masyarakat yang sebagian besar petani, banyak yang memanfaatkan waktu luang (saat menunggu panen dll) dengan merantau ke kota untuk menambah penghasilan. Sebagian besar menjadi buruh kasar (bangunan), tukang becak, penjual "makanan malam" (nasi goreng, bakmi dll). Sebagian lagi menggantungkan masa depannya dengan menjadi TKI atau TKW. Para pemuda yang tidak tertampung (tidak mendapatkan pekerjaan), memilih untuk merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan kota lainnya. Tak terkecuali kaum terdidiknya. Jalan yang rusak menjadi alasan lain kenapa banyak Penduduk Grobogan yang "tidak betah" di rumah.

Seperti diuraikan di atas, dibidang ekonomi, Sektor Pertanian masih sangat dominan dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB), yaitu sebesar 47,37%.³⁴ Sektor lain yang memberikan kontribusi/sumbangan cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Grobogan adalah sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,61%, sektor jasa-jasa sebesar 16,18%, sektor bangunan 5,11% dan sektor Keuangan, Persewaan dan Perusahaan sebesar 4,86%. Meski dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan, tetapi tidak terdapat perubahan yang berarti dalam struktur ekonomi di Kabupaten Grobogan. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang besar dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 5,62%. Sektor-sektor lain yang mengalami pertumbuhan cukup besar antara lain; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,16%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3,92%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,48%,

³⁴ http://grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=42. Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

sedangkan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang paling kecil, yaitu hanya sebesar 2,49%.³⁵

Data terakhir dari pemerintah memperlihatkan perekonomian Kabupaten Grobogan secara makro ditunjukkan oleh besarnya nilai dalam PDRB menurut harga berlaku adalah 2.418,069 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan sebesar 798,159 milyar rupiah. Selama kurun waktu 11 tahun terakhir, PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga berlaku, mengalami kenaikan sekitar 3,40 kali. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 1,22 kali.³⁶

Setidaknya, ada 10 potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Grobogan, yakni;

1. Perdagangan; sarana pasar hasil bumi, supermarket, hotel dan restoran.
2. Industri; pengolahan hasil pertanian, pakan ternak, industri semen, genteng dan mebel
3. Transportasi; sarana angkutan hasil bumi, sarana angkutan transportasi/ penumpang AKAP dan AKDP.
4. Pertanian tanaman pangan; padi, jagung, kedelai dan kacang hijau.
5. Perkebunan; kelapa dan kapas
6. Peternakan; sapi potong, kambing, ayam buras, itik, sarang burung walet, paha katak.
7. Perikanan; lele dumbo, nila dan kaper
8. Pertambangan; galian tanah liat, galian pasir, galian batu, galian batu kapur, garam bledug kuwu.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

9. Pariwisata; Waduk Kedungombo, Bledug kuwu dan Agrowisata serta usaha penunjang pariwisata. Dan terakhir
10. Kehutanan; Kayu glondongan dan pengolahan kayu, baik dari hasil hutan rakyat maupun hasil hutan milik perhutani (negara).³⁷

B. Regulasi Pilkada Pasca Reformasi.

Pilkada adalah sebutan atau kependekan dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sampai saat ini, Regulasi Pilkada masih akan mengalami perubahan. Hal ini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Indonesia yang hingga kini belum stabil. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kabupaten Grobogan akan selalu mengikuti alur Regulasi Pilkada, sebagaimana mayoritas daerah lain di Nusantara.

Sebelum mengarah ke Regulasi Pilkada, ada baiknya jika kita mengetahui Hierarki atau urutan tata perundang-undangan Negara kita Republik Indonesia. Hierarki diadakan dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kedudukan perundang-undangan yang lebih tinggi mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi pula. Berikut ini adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1. UUD 1945.³⁸

³⁷ http://grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=42. Diakses pada Hari Kamis, 3 Juli 2008.

³⁸ UUD 1945 (UUD '45) merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan di Negara kita. UUD '45 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Naskah resmi UUD '45 adalah: Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi. Pasca Reformasi, Naskah UUD '45 telah empat kali mengalami perubahan. Yakni pada saat Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Kemudian pada Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, UUD '45 ditetapkan dalam satu naskah dan dinyatakan sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. Perubahan ini juga menjadikan MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dengan demikian

2. Undang-Undang (UU).³⁹
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).⁴⁰
4. Peraturan Pemerintah (PP).⁴¹
5. Peraturan Presiden (Perpres).⁴²
6. Peraturan Daerah⁴³ (Perda⁴⁴).⁴⁵

Regulasi “Pilkada”, kali pertama diatur dalam UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu.⁴⁶ Kemudian, mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999, dimana DPRD mempunyai kewenangan sangat besar sebagai penentu.⁴⁷

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), UU di atas dirasa agak usang

MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Lebih jelas, lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia. Diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2008.

³⁹ Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (pusat) dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan Undang-Undang adalah; (1) Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. (2) Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Lebih jelas lihat: <http://id.wikipedia.>, *Ibid*.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Lebih jelas lihat: <http://id.wikipedia.>, *Ibid*.

⁴¹ Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. lihat; <http://id.wikipedia.>, *Ibid*.

⁴² Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Lebih jelas lihat; <http://id.wikipedia.>, *Ibid*.

⁴³ Termasuk Perda adalah "Qanun" yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta "Perdatus" dan "Perdasi" yang berlaku di Provinsi Papua.

⁴⁴ Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih jelas lihat; <http://id.wikipedia.>, *Op. cit*.

⁴⁵ Dari semua Peraturan Perundang-undangan di atas, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Lebih jelas lihat; <http://id.wikipedia.>, *Ibid*.

⁴⁶ <http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/01/prn,20040401-18,id.html> diakses pada hari Selasa, 1 April 2008.

⁴⁷ Moch Nurhasim (ed), *Konflik Antarelit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 3,

dan perlu dirubah. Sebagai ganti, maka dikeluarkanlah UU RI No. 4 Tahun 2000 yang disahkan cucu pendiri NU ini pada 7 Juni 2000.⁴⁸

Sedangkan Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada 15 Oktober 2004.⁴⁹ Di sini, ditetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini kemudian diganti oleh perundang-undangan yang lebih rendah yakni Peraturan Pemerintah, tepatnya PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Hal ini dilakukan karena dampak dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. "Rakyat" juga menghendaki, pemilihan gubernur, bupati maupun walikota juga dilaksanakan seperti Pilpres. Dampak dari pengesahan PP di atas adalah pada tahun 2005, Pilkada sudah bisa dilaksanakan. Dan pada tanggal 1 April 2005 bertempat di Kota Jayapura, Pilkada kali pertama digelar di Bumi Nusantara.⁵⁰ Saat itu, Pilkada masih terpisah dari Pemilu. Baru tahun 2007, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam peraturan yang disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi berganti menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan, Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia. Diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2008.

⁵⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada_2005. Diakses pada hari Rabu, 2 April 2008.

⁵¹ <http://id.wikipedia>. *Ibid.*

Dengan demikian, maka Pilkada secara sah, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mendapat pengawasan legal dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).⁵² Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam pula, peserta Pilkada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal.

Dalam perjalanannya, PP No 6 Tahun 2005 di rasa terlalu tergesa-gesa dan kejar target, untuk itu maka PP di atas mengalami pembaharuan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 sebagai solusi atas PP di atas.⁵³ Sedangkan dalam kategori Perpu, Presiden pada 19 Oktober 2005 mengeluarkan UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 tahun 2005. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini dibuat guna memberi jalan jika nantinya ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang yang baru.⁵⁴

Dengan demikian, secara garis besar, ada Empat Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia yakni (1) Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintahan Daerah, (2) peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (3) Undang-Undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah dan (4) PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang

⁵² http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Kepala_Daerah_dan_Wakil_Kepala_Daerah Diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2008.

⁵³ http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Pilkada&op=detail_hukum_Pilkada&id=6. Diakses pada Diakses pada hari Selasa, 1 April 2008.

⁵⁴ <http://www.depdagri>. *Ibid.*

PERPU NO 3 TAHUN 2005 yang membahas tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi undang-undang.⁵⁵

C. Peta Pilkada di Grobogan Tahun 2006.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di Kabupaten Grobogan, diselenggarakan pada 29 Januari 2006. Seperti dikemukakan di atas, tercatat, tiga pasang calon, yakni Pasangan H Agus Supriyanto SE - Ir H Muhammad NurwiBowo (Agus-Bowo), Pasangan H Bambang Pudjiono SH - H Icek Baskoro SH (Bambang-Icek) dan terakhir Pasangan Bambang Budisatyo SH MM - H Mokhammad Suratmoko (Budi-Moko) yang meramaikan Pilkada langsung ke- 214 di seluruh Indonesia ini.⁵⁶ Mereka berlomba memperebutkan 980.262 pemilih.⁵⁷

Pasangan Agus-Bowo menempati nomor urut pertama, disusul kemudian Pasangan Bambang-Icek di urutan ke-2 dan nomor urut ke-3 di tempati oleh Pasangan Budi-Moko. Ketiga calon memperebutkan 980.262 pemilih yang tersebar di 19 kecamatan dan terbagi atas 273 Desa dan 7 Kelurahan.

Pasangan Agus-Bowo (A-B) diusung oleh PDI-P, PPP, PAN dan PKB (*de facto*).⁵⁸ Pada Pemilu legislatif 2004, Gabungan keempat partai yang mendukung Pasangan Agus-Bowo didukung oleh sekitar 61,34 % pemilih dengan perolehan dewan sebanyak 31 (68,89%) dari 45 anggota wakil rakyat yang ada di Grobogan. Angka di atas

⁵⁵ <http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Pilkada> Diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2008.

⁵⁶ Pilkada kali pertama diadakan di Kota Jayapura pada 1 April 2005. Pilkada terakhir Sebelum Kabupaten Grobogan, adalah Kota Batam, tepatnya pada 21 Januari 2006. Urutan ke-214 Dihitung secara manual oleh penulis berdasarkan Data dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada_2005 dan http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Daerah_dan_Wakil_Kepala_Daerah_2006. Diakses pada hari Senin, 21 Januari 2008

⁵⁷ Data dari KPUD Grobogan pada 27 Desember 2005. Angka 980.262 adalah suara rakyat yang berhak memilih, tapi pada kenyataannya, hanya 686.451 (70,03 %) pemilih saja yang menggunakan hak pilihnya. Sedang yang 293.811 (29,97 %) suara tidak memilih. Data ini penulis peroleh dari KPUD Grobogan pada 24 Februari 2006.

⁵⁸ PKB saat itu dibekukan dan urung pro aktif dalam Pilkada, karena konflik internal (imbas dari konflik Gus Dur-Muhaimin dengan Alwi Sihab-Syaifullah Yusuf). Namun secara *de facto*, partai ini mendukung Ir H Muhammad Nurwibowo. Hal ini bisa dilihat dengan hadirnya Yenny Wahid dalam kampanye kemenangan Pasangan Agus-Bowo di Desa Depok Kecamatan Toroh. Juga, pada Konfercablub DPC PKB, pria asli Sugihmanik, Tanggunharjo ini terpilih menjadi Ketua Tanfid PKB Grobogan Periode 2006-2011

hasil rincian dari; PDI-P 250.639 pendukung (36,42 %) dengan perolehan 17 kursi, PPP 5 kursi dengan 40.065 suara (5,82 % legislatif), PAN dengan 2 kursi atau 21.431 suara, dan PKB 103.710 suara (15,52 %) dengan 7 anggota dewan.

Agus adalah Cabub Incumbent. Bisa dikata, ia merupakan representasi dari "Kaum Abangan-Nasionalis"⁵⁹ yang sampai saat ini mayoritas di Grobogan. Pasangan Agus; yakni Bowo bisa dikata merupakan representasi dari "Kaum Sarungan" yang agamis. Di Grobogan, kaum sarungan bisa dikata menjadi golongan terbesar kedua dibawah masyarakat abangan. Saat itu, Bowo di menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan. Oleh banyak pengamat, pasangan ini diyakini akan menang mudah. Karena selain didukung dua golongan mayoritas (abangan dan sarungan), mereka juga dimanja jaringan birokrasi, kiai, uang dan kesempatan.

Untuk menyukseskan pasangan ini, Tim Sukes A-B (begitu mereka sering disebut) menghadirkan banyak tokoh nasional. Ada Cahyo Kumolo (Ketua Fraksi PDI-P DPR RI), Soetrisno Bachir (Ketua Umum DPP PAN), Yenni Wahid (Putri Gus Dur – Sekjend DPP PKB -versi Gus Dur-Ali Maskur Musa- sekarang), Dede Yusuf (Bintang film, anggota DPR RI dari PAN – Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang), Marrisa Haque, Silvana Herman dan lain sebagainya. Selain itu, setiap pagi, saat musim kampanye, mereka adalah satu-satunya calon yang memakai jasa Televisi Nasional SCTV untuk kampanye. Data survei dari PDI-P pra Pilkada, menyatakan bahwa Pasangan Agus-Bowo (minimal) telah mempunyai suara 31 % suara,⁶⁰ Bambang-Icek mendapat 23 %, sedang Budi-Moko kebagian 12 % suara.

Pasangan Nomor 2; Pasangan H Bambang Pudjiono SH - H Icek Baskoro SH (Bambang-Icek -BI-) diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Sebelum memilih

⁵⁹ Dahulu, Kaum Abangan identik dengan PKI dan Kaum Nasionalis lebih mendekat ke PNI. Namun setelah PKI diberangus, Kaum Abangan meleburkan diri dengan Kaum Nasionalis.

⁶⁰ Hal ini dinyatakan oleh Cahyo Kumolo; Ketua Fraksi PDI-P DPR RI, lebih jelas lihat; Afrosin Arif dan Respati, "Mengawal Demokrasi, Dinamika Pilkada Grobogan", hlm. 137

calon, Golkar menyelenggarakan konvensi. Bambang memenangkan konvensi, kemudian jebolan Fakultas Hukum UNDIP ini menggandeng Ketua Umum DPC Partai Golongan Karya H Icek Baskoro SH sebagai pasangannya diposisi Calon Wakil Bupati. Kuota suara Golkar pada Pemilu legislatif 2004 yang mencapai 108.986 suara (15,83 %) ⁶¹ dengan 8 anggota dewan, cukup untuk memenuhi syarat minimal mencalonkan bupati dan wakil bupati.

Dalam perjalanannya, B-I mendapatkan dukungan dari 11 partai politik yang tidak mempunyai kursi dan tidak masuk dalam "Koalisi Pembaharuan Grobogan". Partai-partai tersebut adalah Partai Merdeka, Partai Pelopor, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PNU), Partai Patriot Pancasila, Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI). 11 partai ini "hanya" mempunyai 53.387 suara.

Posisi Bambang saat itu adalah Wakil Bupati. Bambang menolak tawaran Agus untuk menjadi Wakil Bupati kali kedua. Sebenarnya pria berpenampilan kalem ini bersedia dijadikan wakil Agus kali kedua, tetapi setelah meminta doa restu kepada mursyidnya (*Mbah Salman Popongan*), Bambang malah dianjurkan untuk mencalonkan sendiri, bukan sebagai wakil, melainkan sebagai bupati. Bambang melaksanakan anjuran guru spiritualnya tersebut. ⁶² Selain Wakil Bupati, Bambang juga menjadi Ketua Umum GP Ansor Cabang Grobogan periode 2001-2006. Sedang wakil Bambang; Icek, saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 154

⁶² Seperti yang diceritakan Bambang kepada penulis pada pertengahan Nopember 2005.

Calon berikutnya adalah Pasangan Budi-Moko. Pasangan nomor urut 3 yang menyatakan diri sebagai calon "Kambing Hitam"⁶³ ini didukung tujuh partai. yakni Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI M).⁶⁴ Ketujuh partai ini membentuk "*Koalisi Pembaharuan Grobogan*"⁶⁵ yang bersemangat mendengarkan perubahan dan kejayaan Grobogan serta yakin menang.

Pada Pemilu legislatif 2004, Ketujuh partai pendukung Pasangan Budi-Moko ini diminati 109.960 pemilih (19,41 %). Suara itu masing-masing dari Partai Demokrat 45.060 pemilih / 6,55 % (4 kursi), PNBK 32.185 suara / 4,68 % (2 kursi), PBB 8.272 suara (1,20 %), PPDI 5.981 suara (0,87%), PKPB 6.876 suara (0,99 %), PDS 1.464 suara (0,21 %), PNI Marhaenisme 4.166 suara (0,61 %). Dalam perjalanannya, *Koalisi Pembaharuan Grobogan* mendapat dukungan dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Namun, PBSD hanya partai dengan pendukung sedikit (5.956 suara) dan tidak mempunyai kursi. Dihari kemudian, partai ini dieliminasi KPUD karena tidak memenuhi syarat, karena kepengurusannya tidak diakui oleh DPD PBSD Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, para personil PBSD tetap menggabungkan diri dalam koalisi ini.

Budi adalah putra daerah, namun sejak muda telah merantau ke Jakarta. Calon ini kurang begitu dikenal masyarakat, karena intensitasnya di Grobogan kurang. Sedang Moko adalah mantan pejabat pemerintah daerah yang karena beberapa alasan "dibuang" oleh Agus. Pada Pemilu legislatif 2004, Moko yang sakit hati memimpin Partai Demokrat Cabang Grobogan. Di bawah kepemimpinannya yang ditunjang popularitas SBY di tingkat nasional, Partai Demokrat di Grobogan mampu menduduki posisi empat, dibawah

⁶³ Sebutan "Kambing Hitam" ini dilontarkan sendiri oleh Budisatyo saat menjadi pembicara dalam jumpa Ikatan Masyarakat Purwodadi di Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan pada 27 September 2005.

⁶⁴ Data disarikan dari "*Data dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2006*", KPU Kabupaten Grobogan, hlm. 12-13

⁶⁵ Afrosin dan Respati, *Loc.cit*, Hlm. 74

PDI-P, Golkar dan PKB. Meski demikian, karena aturan Dapil (daerah pemilihan), partai ini lebih sedikit wakilnya dibanding PPP yang mempunyai 5 kursi.

Pada Pilkada Langsung ini kali, ke-3 calon memperebutkan total 980.262 suara Rakyat Grobogan yang mempunyai hak suara dan terdaftar di KPUD Grobogan. Dari suara di atas, hanya 686.451 orang (70,03%) yang menggunakan suaranya untuk memilih calon pimpinan mereka lima tahun kedepan. Dan, dari 686.451 suara, tercatat 664.599 suara yang sah.⁶⁶ Pasangan Agus-Bowo memperoleh 261.544 (39,35 %) suara. Pasangan Bambang-Icek mendapat 297.777 (44,81%) dukungan, dan "kuda hitam" Budi-Moko diminati 105.278 (15,84%) pemilih.⁶⁷

Pasangan Agus-Bowo menang di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Brati (dengan 11.244 suara), Geyer (15.265 suara) , Gubug (17.984 suara), Kedungjati (12.031 suara), Ngaringan (15.274 suara), Tegowanu (11.480 suara) dan Tanggunharjo (13.487 suara). Sedang di 11 kecamatan lainnya, mereka berada di posisi ke dua, dengan perolehan suara sebagai berikut; Kecamatan Gabus dengan 10.814 suara, Godong (13.355 suara), Karangrayung (15.811 suara), Klambu (6.426 suara), Kradenan (17.233 suara), Penawangan, (10.108 suara), Pulokulon (20.548 suara), Purwodadi (18.624 suara), Tawangharjo (7.588 suara), Toroh (19.655 suara), dan Wirosari (16.273 suara). Di Kecamatan Grobogan, Pasangan ini berada diposisi terbawah dengan perolehan 8.344 suara.

Sementara Pasangan Bambang-Icek memperoleh kemenangan di 12 kecamatan yakni Kecamatan Gabus dengan 15.734 suara, Godong (18.830 suara), Grobogan (16.371 suara), Karangrayung (21.146 suara), Klambu (8.627 suara), Kradenan (17.990 suara), Penawangan, (16.111 suara), Pulokulon (23.688 suara), Purwodadi (29.083 suara), Tawangharjo (15.356 suara), Toroh (23.658 suara), dan Wirosari (20.029 suara).

⁶⁶ Data penulis dapat dari KPUD Grobogan berbentuk file pada Senin, 4 Februari 2008

⁶⁷ Data dari KPUD Grobogan, diperoleh pada hari Rabu, 2 April 2008

Sementara di tujuh kecamatan lain, Pasangan B-I mantap di urutan kedua. Kecamatan itu adalah Kecamatan Brati (dengan 9.356 suara), Geyer (12.927 suara), Gubug (13.953 suara), Kedungjati (6.628 suara), Ngaringan (13.003 suara), Tegowanu (9.935 suara) dan Tanggunharjo (5.353 suara).

Untuk Pasangan Calon Budi-Moko, mereka kalah di semua kecamatan dan hanya memperoleh posisi *runner up* di Kecamatan Grobogan dengan pendukung 10.422 suara. 18 kecamatan itu adalah Kecamatan Brati dengan 3.428 suara, Gabus (8.260 suara), Geyer (4.906 suara), Godong (5.695 suara), Gubug (3.592 suara), Karangrayung (3.816 suara), Kedungjati (2.366 suara), Klambu (1.023 suara), Kradenan (3.910 suara), Ngaringan (4.067 suara), Penawangan (4.314 suara), Pulokulon (7.567 suara), Purwodadi (16.168 suara), Tanggunharjo (1.194 suara), Tawangharjo (3.464 suara), Tegowanu (2.152 suara), Toroh (10.698 suara) dan Wirosari (7.236 suara). Di tingkat desa, pasangan ini hanya menang di lima desa diantara 280 desa di Grobogan. Kelima desa itu adalah Desa Kedung Rejo (Purwodadi), Suwatu (Gabus), Tegal Sumur, Lebeng Jumuk dan Desa Sedayu (Grobogan).⁶⁸

⁶⁸ Diolah dari data KPUD Grobogan, diperoleh pada hari Rabu, 2 April 2008.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DIVERSIFIKASI PILIHAN

POLITIK KIAI DALAM PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN

GROBOGAN TAHUN 2006

A. Latar Belakang dan Motivasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada 2006 di Grobogan

Mayoritas masyarakat Grobogan adalah pemeluk Islam, namun mereka juga sangat memegang teguh adat dan budaya Jawa.¹ Perpaduan Islam dengan kearifan budaya lokal (*lokal wisdom*) tersebut, pada gilirannya sangat berpengaruh pada pilihan politik di kemudian hari.

Secara politik, masyarakat Grobogan umumnya memilih partai yang dianggap pro rakyat miskin dan petani, sesuai dengan latar belakangnya sebagai masyarakat agraris.² Pada Pemilu tahun 1955, Grobogan dipandang sebagai salah satu basis utama PKI (Partai Komunis Indonesia). Di Pemilu kali pertama dalam sejarah Indonesia ini, suara PKI hingga 43,60 %. Sementara PNI yang dipimpin Soekarno hanya mampu meraih 21,5 % suara.³ Hal ini seakan menegaskan Grobogan sebagai kota yang didominasi oleh kaum abangan (PKI) dan nasionalis (PNI).⁴

Pada masa Orde Baru (Orba) berkuasa, PKI dilarang dan PNI dibonsai. Hampir seluruh wilayah Grobogan, selama Pemilu 1971-1997, pilihan politik mayoritas masyarakat adalah Golkar. Pada era inilah, semua kebijakan (*policy*) di *dropping* dari

¹ Perpaduan antara Agama Islam dengan Aliran Kepercayaan Animisme-Dinamisme dan Agama Hindu-Budha.

² Afrosin Arif dan Respati, *Mengawal Demokrasi: Dinamika Pilkada Kabupaten Grobogan*, Solo: ISKRA Publisher, 2006, hlm. 150

³ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/20/pem5.htm>. diakses pada hari Jum'at, 19 Oktober 2007. Pada tahun 1960-an, anggota PKI meningkat pesat. Bisa dibayangkan, 700-800 dari 1000 rakyat Grobogan adalah simpatisan PKI. (Diskusi dengan Mbah Sunadi, tokoh PKI di Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan).

⁴ Dilihat dari konteks lokalitas Grobogan, penulis lebih sepakat jika pra pembantaian PKI, Kaum Abangan identik dengan PKI, sedang Nasionalis adalah sebutan bagi pendukung fanatik PNI.

pusat, sementara daerah adalah pelaksana. Golkar dan militer menjadi penguasa, dengan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada saat itu, Grobogan, yang mayoritas masyarakatnya adalah kaum abangan-nasionalis dan agamis, tidak simpatik kepada pemerintah pusat. Namun di sisi lain, pilihan politik yang dipilih mayoritas masyarakat adalah Golkar; sebuah partai politik lain khas Indonesia⁵ yang menjadi pendukung sekaligus alat untuk melanggengkan dominasi pemerintahan Orde Baru.

Soal kepemimpinan, sejak pertama kali didirikan pada 1726 M hingga tahun 2001, Grobogan tidak pernah dipimpin oleh putera daerah. Bupati pertama adalah Adipati Martopuro (Adipati Puger). Sementara pada era reformasi hingga tahun 2001, kepemimpinan Grobogan dipegang oleh Kolonel Inf. Toermudi Soewito.⁶

1. Bergesernya Peta Politik

Tahun 1998, kekuatan reformasi menumbangkan rezim Orde Baru. Banyak warga Negara termasuk masyarakat Grobogan, berharap adanya perubahan pola pemerintahan dan kepemimpinan dari yang totaliter ke partisipatoris, dari era tertutup menjadi era keterbukaan. Harapan agar tercipta perubahan besar termasuk di daerah, ini dipicu lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1999.

Adanya otonomi daerah dan era keterbukaan ini, membuat banyak pihak yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan bangsa, tak terkecuali kiai. Tetapi yang muncul kemudian adalah liberalisasi politik, yang ditandai dengan munculnya 48 partai peserta Pemilu. Multipartai yang ada itu, tak urung mengubah peta politik di Grobogan.

⁵ Golkar mengklaim diri bukan sebagai partai politik, namun sebuah golongan. Akan tetapi mereka diijinkan mengikuti Pemilu layaknya partai politik

⁶ http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Diakses pada hari Rabu, 28 Maret 2007.

Jika saat Orde Baru berkuasa kiai lebih banyak memilih PPP atau Golkar sebagai pilihan politik,⁷ pada Pemilu 1999, minimal ada 10 partai baru berasaskan Islam yang bisa menjadi pilhan. Partai-partai tersebut adalah Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Masyumi Baru, Partai Syarikat Islam (PSI), PSI 1905, Partai Politik Islam Masyumi (PPIM), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdlatul Umat (PNU) dan Partai Persatuan.⁸

Selain partai di atas, ada PKB yang mengklaim sebagai partai warga Nahdliyin dan PAN sebagai partai dari kelompok Muhammadiyah.⁹ Tetapi dalam kenyataannya, dari ke-13 partai di atas, PKB, PPP dan PAN lah yang diminati masyarakat Grobogan. Sementara 10 partai lainnya menjadi partai minoritas. Bisa dibandingkan, PBB hanya mampu mendulang 3.187. PKB 128.016 suara, PPP 45.776 suara dan PAN 17.803 suara.¹⁰

Meski memperoleh suara yang cukup signifikan, tetapi partai-partai politik berasaskan Islam di atas masih kalah dengan partai "kaum abangan-nasionalis". Megawati Soekarnoputri dengan PDI-Perjuangan, memperoleh suara yang cukup besar di hampir semua kota di Indonesia. Pada Pemilu 1999, di 19 kecamatan di Grobogan, hanya Kecamatan Tanggunharjo yang gagal dimerahkan Kaum Abangan-Nasionalis dan menjadi "milik" PKB. Meski demikian, selisih suara mereka sedikit. PDI-P memperoleh 6.762 suara sedang PKB mendapat 7.470 suara.¹¹

⁷ Hampir tidak ada kiai di Grobogan yang menyalurkan aspirasinya ke PDI-P. Pilihannya adalah PPP atau Golkar. Jika golput, kiai bisa didakwa sebagai sisa-sisa PKI dan stigma lain yang menyudutkan. (Wawancara dengan Kiai Addi Ilahuda, Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Sabtu, 10 Nopember 2007).

⁸ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 56-57

⁹ PKB dan PAN memang bukan partai berideologi Islam, tetapi mayoritas pemilih mereka adalah muslim. Banyak simpatisan dari kedua partai ini tidak "mengetahui" ideologi ke dua partai ini. Mereka hanya melihat secara nasional bahwa PKB adalah rumah paling cocok bagi komunitas NU dan PAN adalah representasi dari Muhammadiyah. Karenanya, dengan berbagai pertimbangan, penulis memasukkan kedua partai ini ke dalam kelompok partai berideologi "Islam".

¹⁰ Diolah dari data KPUD Grobogan (data berbentuk file)

¹¹ *Ibid.*

Pada Pemilu 1999, Dari 40 kursi dewan yang diperbutkan oleh 48 partai, PDI-P mampu memikat hati 305.177 rakyat dan mendudukkan 19 kadernya. Bandingkan dengan urutan kedua; PKB yang “hanya” memperoleh 8 kursi. Kursi dewan lainnya direbut oleh PPP (3 kursi), dan Golkar (6 kursi). Sementara PAN, PNI Front Marhaen, PNI Massa Marhaen dan PBB masing-masing mendapatkan 1 kursi.

Dengan begitu, “kiai” mempunyai 13 wakil di legislatif dari “partai-partai Islam”, terdiri dari PKB, PPP, PAN dan PBB. Ini jauh di bawah Kaum Abangan-Nasionalis yang memperoleh 21 kursi, yang terdiri dari PDI-P, PNI FM dan PNI MM. Sedang “Kaum Priyayi” hanya memperoleh 6 kursi melalui Golkar sebagai kendaraan politiknya. Dominasi PDI-P akhirnya mengantarkan Agus Supriyanto sebagai Bupati Grobogan periode 2001-2006 berdampingan dengan Bambang Pudjiono (jago dari PKB) sebagai wakilnya.

PDI-P dan PKB yang secara kultur berbeda, dinilai masyarakat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan. Agus-Bambang juga dinilai masyarakat kurang bisa bekerjasama. Agus dianggap terlalu arogan dan korup. Pergantian atau mutasi kepala instansi, kenaikan pangkat hingga penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga sarat dengan isu suap (uang pelicin). Selain itu, yang paling ironis adalah ia pernah tertangkap basah adu jago di Blora dan Sragen.¹² Pecinta benda-benda bertuah itu juga “terkena” kasus *illegal logging* dan buku ajar yang sampai kini masih belum tuntas. Selain itu, Agus juga disinyalir hanya menjadi boneka mainan seorang pengusaha Beras di Grobogan, yaitu Jhony Chino.¹³

¹² Hasil diskusi dengan Mbah Munir, Ngroto-Gubug (Minggu, 1 Juni 2008), Kiai Syafak Ngambak Rejo-Tanggunharjo (Senin, 2 Juni 2008), Kiai Rohib Soemowijoyo al-Hafidz (Sabtu, 31 Mei 2008), Amin Fauzi, Dusun Pilang Kidul-Gubug (27 Desember 2007), Kiai Sya'roni (Ketua PPP Cab. Grobogan tahun 1999–2004) Gubug (Selasa, 3 Juni 2008).

¹³ Jhoni diyakini sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap keluar-masuknya uang dari berbagai proyek, baik proyek pembangunan maupun promosi jabatan di Grobogan. Pengusaha beras ini disebut-sebut satu-satunya orang mampu mengendalikan Agus.

Sementara Bambang Pujiono yang menduduki posisi Wakil Bupati, dalam masalah kebijakan, seringkali kurang dilibatkan dan cenderung mudzlim (terdzolimi). Ini menjadikan pembangunan di Grobogan semakin stagnan (*mandeg*). Bambang hanya dilibatkan dalam acara-acara seremonial.¹⁴

Kepemimpinan Agus-Bambang yang kurang harmonis dan dibarengi dengan tidak seimbang nya pembagian otoritas keduanya terdengar luas di masyarakat. Di sela-sela kerja simbolis yang dilakoni, Bambang banyak menghabiskan waktu bergumul dan bersilaturahmi ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Bambang dikenal dekat dengan kalangan Muhammadiyah dan NU. Bambang sendiri besar di lingkungan NU. Mantan Mantri Polisi Penawangan ini juga mem-*back up* pembangunan Gedung NU Cabang Grobogan yang berada di Jagalan. Selain itu, Bambang menjadi ketua GP Ansor cabang Grobogan periode 2001-2006, setelah sebelumnya aktif di Banser. Ia juga aktif di Tarekat *al-Su'biyah al-Nahdliyah* Cabang Grobogan, jama'ah tarekat yang berada di bawah naungan NU.

Sejak pertengahan 1996-an, Bambang tercatat sebagai salah satu murid Tarekat KH Salman Dalawi al-Hafidz Popongan (Solo), mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddadiyah kholidiyah yang juga pengasuh pondok pesantren Al-Manshur, Popongan, Tegalondo, Delanggu, Klaten. Di Grobogan sendiri, *Mbah* Salman memiliki tidak kurang dari 73.000 santri tarekat dengan 43 *badal* (asisten/guru pengganti).¹⁵

2. Stagnasi Peta Politik

¹⁴ Seperti yang diungkapkan Bambang disela-sela audiensi IMPG denganya pada hari Rabu, 12 Oktober 2005

¹⁵ Wawancara dengan *Mbah* Muslimin, salah satu *badal* wilayah Wirosari di kediaman beliau; Jalan Gajah Mada - Wirosari pada hari Jum'at 30 Mei 2008

Secara umum, pada Pemilu 2004, kekuatan dan peta politik tidak berubah. Namun perubahan sistem dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka, membagi Grobogan menjadi 5 Daerah Pemilihan (DP). Jumlah kursi juga mengalami penambahan. Jika pada Pemilu 1999 ada 40 kursi yang diperebutkan, pada Pemilu 2004, bertambah menjadi 45 kursi. Sistem ini berdampak pada perolehan kursi partai di parlemen. PBB, PNI FM dan PNI MM gagal mendapatkan kursi. PAN yang pada 2004 mendapatkan 17.803 suara, naik menjadi 21.431 suara dan menambah kursinya dari 1 menjadi 2. Perolehan suara Partai Golkar juga meningkat, dari 103.103 menjadi 108.986 suara, sehingga kursinya bertambah dari 6 menjadi 8, menduduki posisi *runner up* di bawah PDI-P dan menggeser PKB.

PDI-P, masih menjadi partai mayoritas, namun mengalami penurunan kursi. Mereka kehilangan 2 kursi menjadi 17 kursi. Tahun 1999 PDI-P memperoleh 305.177 suara, tetapi pada Pemilu 2004 hanya mampu mendulang 250.639 suara. PKB pun mengalami kemunduran. Pemilu 1999, PKB memperoleh 128.016 suara, dan pada Pemilu 2004, hanya dipilih oleh 103.710 simpatisan. Kursinya juga berkurang dari 8 menjadi 7. Kondisi ini tak terlepas dari konflik di tingkat elit PKB yaitu antara Gus Dur dengan Matori Abdul Djali. PPP, dari 45.776 suara menjadi 40.065 suara, namun partai berlambang Ka'bah ini anggota dewannya bertambah dari 3 menjadi 5 kursi.

Pemilu 2004, 24 partai bersaing memperebutkan 45 anggota legislatif. Pada Pemilu ini, kekuatan baru muncul, yaitu Partai Demokrat, yang langsung menempati posisi ke-4 dengan mengantongi 45.060 suara sehingga berhak atas 4 kursi legislatif, berada di bawah PDI-P, Partai Golkar dan PKB. Perolehan suara Partai Demokrat lebih tinggi dibanding PPP, tetapi perolehan kursinya lebih sedikit 1 kursi. Selain itu, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) memperoleh 32.185 pendukung dan mendapat 2 kursi. Ke-45 kursi dikuasai oleh masing-masing PDI-P (17 kursi), Golkar

(8 kursi), PKB (7 kursi), PPP (5 kursi), Partai Demokrat (4 kursi), PAN (2 kursi) dan PNBK (2 kursi). Dengan demikian, "partai kiai" di Grobogan yang bersumber dari PKB, PPP dan PAN memperoleh 14 kursi.

3. Pilpres Memecah "Partai Kiai"

Pemilu Legislatif 2004 berlangsung pada 5 April, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres). Ini adalah Pilpres yang untuk pertama kalinya secara langsung di Indonesia.

Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk mencalonkan kandidat Presiden/Wakil Presiden. Syarat tersebut adalah adanya dukungan suara legislatif minimal 3 % pada Pemilu Legislatif 2004. akhirnya, ada 5 pasangan calon yang muncul untuk dipilih 153.320.544 pemilih yang terdaftar di KPU Pusat.¹⁶ Calon tersebut adalah H. Wiranto SH - Ir. H Salahuddin Wahid (Partai Golkar), Megawati Soekarnoputri - KH A. Hasyim Muzadi (PDI-P), Prof. Dr. HM. Amien Rais - Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (PAN), H. Susilo Bambang Yudhoyono - Drs. H. M. Jusuf Kalla (Partai Demokrat), serta Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar M. Sc. (PPP, Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia dan PBB).¹⁷

Dampaknya, partai kiai di Grobogan pecah. PAN membela Amien-Siswono, PPP mendukung Hamzah-Agum. PKB yang tadinya hendak mencalonkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) - Marwah Daud Ibrahim namun dianggap tidak memenuhi syarat dalam tes kesehatan yang ditetapkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), mengakibatkan suara PKB pecah. Sebagian mendukung Wiranto-Salahuddin, tetapi sebagian yang lain mendukung Mega-Hasyim.¹⁸

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_2004 dan http://www.kpu.go.id/peraturan_uu/Keppres.htm diakses pada hari Rabu, 16 Januari 2007

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Solahudin Wahid (Gus Sholah) adalah adik kandung Gus Dur, sedang Hasyim Muzadi adalah Ketua Umum Tanfidyah PBNU. Jadi wajar jika warga NU-PKB mendukung dua calon wakil presiden ini.

Bagaimana dengan kondisi subyektif-obyektif di Grobogan sendiri? Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Agus-Bambang habis pada 12 Maret 2006.¹⁹ Dan berdasarkan PP. No. 6 Tahun 2005, Pilkada harus digelar selambat-lambatnya 5 bulan sebelum masa jabatan Bupati habis. Dengan demikian, regulasinya dimulai pada 12 Oktober 2005 dengan diawali surat pemberitahuan dari DPRD.²⁰

Di kalangan masyarakat maupun di internal partai, sudah ramai tentang siapa calon yang akan menggantikan posisi Bupati/Wakil Bupati selanjutnya. Berdasarkan perolehan suara pada Pemilu legislatif 2004, hanya 3 partai yang mempunyai pendukung lebih dari 15 %, yakni PDI-P (36, 42 %), Golkar (15, 83 %) dan PKB (15,53 %). Jadi hanya 3 partai yang berhak mengajukan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sedang 21 partai lainnya melakukan koalisi jika ingin mengajukan calon, hingga memenuhi batas minimal 15 %.

Di penjaringan partai-partai, muncul 3 pasangan calon, yaitu H Agus Supriyanto SE-Ir. H Muhammad Nurwibowo (Agus-Bowo) dengan nomor urut pertama, H Bambang Pudjiono SH-H Icek Baskoro SH (Bambang-Icek) di urutan ke-2 dan terakhir Bambang Budisatyo SH MM-H Mokhammad Surat Moko (Budi-Moko) dengan nomor urut ke-3.

Pada pilkada ini, para kiai mempunyai kesempatan untuk menentukan pimpinan ke depan yang semaksimal dan seideal mungkin. Diantara ke-3 pasang calon di atas, kiai mempunyai dua pilihan, mendukung Agus-Bowo atau Bambang-Icek. Jika pilihannya pada Agus-Bowo, maka kiai cenderung mendukung Bowo bukan Agus. Karena secara kultur, Bowo termasuk bagian dari komunitas para kiai. Setelah menjadi anggota dewan dari PKB, Bowo dikenal cukup dekat dengan banyak kiai, terutama di bagian barat Sungai Serang.

¹⁹ Afrosin Arif dan Respati, *Mengawal Demokrasi: Dinamika Pilkada Kabupaten Grobogan*, hlm. 62

²⁰ Wawancara dengan ketua KPU Grobogan Ir Jati Purnomo pada 24 Februari 2006

Pasangan Bambang–Icek bisa menjadi alternatif pilihan kiai. Dibanding Bowo, Bambang lebih dahulu dikenal di lingkungan para kiai. Bambang sendiri senior Bowo, baik dari segi usia maupun di badan otonom NU. Bowo adalah Wakil Bambang di GP Ansor Grobogan.

Secara umum, "bhakti" Bambang terhadap Grobogan maupun kiai lebih terlihat dari pada Bowo. Posisi Bambang sebagai penanggungjawab pembangunan Gedung NU Grobogan, menjadikan putra mantan Lurah (kepala desa) Plosorejo-Tawangharjo ini dikenal sebagai satu diantara beberapa gelintir pejabat Pemda yang dekat dengan kiai, terutama kiai tradisional (NU). Selain itu, dipilihnya lulusan IPDN ini sebagai Bendahara Tarekat *al-Su'biyah al-Nahdliyah* cabang Grobogan, semakin menegaskan kedekatannya dengan para kiai. Jika Bowo baru bergelut sebagai anggota DPR, Bambang telah mengenyam pengalaman di eksekutif sebagai Wakil Bupati periode 2001-2006. Dengan kata lain, dilihat dari segi usia maupun pengalaman, Bambang lebih unggul daripada Bowo.²¹

Pasangan Budi–Moko, penulis tidak menemukan satu pun kiai yang mendukung calon yang diusung 7 partai ini. Ini disebabkan para kiai tidak begitu mengenal pasangan ini. Selain itu, persaingan Agus–Bambang lebih menarik untuk diikuti.

Dengan digelarnya Pilkada dengan rakyat sebagai penentu, kiai yang dikenal dekat dengan rakyat mempunyai banyak keuntungan. Apalagi jika melihat masyarakat Grobogan era Orde Baru yang "dimatikan" kekritisannya oleh penguasa. Sejarah perpolitikan Grobogan yang tidak pro rakyat dan susahna menaiki tangga hidup, membuat banyak masyarakat Grobogan tidak ambil pusing terhadap Pilkada.

²¹ Wawancara dengan KH Umar Ali Mahsun; pengasuh Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Desa Selo Kecamatan Tawangharjo pada hari Rabu 31 Mei 2008 dan Kiai Niam Syukri Peting-Kradenan (Sabtu, 31 Mei 2008)

Para kiai bisa menyalurkan rasa penasarannya atas kekalahan Kaum Sarungan baik oleh Komunitas Priyayi (Golkar) maupun Golongan Abangan di Grobogan selama ini. Apalagi, mayoritas dari mereka mempunyai banyak jama'ah dan santri. Mereka bisa mengarahkan jama'ah dan santrinya untuk memilih seperti yang mereka inginkan. Selain itu, melihat signifikannya peran kiai, hampir semua calon (termasuk Pasangan Budi - Moko) mencoba merayu "kaum akhirat" ini agar merestui dan membela mereka. Silaturahmi terutama ke *ndalem* "Kiai Besar" dan "Biasa" sering calon lakukan. Tentunya tidak dengan tangan hampa. Berbagai iming-iming, mulai buah tangan, hingga janji-janji dan kesepakatan, calon lakukan untuk mendapat dukungan. Pendek kata, pra Pilkada, kiai bak sekuntum bunga yang diperebutkan sekelompok kumbang.

Para kiai yang mayoritas tidak begitu paham politik, sedikit mengalami dilema. Dalam hati, siapa yang tidak suka disilaturahmi oleh calon pemimpin? Apalagi jika disertai dengan pinangan yang menggiurkan? Tentunya, kiai gampang luluh.²² Meski demikian, ketika menentukan sikap, kiai banyak menggunakan hati ketimbang akal, meski tidak semua begitu.²³ Banyak kiai memilih calon dengan harapan, kelak calon yang dipilih bisa lebih memperhatikan kepentingan kiai; membantu pembangunan pondok pesantren, madrasah diniyah, para guru yang berjuang dipendidikan Islam dan lain sebagainya. Calon juga diharapkan memperhatikan kegiatan-kegiatan keislaman, agar kondisi Islam di Grobogan bisa lebih baik

²² Wawancara dengan KH Moch Adnan al-Hafidz Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan pada Hari (Senin, 10 Maret 2008),

²³ Intisari didapat dari wawancara dengan (1) K Slamet Desa Pepe Kecamatan Tegowanu (Selasa, 11 Maret 2008), (2) K M Khamdi Desa Dimoro Kecamatan Toroh (Senin, 21 Januari 2008), (3) K Ali Fatah Yasin Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon (Kamis, 6 Maret 2008).

Akhirnya, dengan latar belakang di atas, kiai lebih termotivasi untuk melangkah lebih jauh dalam Pilkada di Grobogan pada 2006 lalu.²⁴

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Diversifikasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada di Grobogan Tahun 2006.

Berdasarkan data di lapangan baik melalui diskusi, wawancara dan kajian pustaka,²⁵ ada beberapa hal yang menyebabkan pilihan politik kiai dalam Pilkada Langsung di Grobogan Tahun 2006 terasa berbeda.

1. Kedekatan dengan Calon. Semakin dekat seorang kiai dengan calon, semakin sulit bagi kiai untuk tidak mendukung. Hal ini bisa dimaklumi karena kiai memang sosok yang mayoritas "belum" (untuk tidak mengatakan tidak) bisa membedakan antara hati dengan pikiran. Mereka masih dibelenggu perasaan tidak enak (*ewoh*) jika disilaturahmini, dihormati, dibawakan "buah tangan" dan atau dijanjikan sesuatu oleh calon. Perasaan tidak tega ini akan berkembang menjadi perasan bersalah bila kiai "menghianati" permintaan calon yang "hanya" butuh dukungan. Perasaan ini akan semakin dilematis ketika yang sowan tidak hanya satu calon. Apalagi sebelum Pilkada, sang kiai kenal baik dengan mereka. Di sini kemudian, dengan melihat dan merasakan situasi dan kondisi serta telah menghitung dengan "cermat" kiai baru bisa menentukan sikap; mendukung secara pribadi, komunal,²⁶ atau golput.

²⁴ Disarikan dari wawancara dengan dengan KH Umar Ali Mahsun (Rabu 31 Mei 2008), Kiai Niam Syukri Peting-Kradenan (Sabtu, 31 Mei 2008), *Mbah* Muslimin (Jum'at 30 Mei 2008), *Mbah* Munir Ngroto (Ahad, 1 Juni 2008) dan beberapa kiai lainnya.

²⁵ Di sini penulis dengan sengaja menyembunyikan sumber data dari kiai yang diwawancarai dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga sesuai keinginan sebagian kiai yang tidak mau diekspos oleh penulis.

²⁶ Secara terang-terangan dan mengajak jama'ahnya.

2. *Kendaraan Politik*. Pada kasus ini, kiai tidak melihat calon dengan serius, tetapi lebih pada melihat kendaraan politik yang dipakai untuk maju. Kiai tipe ini mempunyai beberapa alasan; (a) Menghindari perasaan tidak enak yang berkelanjutan. Partai dijadikan alat pembenar, baik untuk calon, orang lain maupun untuk menenangkan diri sendiri. (b) Sebagai tanggungjawab moral atas konsekuensi logis yang harus di terima. Ini biasa terjadi pada kiai yang pro aktif dalam partai. Mereka susah dan malu jika mengkhianati partai yang selama ini mereka bela. (c) mungkin seorang kiai tidak (belum) masuk struktur partai, tetapi karena jauh sebelum Pilkada telah banyak dibantu partai, sebagai balas budi, ia akan mendukung calon yang diajukan partai bersangkutan.

3. *Money Politic*. Sebelum Pilkada, banyak kiai tidak ikut campur dalam kegiatan partai. Mereka merasa tidak mampu beradaptasi dengan situasi dalam partai yang sarat trik dan intrik. Selain itu, banyak dari mereka meyakini bahwa politik bukanlah jalur perjuangan mereka. Namun, di detik-detik Pilkada datang, ke-idealisme-an dan keluguan para kiai, kalah. Mereka merasa tidak kuasa menolak jika ada calon silaturahmi sambil membawa sesuatu. Kiai merasa sesuatu yang dibawa itu keluar dari konstalasi politik. Mereka (mayoritas) hanya merasa diorbankan, dihormati dan diakui keberadaannya. Akhirnya ia memilih calon yang perhatian dan baik kepadanya.

4. *Deal*. Adanya kesepakatan atau *deal* antara kiai dan calon membuat seorang kiai sangat bersemangat untuk memenangkan calon tersebut. Kesepakatan itu biasanya berbentuk bantuan materi (untuk organisasi yang dipimpin; pondok, sekolahan dll), akses ke luar maupun kesempatan menguasai organisasi atau banom-nya yang (menurut kiai bersangkutan) sangat eksklusif, elegan dan membanggakan.

5. Semangat Primordial. Diakui atau tidak, tempat tinggal atau daerah kelahiran calon mempengaruhi pembelaan kiai terhadapnya. Menjadi kebanggaan sendiri jika bupati (untuk Bambang) atau wakil (Bowo) berasal dari wilayahnya. Dari prosentase awangan, sekitar 75 % kiai daerah timur mendukung Pasangan Bambang – Icek (terutama Bambang), sedang di daerah barat sungai, Bambang – Icek mampu merebut hati 50 % kiai di sana.²⁷ Sisanya (25 % di timur dan 50% di barat) membela Pasangan Agus – Bowo (terutama Bowo).
6. Pengaruh tokoh dari pusat. Para kiai banyak yang *tawadhu'* dengan tokoh pusat yang "diwakili" Gus Dur dan Amin Rais. Dua tokoh ini mendukung Pasangan Agus – Bowo. Ini dibuktikan dengan datangnya Sutrisno Bachir (pengganti Amin Rais di PAN) dan Yeni Wahid (Putri Gus Dur) di sela-sela kampanye Agus – Bowo.
7. Pengaruh atau bimbingan dari tokoh atau kiai lain yang mereka tuakan. Ikut campurnya beberapa "Kiai Sepuh" dalam Pilkada ini membuat kiai lain yang mempunyai hubungan dengan mereka ikut sang tokoh. *Mbah* Baidhowi dan *Mbah* Wahid Zuhdi (alm) yang membela Agus – Bowo (terutama Bowo), membuat kiai – kiai yang mengidolakan kedua tokoh karismatik ini mendukung Agus – Bowo. Selain itu, pro aktifnya Kiai Sepuh lain semisal *Mbah* Salman Popongan-Klaten, *Mbah* Shabib Bugel-Jepara dan *Mbah* Sahid Kemadu-Rembang, membuat kiai-kiai di Grobogan yang mempunyai ikatan emosional (santri) dengan ke tiganya tidak punya alasan untuk tidak mendukung Pasangan Bambang – Icek.

²⁷ Data ini mungkin tidak valid dan cenderung perkiraan buta. Namun semua kiai yang ditanya penulis (Kiai Hambali Godong, Kiai Slamet Tegowanu, Kiai Amin Gubug, Kiai Niam Sukri Kradenan, Kiai Adnan Penawangan, Kiai Mashudi Penawangan, Kiai Abu Mansur Karangrayung, Kiai Rohib Kradenan, Gus Ansori Ngarigan, Gus Mahmud Klambu, Kiai Zamil Purwodadi, Kiai Fatah Pulokulon, Muslimin Wirosari, Kiai Nursaid Purwodadi, Kiai Syafak Tanggunharjo, Gus Mad Gubug, dan kiai - kiai yang penulis temui, tidak membantah prosentase di atas)

8. Pilihan hati. Para kiai di sini mencoba untuk mengikuti hati nurani, berijtihad mencari yang terbaik diantara tiga calon yang ada dengan cara mendekati diri kepada Allah SWT. Kiai seperti ini biasanya tidak mengharapkan sesuatu untuk pribadi. Ia hanya berharap Pilkada ini kali benar-benar sebagai ajang untuk memilih pemimpin Grobogan yang sebenarnya; yang amanah, bisa menjadi panutan, memperhatikan rakyatnya, dan bisa memberi hal-hal yang bersifat positif, untuk Grobogan pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.²⁸
9. Pandangan Masyarakat secara Umum (termakan isu). Banyak kiai, terutama kiai biasa dan kiai kampung yang tidak tahu menahu tentang Pilkada, menjatuhkan pilihannya seperti pandangan masyarakat sekitar. Kiai seperti ini biasanya tidak terlalu memikirkan Pilkada, tetapi lebih pada bagaimana Pilkada bisa berjalan dengan baik dan di masyarakat tidak ada gejolak.
10. Kekecewaan terhadap pasangan calon lain. Hal ini terjadi jika di suatu daerah, telah ada pertentangan antarkiai. Pilkada dijadikan pemicu untuk mengeluarkan segala rasa di dada. Ini terjadi jika calon memperhatikan kiai "saingan"nya, sedang ia di-*cuek-i*. Secara otomatis, sang kiai yang tidak diperhatikan akan memberikan dukungannya kepada calon lain (jika tidak Pasangan Agus – Bowo, pastinya Bambang – Icek, bukan Budi - Moko).

²⁸ Salah satu kiai itu adalah Pak Dhe Dhi (sebutan untuk Kiai Warsidi), salah seorang Mursyid Thoriqoh Shattariyah yang tinggal di Desa Lajer Kecamatan Penawangan. Dalam "ijtihadnya", beliau melihat, andai ketiga calon tersebut *tunggangan* (kendaraan) dalam bentuk hewan, maka Agus terlihat seperti Macan (Harimau), Bambang nampak seperti Kuda dan Budiatyo mirip Kerbau. Hal ini dibenarkan oleh karib Pak Dhe Dhi, Kiai Abu Mansyur dari Desa Nampu Kecamatan Karangrayung. Bahkan tanpa sepengetahuan Bambang dan tim suksesnya, ketika Tim Agus membagi 'angpau' ke masyarakat Nampu, Kiai Abu Mansyur mengeluarkan uang pribadi untuk menandingi dan mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Bambang. Karib lain yang berasal dari Desa Gadoh Kecamatan Karangrayung (tidak mau disebut namanya) bahkan sampai menjual motor untuk membantu Pasangan Bambang-Icek. Satu sisi, mereka tidak dikenal oleh pasangan nomor urut dua ini. Bambang sendiri pernah mengatakan bahwa semua calon jelek. Namun, Bambang berharap, pemilih memilih yang terbaik diantara yang jelek tersebut

C. Kemenangan Bambang-Icek dan Peran Kiai Terhadapnya.

Minggu, 29 Januari 2006, Pilkada di Grobogan digelar. Dan untuk kali pertama dalam sejarah pemerintahan di Grobogan, rakyat mendapat penghormatan tertinggi sebagai penentu pimpinan mereka lima tahun ke depan. Hasilnya, Pasangan Bambang-Icek secara mengejutkan mengalahkan Pasangan Agus-Bowo dan Pasangan Budi-Moko. Diakui atau tidak, hasil ini 'menyalahi aturan' dan prediksi banyak pengamat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kemenangan pasangan yang didukung Partai Golkar dan 11 partai gurem ini sudah menjadi kehendak alam.²⁹

Bagaimana tidak, Bambang-Icek adalah calon yang paling sedikit mengeluarkan dana.³⁰ Kekuatan legislatif mereka pun paling kecil dibanding dengan calon lain, yakni sebesar 16,56 %, bandingkan dengan pasangan Agus-Bowo yang mencapai 61,34 %. Atau dibanding pasangan Budi-Moko yang sebanyak 19,41 %.³¹ Polling yang dilakukan PDI-P pun menyatakan, peluang Bambang-Icek menang sangat kecil.³²

Pasangan Bambang-Icek beserta tim sukses dan pendukungnya, layak merayakan kemenangan ini. Segala puji syukur, gembira, tertawa, puas, bahagia dan perasaan positif lainnya mereka lantunkan. Berbagai cara, daya dan upaya yang dilakukan saat kampanye menuai hasil memuaskan dan sukses. Sedang pasangan yang kalah; Agus-Bowo dan Budi-Moko merana dan "shok". Keluarga, tim sukses dan pendukung hanya bisa meratapi kekalahan ini dengan berbagai rasa dan kambing hitam. Namun dibalik

²⁹ Seperti pernyataan 11 orang dari berbagai komponen masyarakat (politisi, anggota DPR, pengusaha, pedagang, petani, mahasiswa dan pegawai negeri sipil) yang penulis tanyai tentang hasil Pilkada ini kali.

³⁰ Masalah dana, tidak bisa dipastikan. Bapak Solikin misalnya, Tim Sukses Pasangan *Bambang-Icek* asal Desa Latak-Godong ini mengatakan bahwa pasangan yang ia dukung menghabiskan dana sekitar 7-9 milyar rupiah (wawancara pada 23 Maret 2008). Tetapi hal ini dibantah oleh Bapak Hardono, mantan Kepala Desa Sedadi-Penawangan yang menjadi tim sukses Bambang-Icek wilayah Penawangan. Dalang wayang kulit ini mengatakan bahwa Bambang-Icek 'hanya' menghabiskan dana sekitar lima milyar rupiah (wawancara pada 12 Mei 2008). Ketua KPUD Grobogan; Ir Jati Purnomo ketika ditanya juga tidak bisa memastikan berapa. Bahkan Bambang sendiri ketika ditanya juga tidak menjawab pasti. Bupati yang cukup dekat dengan penulis ini hanya menjawab diplomatis; bahwa dana yang ia keluarkan jauh lebih kecil dari pada yang dihabiskan oleh pasangan lain (wawancara pada 26 Februari 2006).

³¹ Dari berbagai sumber.

³² Afrosin dan Respati, *Mengawal Demokrasi, Dinamika Pilkada Grobogan*, hlm. 137

kepasrahan dan rasa bersedih yang mendalam, timbul ketidakterimaan atas kemenangan "Pasangan Santri-Priyayi" ini. Agus-Bowo dan Budi-Moko memprotes kemenangan Bambang-Icek.

Kemenangan Bambang-Icek membuat calon lain panas luar dalam, terlebih Agus. Mantan atasan Bambang ini hampir saja melakukan pengrusakan massal dengan mendatangkan ratusan bahkan ribuan preman dari Pantura (Pati dan sekitarnya) untuk melakukan huru-hara di Purwodadi di malam pasca pemilihan. Untung, koordinasi Polisi Resort Pati-Grobogan dan Intel berjalan sesuai prosedur, hingga pengrusakan itu tidak terjadi. Beberapa nama yang dianggap bertanggungjawab atas 'kemenangan' Bambang-Icek, dijaga dengan ketat dan lolos dari amukan 'pendukung' Agus-Bowo, salah satunya adalah para mahasiswa putra daerah yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Purwodadi-Grobogan (IMPG).³³

Banyak komponen di Grobogan "menyayangkan" sikap IMPG yang tidak netral. Karena selain mereka masih mahasiswa, apa yang mereka lakukan bisa membahayakan organisasi daerah (orda) ini jika calon yang mereka dukung kalah, apalagi dukungan yang mereka berikan, tidak disertai dengan kesepakatan (*deal*) dengan calon. Orda milik mahasiswa Grobogan yang menuntut ilmu di Semarang ini mempunyai alasan pembenar dan tidak mau disalahkan. Mereka menyatakan tidak asal dukung. Empat bulan sebelum menyatakan dukungan, mereka dengan berbagai element asal Purwodadi (Grobogan) di berbagai kota di Jawa Tengah bertemu di Masjid Jabal Khoir Simpang Lima Purwodadi,³⁴ berkumpul, berdiskusi dan mengambil sikap dalam Pilkada. Sebelum

³³ IMPG adalah organ mahasiswa asal Grobogan di Semarang dengan basis massa IAIN Walisongo, UNNES, UNDIP, IKIP PGRI, UDINUS, POLINES, UNTAG, UNISLA dan UNISBANK. Penulis sendiri saat Pilkada berlangsung menjabat sebagai Presiden IMPG.

³⁴ Dilakukan pada 7 Juli 2005, diikuti sekitar 52 mahasiswa. Terdiri dari 31 Mahasiswa kuliah di Semarang (IMPG), empat (4) di Kudus (Permadi –Persatuan Mahasiswa Purwodadi-), tujuh (7) Mahasiswa Yogyakarta (Himadika –Himpunan Mahasiswa Purwodadi di Jogjakarta) dan 10 mahasiswa yang kuliah di Kota Solo (Formaps –Forum Mahasiswa Purwodadi di Solo). Di pertemuan tersebut disepakati bahwa masing-masing *locus* kota, diberi kebebasan untuk menentukan sikapnya memilih siapapun calon yang ada. Permadi dan

itu, IMPG telah melakukan konsolidasi internal sejak 14 Februari 2005 di Masjid Baitur Rohman Simpang Lima Semarang. Setelah itu, tidak kurang 16 kali pertemuan dilakukan di berbagai perguruan tinggi di Semarang. Mulai di kampus UDINUS,³⁵ IKIP PGRI,³⁶ UNTAG³⁷ dan IAIN Walisongo Semarang.³⁸

Gagal melakukan pengrusakan di kota, Agus menghancurkan segala fasilitas di rumah dinas bupati. Tembok, porselin, kamar mandi, dapur dan segala yang ada di dalam rumah dihancurkan. Kursi, meja dan barang-barang bergerak, diambil dan hingga kini entah kemana.³⁹ Mungkin kekecewaan Pasangan Agus-Bowo (terutama Agus) dalam beberapa hal bisa dimaklumi. Dilihat dengan rasio, Pasangan Nomor Urut 1 ini sangat yakin menang. Tetapi, apapun alasannya, tingkah Agus tidak bisa diterima. Beruntung, lelaki kelahiran Sukoharjo ini tidak mendapatkan sanksi apapun. Mungkin karena mencoba memahami kekecewaan yang dirasakan Agus, bisa juga aparat penegak hukum tidak berani mengambil sikap. Tapi yang pasti, harusnya pernyataan sikap "siap menang dan siap kalah" diaplikasikan dalam konteks nyata, hingga demokrasi bisa benar-benar sesuai yang diharapkan bersama.

Selesaikan sampai di situ? Ternyata tidak. 13 hari setelah Pilkada atau 3 hari pasca Bambang-Icek ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan oleh

Formaps memilih netral, Himadika mendukung secara individu dan IMPG menyatakan dukungan ke Pasangan Bambang-Icek.

³⁵ Pada 27 Februari 2005, pukul 18.30-an WIB

³⁶ Pada 13 Maret 2005

³⁷ Di Kampus Benda *Dhuwur* (atas) pada 2 Juni 2005

³⁸ Di Masjid Kampus I pada 20 Juni 2005. Dan karena mayoritas yang aktif adalah Mahasiswa IAIN (lebih kurang 63 %), maka sejak itu, pertemuan ditetapkan dilakukan di Di Masjid Kampus I tiap minggu ke-2 dan ke-4. Dalam pertemuan bebas tersebut, selain menguatkan hubungan emosional antarmahasiswa kelahiran Grobogan, mahasiswa lintas kampus dan edialogi ini me**M**bahas calon mana yang terbaik diantara tiga calon yang bisa membawa Grobogan bisa lebih baik. Di sana disepakati secara mufakat, dengan segala konsekuensi, IMPG mengambil sikap mendukung Pasangan Bambang-Icek sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan kedepan.

³⁹ Penulis menyaksikan sendiri keadaan Rumah Dinas Bupati yang mengenaskan pada 24 Februari 2006 ketika para pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Grobogan (IPG) dan Mahasiswa (IMPG) diundang Bupati Grobogan terpilih H Bambang Pudjiono SH untuk *mampir* di Rumah Dinas setelah sebelumnya melaksanakan seminar bersama dengan tema "*Perang Terhadap Narkoba*" di Gedung Riptaloka; milik Pemerintah Kabupaten Grobogan. Saking rusaknya, baru empat bulan terhitung sejak kemenangan Bambang-Icek rumah tersebut bisa ditempati karena menunggu perbaikan.

KPUD (8 Februari 2008) dengan surat keputusan KPUD Nomor: 36/KEP/2006.⁴⁰, tepatnya pada 11 Februari 2008, Agus-Bowo melalui kuasa hukumnya; Heru Kisbandono SH dan rekan menggugat KPUD Grobogan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Pengadilan Negeri Purwodadi. Selain melakukan gugatan, Agus-Bowo juga meminta Gubernur Jateng dan Mendagri agar menunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hingga ada keputusan tetap dari Pengadilan Tinggi. Hal serupa dilakukan oleh Pasangan Budi-Moko dengan meminta bantuan Ali Rukamto dan Kenthut Suharyanto SH.⁴¹

Agus-Bowo mengajukan beberapa materi keberatan, yaitu (1) adanya kasus *money politic* dari calon terpilih sehingga mempengaruhi perolehan suara yang bersangkutan dan merugikan penggugat. (2) menggugat SK Nomor 36/KEP/2006 tentang penetapan calon terpilih yang tidak memperhatikan aspek kehati-hatian dan kecerematan. (3) tentang kebohongan calon bupati terpilih saat mendaftar sebagai siswa APDN pada 1979-1982 dimana saat itu, Bambang telah menikah. Padahal syarat menjadi Mahasiswa APDN adalah masih bujangan. Ini berdasarkan fakta bahwa anak pertama calon Bupati lahir pada tahun 1978. (4) maka berdasarkan fakta di atas salah satu persyaratan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak memenuhi syarat. (5) bupati terpilih telah menghalang-halangi pemilih agar tidak melakukan pencoblosan (golput) di kelurahan Wirosari sehingga di wilayah tersebut suara penggugat banyak yang hilang.⁴²

Sementara materi keberatan yang diajukan Pasangan Budi-Moko yakni (1) Adanya selisih suara untuk Pasangan Bambang-Icek di DA-KWK Kecamatan Gabus. Pada rapat pleno terbuka KPUD tanggal 7 Februari 2008 tercatat 15.735, sedang saat berita acara, jumlahnya 15.734 suara. (2) Telah terjadi pelanggaran terhadap PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 16; yakni pemilih tidak didaftar sebagai pemilih. (3) Pelanggaran

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua KPUD Pak Jati Purnomo.

⁴¹ Suara Merdeka, 12 Februari 2008 hlm, E

⁴² Penulis mendapatkan fotocopian gugatan yang bernomor perkara 01/Pdt/P/Pilkada/2006/PT Jateng dari salah satu wartawan harian yang bertugas di wilayah purwodadi (wartawan tidak mau diketahui identitasnya).

terhadap PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 18 ayat 1; yaitu seorang pemilih ahtrus didargar saru kali dalam daftar pemielih di daerah pemilihan, tetapi terbukti banyak pemilih yang terdaftar ganda/dobel. (4) Pelanggaran terhadap PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 18 ayat 2; yakni banyak ditemukan kartu pemilih dan undangan ganda sehingga mempengaruhi DPT Kabupaten Grobogan. (5) Pelanggaran terhadap PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 113 dan 114 tentang ditemukannya banyak pelanggaran politik (*money politic*) yang dilakukan calon tertentu.⁴³

KPUD Grobogan yang jengah akhirnya melakukan koordinasi dengan KPUD Jateng, Polres Grobogan dan calon terpilih. Juga, meminta bantuan tim hukum KPUD Jateng yang biasa menangani sengketa Pilkada di daerah. Selain itu, KPUD juga melakukan pendekatan persuasif dengan pihak penggugat agar mencabut gugatan. Akhirnya pada 21 Februari 2008, kedua gugatan calon yang kalah disidangkan. Di sana ada isu, Agus-Bowo akan mendatangkan masa. Banyak aparat menjaga pengadilan tinggi.⁴⁴ Akhir dari persidangan, karena kurangnya bukti, majelis hakim menyatakan menolak seluruh materi gugatan yang diajukan calon kalah dan menyatakan calon terpilih yang ditetapkan KPUD sah.

Jika dilihat dengan rasio tentang apa yang telah Pasangan Agus-Bowo lakukan saat Pilkada, Mungkin kekecewaan Pasangan ini (terutama Agus) dalam beberapa hal bisa "dimaklumi". Kuatnya dukungan partai (PDI-P, PKB, PPP dan PAN) yang mempunyai 31 kursi (68,89% dari kursi) atau sekitar 61,34 % pemilih legislatif, jumlah dana yang dikeluarkan, banyaknya tokoh nasional yang diundang, biaya kampanye sampai hasil survey yang membuat keoptimisan pasangan ini melambung seakan mengubur mereka dalam buaian dan berakhir dengan kekecewaan mendalam.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Penulis mengikuti acara persidangan. Di sana beberapa anggota KPUD hadir.

Fasilitas yang ada seakan melemahkan mesin politik Agus-Bowo. Masing-masing tim dari partai merasa tidak diperhatikan, terkhusus oleh Agus. Agus lebih mengedepankan tim sukses birokrat, yakni mulai pejabat pemerintah daerah, camat, hingga kepala desa dan RT. Selain itu, disinyalir, ada persaingan antartim sukses, baik internal partai maupun antarpartai. Setelah mengedepankan kekuatan birokrasi, Agus lebih percaya kepada "Kaum Hijau" (PPP dan PKB) dari pada abangan (PDI-P).⁴⁵ Hal ini diungkapkan oleh Sunardi (nama samaran), salah seorang TS AB Wilayah Kecamatan Penawangan kepada penulis.⁴⁶

Menurut sumber yang bisa dipercaya, selain adanya ketidakharmonisan Agus dengan TS terutama dari kalangan abangan, terjadi persaingan terselubung antara penguasa *de facto* PDI-P yakni Agus sendiri dengan Ketua Umum PDI-P Cabang Grobogan yang juga Ketua DPRD Grobogan; H M Yaeni SH. Hal ini diakui sendiri oleh Yaeni kepada salah seorang tokoh agama yang tidak mau disebut namanya, yang kemudian cerita kepada penulis ketika penulis silaturahmi ke kediamannya pada 20 Mei 2008 lalu. Di situ diterangkan, Agus sering tidak menghargai orang dalam PDI-P terutama kepada ketua umum. Dampaknya, mesin politik PDI-P sulit panas, bergolak dan malah ada penghianatan dari dalam. Bahkan sebagian besar dana dari Agus untuk melumasi PDI-P, dialokasikan untuk kemenangan Bambang-Icek. Hal ini susah dibuktikan. PDI-P sendiri dalam perjalanannya, merasa angin-anginan membela sang pemasok dana terbesar partai.

Selain hal di atas, ketika penulis melakukan pengamatan secara langsung, banyak faktor ternyata, yang mengelilingi Pasangan Bambang-Icek, hingga "Dewi Fortuna"

⁴⁵ Sedang PAN terjadi konflik intern dan kurang mendapat perhatian dari Agus

⁴⁶ Penulis ketemu secara tidak sengaja dengan Sunardi di warung malam depan Balai Desa Sedadi Kecamatan Penawangan pada 23 Desember 2005. tanpa *tedeng aling-aling*, lelaki asal salah satu desa di Kecamatan Penawangan ini, mengungkapkan kekesalannya kepada pribadi Agus dan menyarankan kepada orang-orang di sekitar warung untuk tidak memilih Agus-Bowo. "*Aku wae sing PDI ora nyoblos Agus, masak sampeyan arep nyoblos Agus?!*" begitu kira-kira Sunardi mengungkapkan kekesalannya.

enggan meninggalkan mereka. Salah satu faktor tersebut adalah peran para kiai, terkhusus kiai kampung yang hanya mempunyai pengaruh lokal (dukuh dan santrinya) yang berjuang sedemikian rupa, baik doa, fatwa hingga harta untuk kemenangan Pasangan Nomor Urut 2. Bahkan, dalam keyakinan penulis pribadi, tanpa peran kiai, mustahil Pasangan Bambang-Icek menang. Namun, tidak semua kiai mendukung calon dari "Partai Orde Baru" ini. Sebagian lagi, dengan beberapa alasan, mendukung pasangan Agus-Bowo. Hasilnya, kedua pasangan ini memperoleh suara yang cukup signifikan bila dibanding dengan Pasangan Budi-Moko yang tidak didukung oleh panutan Agama Islam ini. Bukti, betapa kuatnya pengaruh kiai di Grobogan, meski masyarakatnya mayoritas abangan.

Bambang yang kelahiran Plosorejo-Tawang Harjo (wilayah timur), didukung oleh mayoritas kiai timur sungai. Sedang Bowo (bukan Agus) yang berasal dari Sugihmanik-Tanggunharjo (wilayah barat), mendapat perlawanan dari Bambang dalam mendapat simpati kiai barat sungai. Seperti disebutkan di atas, dukungan kiai di wilayah barat ke Bambang dan Bowo berimbang. Hal ini bisa dimengerti, karena sebelumnya, Bambang pernah bertugas sebagai Mantri Polisi di Kecamatan Penawangan dan Camat di Karangrayung. Selama masa bertugas, Bambang dianggap belum pernah melakukan suatu perbuatan yang negatif.

Hasilnya, di Wilayah Barat, Bambang menang di Kecamatan Godong, Karangrayung dan Penawangan. Sedang di Kecamatan Gubug, Kedungjati, Tanggung Harjo dan Tegowanu, Bowo lebih perkasa. Sementara untuk wilayah timur yang mayoritas telah 'dipegang', Bambang menang di Kecamatan Gabus, Grobogan, Kradenan, Pulokulon, Purwodadi Tawang Harjo, Toroh dan Wirosari. Sedang Kecamatan Brati, Geyer dan Ngaringan mayoritas memilih Pasangan Agus-Bowo (Kecamatan Ngaringan

diyakini karena faktor Bowo, Kecamatan Brati dan Geyer lebih pada ke Agus). Sementara untuk Kecamatan Klambu, Bambang-Icek lebih unggul.

Ada beberapa alasan kenapa kiai, terutama kiai dari timur lebih condong ke Pasangan Bambang-Icek, antar lain yaitu; *Pertama*, Bambang adalah putra daerah yang berasal dari timur. Diakui atau tidak, sentimen primordial ini berperan dalam menyulut emosi sebagian kiai untuk menyatakan dukungan kepada pria kalem ini. Apalagi dalam sejarah Grobogan, dari 30 bupati sebelumnya, belum pernah ada yang berasal dari dalam Grobogan. Semua bupati adalah impor dari daerah lain.⁴⁷

Kedua, selama menjadi pejabat, Bambang belum pernah terberitakan terkena skandal. Issu ini sangat kencang dan pernah menjadi isu hangat oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Bambang dilihat sebagai sosok yang bersih dan berwibawa. Juga, selama menjadi wakil bupati, diketahui oleh masyarakat, bahwa Bambang hampir tidak pernah diajak rembugan (bekerja sama) oleh Bupati Agus, terutama ketika menyangkut proyek besar dan penting. Dalam hal ini, Bambang menang issu sebagai orang yang didzalimi.⁴⁸

Ketiga, isu reformasi tentang pemimpin (bupati) baru gencar didengungkan oleh khalayak. Ini menjadi isu yang cukup sensitif karena menyangkut raport Agus selama menjabat bupati, dipercayai merah, karena banyaknya isu skandal. Bambang seakan hadir sebagai solusi untuk kebangkitan dan kemajuan Grobogan kearah yang lebih baik. Selain itu, Bambang dianggap sebagai sosok yang paham Grobogan karena telah lama menjadi pejabat di daerah bertanah labil ini.

Keempat, faktor *Mbah Salman* dkk. *Mbah Salman* (sebutan khas dari KH Salman Dalawi al-Hafidz) mempunyai peran yang tidak kecil di dalam mengajak para kiai di

⁴⁷ Lebih jelas lihat http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=28. diakses pada hari Senin, 21 Januari 2008

⁴⁸ Issu sebagai *Mudzlimin* ini telah menjadi rahasia umum di masyarakat luas.

Grobogan untuk mendukung Pasangan Bambang-Icek. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Kholidiyah yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manshur Popongan-Tegalondo, Delanggu-Klaten ini mempunyai sekitar 73.000 santri tarekat dengan 43 Badal (asisten/guru pengganti) di Kabupaten Grobogan.⁴⁹ Hal yang bisa dianggap wajar mengingat sejak pertengahan 1996, Bambang resmi menjadi salah satu santri *Mbah Salman*. *Mbah Salman* pula yang menganjurkan Bambang untuk nyalon. Beberapa sahabat *Mbah Salman* seperti *Mbah Shabib Bugel-Jepara* dan *Mbah Sahid Kemadu-Rembang*, ikut mendoakan dan *mendawuhi* santrinya yang asal Grobogan untuk mendukung Pasangan Bambang-Icek.⁵⁰ Rupannya ijtihad para 'Alim di atas diikuti oleh sebagian besar kiai, santri dan masyarakat Grobogan. Tak heran jika dengan dana sedikit,⁵¹ Pasangan Bambang-Icek sukses mengambil hati sebagian besar (297.777 atau 44,81%) Rakyat Grobogan.

Kelima, adalah hasil ijtihad kiai sendiri. Hal ini dilakukan oleh beberapa kiai kampung yang tidak berhubungan dengan para ulama di atas dan tidak mempunyai kepentingan politis. Para kiai ini prihatin melihat keadaan Grobogan saat dipimpin oleh Agus yang seakan syarat KKN. Satu sisi, oleh negara, hanya ada tiga pasang calon sah yang berhak berkompetisi memperebutkan pucuk pimpinan di Grobogan. Mau tidak mau, mereka harus pro aktif untuk menyukseskannya. Para kiai ini tidak pernah berbicara tentang pemilihan pemimpin menurut Islam. Mereka hanya melihat tiga calon, dan

⁴⁹ Data ini penulis dapat ketika silaturahmi dan wawancara dengan oleh *Mbah Muslimin* (salah seorang badal di wilayah Wirosari) di kediaman beliau pada hari Jum'at 30 Mei 2008

⁵⁰ Selain diungkapkan oleh *Mbah Muslimin*, hal ini juga dibenarkan oleh Pak Nursahid; Kabagsos Kabupaten Grobogan yang terkenal dekat dan sering silaturahmi ke kiai-kiai antara lain ke *Ndalem Mbah Shobib*. (Wawancara pada 28 Februari 2008) Juga, oleh Gus Ansori yang tak lain santri *Mbah Sahid* yang pernah silaturahmi ke Rembang bersama Bambang (wawancara pada 30 Mei 2008)

⁵¹ Masalah dana, tidak bisa dipastikan. Bapak Solikin misalnya, Tim Sukses Pasangan Bambang-Icek asal Desa Latak-Godong ini mengatakan bahwa pasangan yang ia dukung menghabiskan dana sekitar 7-9 milyar rupiah (wawancara pada 23 Maret 2008). Tetapi hal ini dibantah oleh Bapak Hardono, mantan Kepala Desa Sedadi-Penawangan yang menjadi tim sukses Bambang-Icek wilayah Penawangan. Dalang wayang kulit ini mengatakan bahwa Bambang-Icek 'hanya' menghabiskan dana sekitar lima milyar rupiah (wawancara pada 12 Mei 2008). Ketua KPUD Grobogan; Ir Jati Purnomo ketika ditanya juga tidak bisa memastikan berapa. Bahkan Bambang sendiri ketika ditanya juga tidak menjawab pasti. Bupati yang cukup dekat dengan penulis ini hanya menjawab diplomatis; bahwa dana yang ia keluarkan jauh lebih kecil dari pada yang dihabiskan oleh pasangan lain (wawancara pada 26 Februari 2006).

memilih yang terbaik diantara mereka. Dan diantara calon tersebut, menurut sebagian besar mereka, Bambang adalah yang terbaik.⁵²

Keenam, adalah harapan timbal balik. Para kiai mendukung Pasangan Bambang-Icek dengan harapan, kelak kalau pasangan ini jadi, bisa lebih memperhatikan nasib para kiai kampung. Pondok pesantren dibantu, para ustadz madrasah disubsidi, kegiatan keagamaan di perhatikan, dan hal-hal yang bersifat keakhiratan diprioritaskan. Hal ini menyangkut *trake record* Bambang saat menjadi Wakil Bupati periode 2001-2006.

Sedang alasan kenapa kiai, terutama kiai dari barat sebagian condong ke Pasangan Agus-Bowo (lebih karena faktor Bowo-nya), antar lain yaitu; *Pertama*, Bowo adalah putra daerah yang berasal dari barat. Diakui atau tidak, sentimen primordial juga berperan dalam menyulut emosi sebagian kiai untuk mendukung lelaki penggila bola ini. Apalagi selama Bowo menjadi DPRD, sering membantu daerah barat. Mereka berharap jika Pasangan Agus-Bowo jadi, ada timbal balik yang dapat diambil manfaatnya untuk perkembangan Islam dan daerah, khususnya di wilayah barat. Selain itu, kedekatan Bowo dengan kiai "seimbang" dengan Bambang, namun Bowo menang kuantitas pertemuan dengan mereka.

Kedua, faktor *Mbah* Baihowi dkk. *Mbah* Baihowi (sebutan khas dari KH Baidhowi Samsyuri LC), Pengasuh Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Brabu Tanggung Harjo ditengarai salah satu kiai kharismatik yang pengaruhnya diakui di Kabupaten Grobogan. Alasan Santri (almarhum) *Mbah* Muslih Mranggen ini merestui dan

⁵² Salah satu kiai itu adalah Pak Dhe Dhi (sebutan untuk Kiai Warsidi), salah seorang Mursyid Thoriqoh Shattariyah yang tinggal di Desa Lajer Kecamatan Penawangan. Dalam istikharohnya, beliau melihat, andai ketiga calon tersebut tunggangan dalam bentuk hewan, maka Agus terlihat seperti Macan (Harimau), Bambang nampak seperti Kuda dan Budisatyo mirip Kerbau. Hal in dibenarkan oleh karib Pak Dhe Dhi, Kiai Abu Mansyur dari Desa Nampu Kecamatan Karangrayung. Bahkan tanpa sepengetahuan Bambang dan tim suksesnya, ketika Tim Agus membagi 'angpau' ke masyarakat Nampu, Kiai Abu Mansyur mengeluarkan uang pribadi untuk menandingi dan mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Bambang. Karib lain yang berasal dari Desa Gadoh Kecamatan Karangrayung namun tidak mau disebut namanya bahkan sampai menjual motor untuk membantu Pasangan Bambang-Icek. Satu sisi, mereka tidak dikenal oleh pasangan nomor urut dua ini. Bambang sendiri pernah berujar di depan penulis bahwa semua calon jelek. Namun, Bambang berharap, pemilih memilih yang terbaik diantara yang jelek tersebut.

mendukung Bowo menjadi pasangan Agus adalah untuk *njagani* (mengantisipasi), andai Agus menjadi bupati lagi, maka NU masih mempunyai wakil di pemerintahan. Hal ini penting karena menyangkut eksistensi dan sumbangsih NU kepada daerah yang dulu pernah menjadi basis PKI ini.

Kekhawatiran *Mbah* Baidhowi masuk akal, karena Agus dengan kapasitasnya sebagai calon incumbent, didukung oleh uang dan jaringan kekuasaan, secara otomatis mempunyai kesempatan besar untuk kembali menahkodai Kabupaten Grobogan. Selain *Mbah* Baidhowi, Pasangan Agus-Bowo juga didukung oleh kiai kharismatik lainnya; *Mbah* Wahid Zuhdi Ngaringan.

Dan hasilnya, Fatwa *Mbah* Baidhowi-*Mbah* Wahid Zuhdi ikut berperan dalam kemenangan Pasangan Agus-Bowo di tujuh (terutama lima kecamatan, yakni Gubug, Kedungjati, Ngaringan, Tanggunharjo dan Tegowanu,) kecamatan.

Tetapi benarkah peran kiai besar atas kemenangan pasangan yang diusung mantan "Partai" Orde Baru ini? Susah (untuk mengatakan tidak bisa) menjawabnya. Tetapi dari pengamatan dan wawancara di atas, penulis mendapatkan hipotesa *awangan*,⁵³ bahwa peran kiai sangat besar. Bahkan ada keyakinan dari kami (penulis dan narasumber); mustahil Bambang – Icek menang tanpa ridho, do'a dan dukungan dari mayoritas kiai di Grobogan.⁵⁴

Untuk membuktikan sekaligus mencari penguat dan pembener hipotesa pengamatan di atas, Penulis menyebar 300 lembar angket polling dengan menggunakan teknik *Multy Stage Sampling*.⁵⁵ Di item pertama angket, penulis menanyakan pasangan

⁵³ Berdasar pada pendapat dan keyakinan nara sumber (kiai dan masyarakat), tanpa dibarengi bukti-bukti otentik.

⁵⁴ Kata mayoritas (ditujukan untuk menerangkan kuantitas kiai pendukung Bambang – Icek yakni 75 % kiai wilayah timur dan 50 % kiai wilayah barat; seperti di terangkan di atas) juga berasal dari asumsi dan perkiraan (dari narasumber) belaka, tanpa adanya data yang valid dan bertanggungjawab.

⁵⁵ Adalah suatu teknik pengambilan sample secara sembarangan, bisa dilakukan secara random, non-random maupun kombinasi keduanya. Lebih jelas, lihat Eman sulaeman, dalam makalah "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Metode Penelitian Sosial Yang Diterapkan Terhadap Hukum (Metode Penelitian Hukum*

calon siapa yang dipilih. Sedang item kedua berisi tentang alasan memilih calon. Di situ penulis menawarkan 10 alasan, yakni :

1. Uang (*money politic*)
2. Pengaruh/Bimbingan Kiai/Tokoh Agama
3. Partai/Kendaraan Politik
4. Pengaruh dari Tokoh Partai Pusat
5. Sosok Calon (Kekuatan Figur)
6. Hubungan Baik dengan Calon
7. Hubungan Keluarga
8. Program yang Ditawarkan
9. Sudah ada *Deal* (Kesepakatan) dengan Calon
10. Yang lain (silahkan isi sendiri).....

Dari 300 angket yang penulis sebar, 98 sample memilih Pasangan Agus-Bowo, 148 sample menghendaki Pasangan Bambang-Icek dan sisanya; 54 menyukai Pasangan Budi-Moko.

Dari 10 alasan yang penulis tawarkan, semua responden tidak memilih satu alasan, tetapi berbagai alasan.⁵⁶ Diantara 98 pendukung Pasangan Agus-Bowo, peran dan pengaruh kiai (Item No. 2 Sub Item Ke-2; Pengaruh/Bimbingan Kiai/Tokoh Agama) diisi oleh 69 responden (67,62 %). Sedang diantara 148 responden yang menginginkan Pasangan Bambang-Icek menang, 116 responden (78,38 %) mengiyakan peran kiai. Dan

Empiris)", dalam *Workshop Metodologi Penelitian Hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Syariaah IAIN Walisongo Semarang* Tanggal 3-5 Agustus 2007 di Ponpes Nurul Islam Wonolopo Mijen Semarang.

⁵⁶ Di sini responden seakan menunjukkan bahwa dalam kasus Pilkada Grobogan, banyak alasan yang membuat seseorang memilih dalam menentukan pilihannya.

dari 54 responden yang mengunggulkan Pasangan Budi-Moko, tidak satupun yang menyetujui bahwa kiai berperan dalam pemilihan mereka.

Hasil polling di atas, mungkin tidak (belum) bisa mewakili fakta di lapangan. Tetapi hasil polling tersebut, kita bisa melihat sedikit gambaran bahwa memang peran kiai besar dibalik kemenangan Pasangan Bambang – Icek. Polling ini juga menunjuk dan menegaskan bahwa kiai, secara garis besar terbelah menjadi dua; sebagian mendukung Pasangan Agus-Bowo dan sebagian lagi menjagokan Pasangan Bambang-Icek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan tahun 2006, peran dan posisi kiai sangat penting didalam mempengaruhi dan mengajak rakyat (terutama massa mengambang yang tidak terlalu berkepentingan dengan Pilkada) untuk memilih calon pemimpin seperti yang dikehendaki oleh kiai. Disini, aspek *sami'na wa attho'na* di diri masyarakat begitu besar dan terasa. Terbukti, calon yang didukung oleh mayoritas kiai (Pasangan Bambang-Icek) memenangkan Pilkada kali pertama ini. Bukti lain; partai yang mengusung Bambang-Icek yakni Partai Golkar, secara umum tidak terlalu disukai oleh masyarakat Grobogan, namun karena didukung oleh (mayoritas) para kiai, mampu mengalahkan partai besar PDI-P yang ironisnya didukung oleh "Partai Kiai" seperti PKB, PPP dan PAN yang menguasai 68,89 % (31 dari 45 kursi) legislatif di Grobogan.

Apalagi calon bupati yang diusung beberapa partai besar di atas (Agus) dalam posisi incumbent; pastinya mempunyai akses kekuasaan melebihi calon lain. Pasangan Agus-Bowo juga didukung oleh dana melimpah. Mungkin selain faktor signifikansi kiai, figur calon juga mempengaruhi pilihan masyarakat, tetapi, dilihat dari aspek politik dan sosial kemasyarakatan, calon tidak mungkin bisa bertatap muka langsung

dengan semua pemilih dan meyakinkan mereka. Begitu juga tim sukses yang harus memikirkan banyak hal. Nah, disaat seperti ini, kiai tampil sebagai solusi alternatif yang terbukti sangat tepat untuk mempengaruhi masyarakat, terutama santri dan jama'ahnya untuk memilih calon yang mereka sukai.

2. Pilkada di Kabupaten Grobogan pada tahun 2006 dengan jelas menggambarkan bahwa kiai terbagi menjadi tiga kategori. Dua golongan aktif di Pilkada dengan mendukung Pasangan Agus-Bowo dan atau Bambang-Icek, sedang satu golongan menyatakan Golput. Di sini juga digambarkan bahwa ada beberapa komponen masyarakat dan tim sukses agak kebingungan dengan model Pilkada yang baru kali pertama ini. Selain itu, riak-riak kecil di tengah masyarakat nyaris menyulut kerusuhan, tetapi sigapnya aparat penegak hukum, mampu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat pun bebas dari bentrok fisik. Secara umum, penyelenggaraan Pilkada Langsung di Grobogan tahun 2006 dapat dikata sukses dan berjalan seperti yang diharapkan oleh mayoritas komponen di Kabupaten Grobogan.
3. Munculnya Diversifikasi pilihan politik Kiai di Kabupaten Grobogan yang terbagi atas tiga golongan di atas dipengaruhi oleh banyak hal. Antara lain yaitu (1) Kedekatan calon selama ini dengan para kiai, baik kiai secara pribadional ataupun kolektif (organisasi; NU, Muhammadiyah dll). (2) kendaraan politik, (3) *money politic*. (4) adanya kesepakatan (*deal*) antara

kiai dengan calon. (5) ditunggangi oleh "Semangat Primordial", dimana secara garis besar, kultur, sejarah politik dan sosial masyarakat Grobogan terbagi menjadi dua; barat sungai serang dan timur sungai serang. Calon dari barat sungai akan cenderung dibela oleh kiai dari barat sungai, begitu juga sebaliknya.

(6) Pengaruh dari Tokoh politik pusat seperti Gus Dur dan Amin Rais. (7) Pengaruh atau bimbingan tokoh non politisi, yakni para kiai *sepuh* yang dijadikan panutan para kiai lainnya juga mempengaruhi. *Mbah* Salman dan *Mbah* Baidhowi adalah contoh kiai sepuh yang didengar dan diikuti oleh kiai lain. (8) Pilihan hati sendiri yang didasarkan atas *riyadhoh* atau mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik. (9) mengikuti masyarakat umum di sekitar dan (10) Rasa kecewa yang muncul karena kedekatan salah satu calon kepada kiai lain satu daerah/desa yang salami ini tidak ada kecocokan dengannya. Ini menyebabkan kiai yang kecewa secara otomatis membela calon lain (kasus ini untuk calon Agus-Bowo dan Bambang-Icek, bukan Budi-Moko).

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi kita yang berkepentingan atau minimal yang hendak intens dengan pelaksanaan Pilkada atau sekedar memperhatikan Pilkada:

1. Bagi para kiai yang tidak (belum) siap terjun di dunia politik secara menyeluruh, lebih baik tidak memaksakan diri untuk melangkah lebih

jauh, karena bisa menyengsarakan diri dan umat. Lebih baik jika seorang kiai berjuang di ranah yang menjadi spesifikasinya yakni di jalur pendidikan agama, dakwah dan pengembangan agama Islam lainnya. Di jalur politik, sebaiknya kiai siap menjadi *patok* yang mengekang politisi, bukannya malah dijadikan alat legitimasi dan dipertunjukkan untuk kepentingan pribadi calon.

2. Pilkada adalah ajang penilaian masyarakat kepada calon, karenanya perlu banyak penganalisaan diri, baik kemampuan, kekurangan, kesempatan dan ancaman (kalah). Staf ahli yang mumpuni dan mempunyai vitalitas tinggi sangat dibutuhkan.
3. Di Pilkada, sebaiknya calon tidak menjual diri, tetapi memasarkan diri.
4. Sebenarnya, rakyat butuh bukti riil dari calon yang jadi, karenanya, jika ingin terus menapak yang lebih tinggi, amanah yang dipercayakan oleh rakyat, harus benar-benar direalisasikan. Di sini dibutuhkan *good will* dari calon bersangkutan.
5. Sebaiknya, calon jadi atau tidak, dekat dengan rakyat, harus terus dilakukan, baik ketika seseorang butuh atau tidak. Hal ini mempunyai dampak strategis ke depan.

C. Penutup

Dengan mengucap segala puja dan puji syukur kepada Sang Hyang Maha Sempurna atas segala karunia, rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.

Skripsi ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis saji dan persembahkan. Meski demikian, Penulis meyakini, skripsi ini masih jauh dari kata memadai. Karenanya, kritik yang bersifat membangun penulis harapkan dari berbagai pihak hingga karya ini bisa menjadi lebih baik dan berguna.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang membantu penulisan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga mendapatkan ganti yang sesuai dari Allah SWT.

Demikian, skripsi ini penulis susun dan buat, semoga apa yang penulis lakukan ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis secara pribadi, tetapi juga kepada para pembaca skripsi ini. Semoga, negara kita tercinta Republik Indonesia ini mampu merdeka dalam arti yang sesungguhnya, ikut pro aktif dalam perdamaian dan keselarasan dunia dan menjadi Negara yang *Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo*; sebuah Negara yang *Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur*. Amin.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Arif, Afrosin dan Respati, *Mengawal Demokrasi, Dinamika Pilkada Grobogan*, Solo: ISKRA Publisher, 2006.
- Asa, Syibah, *Dalam Cahaya al-Qur'an, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2000.
- Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2004*, Purwodadi: Bappeda Kabupaten Groboan dengan BPS Kabupaten Grobogan, 2005.
- Biro Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah pada hari Selasa, 22 April 2008
- Departemen Agama Kabupaten Grobogan, *Grobogan Dalam Angka*, Purwodadi: Depag Press, hlm. 110
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-4, 1985
- Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.
- Humas Setda Grobogan, *Potensi Daerah Kabupaten Grobogan*, Purwodadi: Humas Setda Grobogan, 2005.
- Humas Setda Grobogan, *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan*, Purwodadi: Humas Setda Kabupaten Grobogan, 2006.
- Kholidul, M Adib, *Semangat Membangun Demokrasi*, Demak: Gelora, 2007
- KPU Grobogan, *Data dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2006*, Purwodadi: KPU Kabupaten Grobogan, 2006.
- KPU Grobogan, *Hasil Pemilu Tahun 1999* (file)
- Ma'arif, Syamsul, *Pesantren VS Kapitalisme Sekolah*, Semarang: NEED'S Press, 2008.
- Mubarok, Jaih, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Putaka Bani Quraisy, 2005
- Muhammad, Teungku Habi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 6*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003
- Muzadi, Hasyim, *Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nurhasim, Moch (ed), *Konflik Antarelit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- *Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah RI NO. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 3
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

- Qoyim, Ibnu Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa, Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1977
- S., Lukman Thahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah*, Yogyakarta: Qirtas, 2004.
- Saidi, Anas, *Makalah-Makalah Metodologi Penelitian*, (makalah tidak diterbitkan).
- Sembiring, Sentosa, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Disertai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Serat Babad Kartasura/Babad Pacina.
- Sirozi, Muhammad, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Suara Merdeka, 12 Februari 2008.
- Sulaeman, Eman, dalam makalah, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Metode Penelitian Sosial Yang Diterapkan Terhadap Hukum (Metode Penelitian Hukum Empiris)*, (makalah tidak diterbitkan).
- Ummatin, Khoiro, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Cerita Mbah Sudarno (alm)
- Legenda dan mitos Sungai Serang.
- Wawancara dengan Bapak Bambang Pudjiono; Purwodadi.
- Wawancara dengan Bapak Budisatyo; Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Hardono; Sedadi-Penawangan.
- Wawancara dengan Bapak Harnoto; Karang Geneng-Godong.
- Wawancara dengan Bapak Jati Purnomo; Purwodadi.
- Wawancara dengan Bapak Solikin; Latak-Godong.
- Wawancara dengan Gus Ansori; Trowolu-Ngaringan.
- Wawancara dengan Gus Mad (Ahmad Fathur Rosyad); Ngroto-Gubug.
- Wawancara dengan Gus Mahmud; Kandangrejo-Klambu.
- Wawancara dengan Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya; Pekalongan.
- Wawancara dengan Habib Umar Mutohar; Semarang.
- Wawancara dengan Kiai Abu Mansyur; Nampu-Karangrayung.
- Wawancara dengan Kiai Addi Ilalhuda; Mlilir-Gubug.
- Wawancara dengan Kiai Ali Fatah Yasin; Pulokulon.
- Wawancara dengan Kiai Amin Fauzi; Pilang Kidul-Gubug.
- Wawancara dengan Kiai Khozin; Bologarang-Penawangan.
- Wawancara dengan Kiai M Khamdi; Dimoro-Toroh.
- Wawancara dengan Kiai Mashudi; Kluwan-Penawangan.
- Wawancara dengan Kiai Muzamil; Kalongan-Purwodadi.
- Wawancara dengan Kiai Niam Syukri; Peting-Kradenan.
- Wawancara dengan Kiai Rohib Soemowijoyo al-Hafidz; Wates-Kradenan.
- Wawancara dengan Kiai Slamet; Pepe-Tegowanu.
- Wawancara dengan Kiai Zaenal Arifin; Panjunan-Brati.
- Wawancara dengan KH Hambali Mahfud; Pahesan-Godong.
- Wawancara dengan KH Moch Adnan al-Hafidz; Kluwan-Penawangan.
- Wawancara dengan KH Musyafak Zain; Ngambak Rejo-Tanggunharjo.

- Wawancara dengan KH Sya'roni; Gubug.
- Wawancara dengan KH Umar Ali Mahsun; Selo-Tawangharjo.
- Wawancara dengan *Mbah* Munir Abdillah; Ngroto-Gubug.
- Wawancara dengan *Mbah* Muslimin; Wirosari.
- Wawancara dengan *Mbah* Nursahid; Purwodadi.
- Wawancara dengan *Mbah* Sunadi; Sedadi-Penawangan.
- Wawancara dengan Nur KHamid; Leyangan-Penawangan.
- Wawancara dengan Pak Dhe Dhi; Lajer-Penawangan.
- Wawancara dengan Purwadi; Pulokulon.
- Wawancara dengan Sunardi; Leyangan-Penawangan
- <http://abusalma.wordpress.com>.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Daerah_dan_Wakil_Kepala_Daerah_2006.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Kepala_Daerah_dan_Wakil_Kepala_Daerah.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_2004.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada_2005.
- http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26.
- http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=28.
- http://Grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29
- http://grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=42.
- http://grobogan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=42.
- http://grobogan.go.id/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
- http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Bledug_Kuwu.
- http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Mrapen_Abadi
- http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Ki_Ageng_Sela
- http://www.grobogan.com/?Sejarah:Legenda:Ki_Ageng_Tarub.
- http://www.grobogan.com/?Wisata:Kedung_Ombo
- http://www.grobogan.com/?Wisata:Makam_K.A_Tarub
- HTTP://WWW.GROBOGAN.COM/?WISATA:STALAKTIT_DAN_STALAKMIT
- http://www.kpu.go.id/peraturan_uu/Keppres.htm
- <http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Pilkada>
- http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Pilkada&op=detail_hukum_Pilkada&id=6.
- http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-Pemilu99/partai-peserta-Pemilu1999.htm.
- <http://www.suamerdeka.com/harian/0402/20/pem5.htm>.
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/01/prn.20040401-18.id.html>
- www.suamerdeka.com/harian/0403/14/nas6.htm

